



EKONOMI MONETER



M. Zahari Ms, Soeharjoto, Natalia Malau,
Rizal Syaifudin, Fadli Ilyas, Tri Wahyu,
Roy Budiharjo, Rida Ristiyan, Nita Fauziah Oktaviani

ISBN 978-623-198-369-5



9 786231 983695

EKONOMI MONETER

**M. Zahari Ms
Soeharjoto
Natalia Malau
Rizal Syaifudin
Fadli Ilyas
Tri Wahyu
Roy Budiharjo
Rida Ristiyana
Nita Fauziah Oktaviani**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI MONETER

Penulis :

M. Zahari Ms
Soeharjoto
Natalia Malau
Rizal Syaifudin
Fadli Ilyas
Tri Wahyu
Roy Budiharjo
Rida Ristiyana
Nita Fauziah Oktaviani

ISBN : 978-623-198-369-5

Editor : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi Moneter ini.

Buku Ini Membahas Ruang lingkup ekonomi moneter, Inflasi, Kebijakan moneter, Kebijakan fiskal, valuta asing, Ekonomi sisi penawaran, Pasar modal, Bank sentral, Masalah moneter internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 RUANG LINGKUP EKONOMI MONETER	1
1.1 Pengertian Ekonomi Moneter	1
1.2 Mengenal Asal Uang	3
1.3 Pengertian Uang	6
1.4 Fungsi Uang	7
1.5 Jenis Uang	8
1.6 Sistem Standar Moneter	13
DAFTAR PUSTAKA	16
BAB 2 INFLASI	17
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Pengertian dan Pengukuran Inflasi	18
2.3 Komponen Inflasi	19
2.4 Jenis Inflasi	20
2.5 Teori Inflasi	21
2.6 Dampak Inflasi	23
2.7 Inflasi di Indonesia	24
DAFTAR PUSTAKA	26
BAB 3 KEBIJAKAN MONETER	29
3.1 Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip Kebijakan Moneter	29
3.2 Penentuan Respon Kebijakan Moneter	32
3.3 Kebijakan Moneter dan perekonomian Terbuka	32
3.4 Kebijakan Moneter dan Siklus bisnis	33
3.5 Instrumen dan sasaran operasional Kebijakan Moneter	36
3.6 Kerangka strategi Kebijakan Moneter	38
3.7 Kebijakan Moneter dalam perekonomian Indonesia	38

DAFTAR PUSTAKA	41
BAB 4 KEBIJAKAN FISKAL.....	43
4.1 Kebijakan Fiskal	43
4.2 Pengertian Kebijakan Fiskal	43
4.2.1 Pajak.....	44
4.2.2 Klasifikasi Pajak	44
4.2.3 Tarif Pajak.....	45
4.3 Pajak, Pendapatan dan Konsumsi	46
4.3.1 Pajak Nominal.....	46
4.3.2 Pajak Proporsional.....	48
4.4 Pajak dan Keseimbangan Ekonomi.....	50
4.5 Dampak Kebijakan Fiskal	51
DAFTAR PUSTAKA	53
BAB 5 PASAR VALUTA ASING	55
5.1 Pendahuluan.....	55
5.2 Pengertian Pasar Valuta Asing.....	56
5.3 Sejarah Pasar Valuta Asing.....	57
5.4 Fungsi Pasar Valuta Asing	58
5.5 Struktur Pasar Valuta Asing.....	59
5.6 Pelaku Pasar Valuta Asing	60
5.7 Jenis Pasar Valuta Asing.....	61
5.8 Mata Uang yang Diperdagangkan pada Valuta Asing	64
5.9 Risiko Pasar Valuta Asing	64
5.10 Antisipasi Risiko Pasar Valuta Asing	66
5.11 Antisipasi Perusahaan dalam Menghadapi Fluktuatif Valuta Asing	67
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 6 EKONOMI SISI PENAWARAN	71
6.1 Pendahuluan.....	71
6.2 Ekonomi Sisi Penawaran	72
6.2.1 Sejarah Ekonomi Sisi Penawaran.....	72
6.2.2 Platform Ekonomi Sisi Penawaran	75
6.2.3 Celah Ekonomi Sisi Penawaran	80

6.2.4 Memahami Teori Ekonomi Sisi Penawaran	84
6.2.5 Ekonomi Sisi Penawaran dan Sisi Permintaan ...	85
6.2.6 Implikasi Kebijakan Ekonomi Sisi Penawaran....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
BAB 7 PASAR MODAL.....	91
7.1 Pendahuluan	91
7.2 Sejarah Pasar Modal.....	93
7.3 Pasar Modal	97
7.4 Lembaga-Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal	106
7.5 Produk Produk Pasar Modal	114
DAFTAR PUSTAKA.....	118
BAB 8 BANK SENTRAL	121
8.1 Pendahuluan	121
8.2 Status dan Kedudukan BI	122
8.3 Sejarah BI	123
8.4 Visi dan Misi BI.....	124
8.5 Kantor Perwakilan dan Struktur BI	125
8.6 Tujuan Tunggal, Tugas dan Fungsi Utama BI	126
8.7 Produk atau Layanan BI.....	130
8.8 Publikasi BI.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
BAB 9 MASALAH MONETER INTERNASIONAL	137
9.1 Pendahuluan	137
9.2 <i>International Monetary Fund</i> (IMF)	137
9.2.1 Sejarah IMF	137
9.2.2 Tentang IMF	139
9.3 Sejarah Permasalahan Moneter di Dunia.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	151
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Inflasi di Indonesia Pada 2013-2022 (Persen)	25
Gambar 3.1. Trilema kebijakan moneter	33
Gambar 3.2. Grafik Siklus kegiatan Ekonomi	34
Gambar 3.3. Grafik Siklus kegiatan Ekonomi Dengan periode waktu	35
Gambar 3.4. Sasaran Operasional Bank Indonesia	37
Gambar 4.1. Pengaruh Pajak Nominal terhadap Konsumsi Otonom	48
Gambar 4.2. Pengaruh Pajak Pendapatan terhadap Konsumsi	49
Gambar 8.1. Bank Indonesia.....	121
Gambar 8.2. Struktur Organisasi BI	126
Gambar 8.3. Transmisi Kebijakan Moneter BI.....	127
Gambar 8.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi	127
Gambar 8.5. Sekilas Sistem Pembayaran	129
Gambar 8.6. Sekilas Sistem Pembayaran	130
Gambar 9.1. International Monetary Fund Logo	137

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1. Sejarah Bank Indonesia	123
Tabel 9.1. <i>A Timeline of Russian EventsA</i>	146

BAB 1

RUANG LINGKUP EKONOMI

MONETER

Oleh M. Zahari

1.1 Pengertian Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter dewasa ini menjadi kajian yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dikarenakan ekonomi moneter adalah membicarakan masalah yang berkaitan dengan keuangan, yang dapat dimanfaatkan manusia dalam berbagai aktivitas dan lapangan usaha misalnya untuk keperluan transaksi dalam kegiatan ekonomi, penentuan harga/nilai uang, dan kestabilan kurs uang antar negara. Tujuan ekonomi moneter dipelajari ialah guna mengetahui gambaran mengenai mekanisme dalam menciptakan uang, kegiatan pasar uang, penentuan suku bunga, kebijakan moneter, nilai tukar (kurs) dan neraca pembayaran antar negara dan mengkaji berbagai fenomena moneter yang kaitan dengan dampak kebijakan moneter bagi aktivitas ekonomi. Jadi, ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam ekonomi manusia.

Nopirin (2017) mengungkapkan, ekonomi moneter ialah bagian dari ilmu ekonomi guna membahas berkenaan dengan sifat uang, fungsi uang dan dampak uang bagi aktivitas ekonomi. Dalam pandangan teori kuantitas, menurut David Ricardo dapat di lihat dua sisi, yaitu: a). ekonomi moneter adalah membahas tentang kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. Dalam hal ini, penawaran uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Ketika jumlah uang meningkat, nilai mata uang sebenarnya menurun dari nilai aslinya. Misalkan, apabila

jumlah uang mengalami peningkatan jadi 2 kali lipat daripada jumlah uang semula, menyebabkan nilai dari mata uang tersebut menjadi menurun hingga $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai uang pada semulanya. Dengan demikian, menurut David Ricardo, ekonomi moneter ialah membicarakan perubahan nilai dari mata uang. b). ekonomi moneter menjelaskan harga akan dapat berbanding lurus terhadap jumlah peredaran uang. Misalkan, apabila jumlah uang mengalami peningkatan jadi 2 kali lipat sementara jumlah barang diperjualkan tetap sama, sehingga ada kecenderungan barang tersebut dapat mengalami peningkatan jadi 2 (dua) kali lipat daripada harga semula. Bisa berlakunya teori Ricardo ini, bilamana harga mengalami perubahan dengan rasio yang sama pada mata uang. Dalam pada itu, jumlah uang keseluruhan sepadan akan pengeluaran masyarakat.

Irving Fisher menyatakan ekonomi moneter sebagai teori kecepatan transaksi (*transaction velocity theory*). Fisher ini melengkapi pernyataan Ricardo, dimana Ricardo tidak memasukan adanya faktor kecepatan dari pada perputaran uang. Menurut Fisher bahwa perputaran uang yang cepat akan mempengaruhi arus barang/jasa. Dengan demikian, faktor ini menjadi penyebab utama sebagai penentu ukuran nilai dari pada suatu mata uang.

Atas dasar apa yang telah diungkap para ahli, dapatlah dipahami: ekonomi moneter ialah bagian dari ilmu ekonomi mengkaji masalah yang berkenaan dengan uang dalam menunjang aktivitas perekonomian suatu negara.

Sedangkan ruang lingkup pembahasannya mencakup keberadaan uang, karakteristik dan sifat uang, fungsi uang dan perannya dalam kegiatan ekonomi, standar dan sistem moneter, jumlah uang beredar dan inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, pasar uang dan system pembayaran internasional. Disamping itu, ekonomi moneter juga dibahas berkenaan peran lembaga

keuangan, lembaga kredit/lembaga pembiayaan, bank sentral (di Indonesia di kenal dengan Bank Indonesia), termasuk pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) bagi lembaga keuangan. serta masalah yang berkaitan dengan mekanisme moneter yang mempengaruhi proses kegiatan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa.

1.2 Mengenal Asal Uang

Sebelum dikenalkan uang seperti sekarang ini, masyarakat primitive dahulunya tidak kenal dengan adanya transaksi, sebab masing-masing orang berupaya sedemikian rupa agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi dilakukan dengan sendiri atau keluarga sendiri. Apabila mereka merasa lapar maka mereka berburu hewan atau mencari ikan di sungai, kalau ada buah-buahan mereka konsumsi sendiri. Untuk menutupi tubuhnya mereka buat pakaian seadanya dari bahan-bahan kulit kayu atau bahan dari benang, singkatnya kata apa yang mereka perlukan hanya untuk digunakan keluarga sendiri, tidak untuk diperjual belikan.

Perkembangan lebih lanjut dimana apa manusia butuhkan dalam kenyataan tidak semua dapat dipenuhi/dihasil sendiri, masih banyak kebutuhan yang tidak bisa untuk di penuhi sendiri. Oleh karena itu mereka mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan barang yang sulit meraka peroleh dengan sendiri, maka mereka mencoba minta bantuan orang lain mau membantu atau ditukarkan barangnya yang kelebihan dengan barang yang tidak dimiliki orang lain namun orang tersebut membutuhkannya. Sehingga terjadilah pertukaran barang diantara mereka seperti beras di tukar dengan ikan, atau pakaian dengan daging, dan lainnya. Kegiatan pertukan semacam ini di kenal dengan sistem barter, yakni barang dipertukarkan dengan barang.

Sistem barter ini, ternyata juga masih terdapat banyak kendala yang mereka rasakan, seperti adanya kesulitan dalam mencari orang yang mau barangnya dipertukarkan sesuai keinginan, lagi pula kesulitan pada penentuan nilai barangnya yang dipertukar satu dengan yang lainnya tidak sebanding atau sama nilainya. Atas kesulitan yang dihadapi tersebut maka timbul pemipikiran baru untuk mengatasinya yaitu dengan memakai suatu benda yang akan digunakan untuk alat tukar. Adapun benda yang bisa dijadikan untuk alat tukar tersebut hendaknya suatu benda yang dapat berlaku secara umum dan di terima menjadi alat pertukaran. Ada beberapa benda pada waktu itu dapat digunakan untuk alat tukar, yakni berupa garam, kerang, kulit binatang, gigi binatang, pisau, logam (emas/perak), dsb. Garam pernah dipakai orang Romawi untuk alat pertukaran atau alat bayar upah pekerja.

Mengingat beberapa benda yang dijadikan uang untuk alat pertukaran tersebut masih mengalami kendala diantaranya membawa, pengangkutan dan menyimpan serta timbul kesulitan lain seperti pada persyaratan uang logam (emas dan perak) masyarakat diperbolehkan untuk menciptakan dan meliburkan uang logam tersbut. Apabila harga emas/perak di pasar melebihi nilai nominal uang yang diciptakan pemerintah, maka masyarakat akan melebur uang tersebut dan menjualkannya di pasar, demikian pula sebaliknya.

Uang logam berupa emas/perak, dianggap mempunyai nilai tinggi dan disukai banyak orang (umum), serta lebih tahan dan tidak gampang rusak. Disamping itu uang logam (emas maupun perak) ini di kenal pula dengan sebutan uang penuh (*full money*), dimana uang tersebut mempunyai nilai yang sama antara bahan (*intrinsik*) dengan nilai nominal yang tertera di mata uang bersangkutan.

Perkembangan lebih lanjut, selajan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, maka penggunaan uang

logam sebagai alat transaksi mengalami kendala, dimana adanya keterbatasan dalam penyediaan/produksi logam mulia (baik emas ataupun perak) akibatnya nilai logam mulia semakin lama semakin tinggi. Kondisi ini, tidak terlepas dari prinsip ekonomi yakni apabila ada permintaan akan barang tersebut tinggi apalagi barang itu bersifat langka, maka harga suatu barang itu akan naik, demikian pula kebalikannya. Sementara itu, diantara persyaratan uang logam, adalah masyarakat diberi hak untuk menempa/mencipta uang atau meleburkannya untuk diperjualbelikan maupun untuk dipakai sendiri serta menyimpannya dalam jumlah yang tidak dibatasi. Atas dasar masih adanya kelemahan yang dimiliki dalam pemakaian uang logam ini, maka para ahli menemukan ide untuk menggantikan uang logam dengan bahan terbuat dari kertas, yang kemudian di kenal dengan uang kertas.

Sebenarnya uang kertas ini pada awalnya lembaran kertas surat utang (*Promise Money*) sebagai bukti dari pada kepunyaan atas emas atau perak merupakan perantara atau alat yang digunakan untuk bertransaksi. Dengan demikian uang kertas di waktu itu yang beredar adalah uang yang sepenuhnya dijamin dengan 100% emas ataupun perak, dan uang tersebut tersimpan pada pandai emas maupun perak, serta kapan saja dapat dipertukarkan penuh sesuai jaminannya.

Uang kertas ini lebih digemari oleh setiap orang, kemungkinan disebabkan lebih praktis di bawa memana saja, sehingga orang mulai meninggalkan penggunaan emas berupa alat tukar dan digantikannya atau lebih memilih uang kertas menjadi alat tukar.

Perkembangan berikutnya, dimana walaupun dalam kondisi yang masih sederhana telah dapat dibangun institusi/lembaga keuangan yang digunakan untuk menitip/menyimpan uang, menukar, dan meminjam uang serta kegiatan lain yang berkenaan dengan uang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (IT), maka perkembangan pemakaian uang secara elektronik makin marak, yaitu untuk melakukan transaksi ekonomi, pembayaran tagihan, transfer, dsb tidak perlu lagi untuk membawa berupa uang tunai, akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik atau moble banking internet.

1.3 Pengertian Uang

Uang ialah sesuatu benda yang bisa digunakan serta dapat diterima secara umum guna melaksanakan bermacam pembayaran/transaksi ekonomi, misalnya membeli barang/jasa, berinvestasi, pelunasan kredit/hutang, dsb.

Definisi uang menurut para ahli ekonomi, diantaranya AC Pigou, DH Robertson, dan RG Thomas (Darmawan, 2006). AC Pigou, mengungkapkan uang ialah alat tukar; DH Robertson uang yaitu sesuatu yang bisa diterima untuk dijadikan alat pembayaran guna memperoleh berbagai barang; sementara RG Thomas, menyatakan uang ialah sesuatu benda yang disediakan dan dapat diterima bagi kalangan umum berupa alat pembayaran guna membelikan atas berbagai barang ataupun jasa, dan alat membayar utang serta untuk kekayaan lain yang berharga.

Berdasarkan atas apa yang diungkapkan ini, maka suatu benda bisa mendapat pengakuan sebagai uang harus memenuhi persyaratan/kriteria, diantaranya:

- 1) Diterima oleh masyarakat umum (*acceptability*)
- 2) Adanya suatu Lembaga/institusi yang mengesahkan/ menjamin keberadaan uang tersebut
- 3) Nilainya relatif stabil (*value stability*)
- 4) Mudah dibawa, dapat digunakan dan disimpan
- 5) Tidak mudah mengalami kerusakan (*durability*)
- 6) Tidak gampang dipalsukan (*scarcity*)

- 7) Jumlah yang diedarkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat
- 8) Fleksibilitas dan bisa disesuaikan dengan tuntutan keperluan transaksi
- 9) Tersedia ukuran nilai lebih kecil dalam bentuk pecahan sehingga mudah dibagikan dengan tidak berkurang nilainya (*divisibility*)

1.4 Fungsi Uang

Fungsi uang pada dasarnya bertujuan untuk memperlancar aktivitas dalam pertukaran barang yang diperdagangkan. Oleh karenanya, Uang yang beredar di masyarakat secara umum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Secara rinci, fungsi uang tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:.

a. Alat Tukar (*exchange medium*)

Fungsi uang yang ini digunakan untuk lebih memperlancarkan dalam kegiatan pertukaran, dimana tidak diperlukan lagi dilakukan pertukaran antara barang sama barang (*barter*) yang terlalu sulit, akan tetapi hanya cukup dengan penggunaan alat tukar berupa uang.

b. Satuan Hitung (*account unit*)

Uang bisa berfungsi guna penghitungan nilai, dimana sejumlah barang ataupun jasa yang dipertukarkan, bisa ditentukan harga barang/jasa yang dihitung dan dibandingkan dengan nilai uang.

Misalkan, menggunakan uang Rupiah, dimana satu unit rumah atau satu unit mobil bisa diukurkan nilainya, dan bisa dibandingkan kedua nilainya. Jika nilai satu unit rumah seharga Rp 300 juta sedangkan satu unit mobil seharga Rp 150 juta, artinya nilai satu unit mobil yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai satu unit rumah.

c. Sebagai Instrumen Penyimpan Nilai (*valuta*)

Instrumen **ini** bisa dipergunakan untuk pengalihan daya beli pada saat ini ke masa mendatang. Jika penjual pada saat ini mendapatkan uang dari hasil penjualan dari barang/jasa, kemudian uang itu disimpan/ditabung dulu guna diperuntukan pembelian barang/jasa di masa akan datang.

d. Instrumen pembayaran di masa datang

Transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi belum tentu diselesai pada saat itu juga, akan tetapi acapkali berlanjutan atau ditundakan penyelesaian sampai batas waktu yang ditentukan atau jatuh tempo. untuk itu, diperlukan uang guna bisa di bayar pada waktu mendatang.

1.5 Jenis Uang

1. Jenis uang berdasarkan Lembaga/institusi penyelenggara.

Jenis uang ini dapat dibedakan atas:

- a) Uang kartal atau dikenal dengan *common money* ialah alat pembayaran yang disahkan/ dikeluarkan pemerintah dan dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan berbagai pembayaran atau transaksi.
- b) Uang giral, ialah uang tersebut merupakan kepunyaan masyarakat berupa simpanan (tabungan/deposito) pada suatu lembaga keuangan dan sewaktu-waktu bisa ditarik/diambil sesuai dengan kebutuhan.

2. Jenis uang berdasarkan bahan yang dipakai

Perkembangan dalam pemakaian uang seiring atas peradaban yang dilalui manusia. Apabila peradaban manusia lebih modern, bentuk uang yang dipakainya akan pula semakin maju. Dalam kegiatan ekonomi, maka bentuk uang sebagai pemenuhan kebutuhan bisa diperbedakan atas beberapa tahap, yakni pemenuhan kebutuhan sendiri

(masyarakat primitif), perekonomian barter (*barter economics*) dan perekonomian uang (*monetary economics*).

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan dengan singkat berikut ini:

1) Tahap Kebutuhan Sendiri (Masyarakat Primitif)

Pada Tahap ini digambarkan dengan tidak diadakannya transaksi ekonomi dengan orang lain, sebab apa yang diperoleh langsung digunakan untuk keperluan/kebutuhan sendiri.

2) Tahap Perekonomian Barter

Kondisi tahap barter ini, dimana pada waktu itu tidak segala kebutuhan bisa dihasilkan sendiri, melainkan harus meminta bantuan orang lain agar barang yang dipunyainya mau ditukarkan dengan suatu barang yang dimilikinya.

Kelemahannya dalam sistem barter ini, adanya kesulitan pada saat mencari orang yang mempunyai barang yang sesuai dengan keinginannya atau orang yang mau diajak untuk bertukaran barang dengan nilai tukar yang sepadan.

3) Tahap Perekonomian Uang

a. Pemakaian Uang Barang

Adanya beberapa kesulitan yang dialami dalam sistem barter, membuat orang berpikir mencari alternatif lainnya guna memudahkan melaksanakan pertukaran barang, yaitu memakai suatu benda/barang untuk dijadikan alat tukar. Benda/barang yang dipilih tersebut adalah mempunyai nilai tinggi, atau memiliki kekuatan magis, ataupun berupa barang yang dibutuhkan sehari-hari (Bagi masyarakat Roma dulunya pernah menggunakan garam untuk dijadikan alat tukar).

Pemakaian benda/barang untuk dijadikan alat tukar masih mengalami kendala, diantaranya: Tidak ada pecahannya, berlaku hanya di daerah tertentu, sulit mengangkut dan menyimpannya, tidak tahan dalam waktu lama atau mudah rusak

b. Pemakaian Uang Logam

Logam yang dipakai untuk dijadikan uang logam adalah berbahan emas/perak. Jenis uang logam ini mempunyai nilai yang tinggi serta stabil, dapat dengan mudah dikenali, awet dan tidak mudah rusak.

Pengalihan ke uang logam dimaksudkan guna mengatasi kelemahan yang ada pada saat pemakaian uang barang. Akan tetapi disebabkan untuk menghasilkan logam mulia jumlahnya masih terbatas, padahal kegiatan transaksi di masyarakat makin meningkat, akibatnya uang logam ini tidak lagi digunakan.

c. Pemakaian Uang Kertas

Jenis uang kertas ialah uang tersebut dibuat berasal dari pada bahan kertas yang memiliki gambar atau warna tertentu yang bisa dijadikan alat transaksi pembayaran yang sah.

Mengingat masih ada kelemahan yang dialami saat pemakaian uang logam, maka pemakaian uang kertas dijadikan alternatif yang lebih mudah dalam bertransaksi sebab bahannya mudah di peroleh, mudah di bawa dan di simpan.

d. Pemakaian Uang Elektronik

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi (IT), maka pemakaian uang secara elektronik makin marak, yaitu untuk melakukan transaksi ekonomi, pembayaran tagihan, transfer, dsb tidak perlu lagi untuk membawa berupa uang tunai, akan

tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik atau mobile banking internet.

Secara khusus jenis uang ini bisa kategori ke dalam beberapa aspek (Nopirin, 2017), yaitu:

1. *Full Bodied Money*

Jenis uang ini di kenal dengan sebutan uang penuh, dimana nilai uang yang tertera sama dengan nilai bahannya (*intrinsic*) yang dipakai. Atau kata lain, dimana nilai intrinsiknya sebanding nilai nominalnya. Contohnya: uang terbuat dari perak ataupun emas.

Perasyaratan yang harus dipenuhi apabila memakai uang emas/perak, yaitu :

- a. Masyarakat diberi kebebasan untuk bisa menciptakan uang logam tersebut, meleburnya, dan memakainya atau menjualnya.
- b. Bagi setiap orang diberi hak dan tidak dibatasi untuk melakukan penyimpanan uang logam.

2. *Representative Full Bodied Money*

Pada umumnya uang jenis tersebut berupa kertas pengganti logam mulia yang dijadikan uang, atau logam mulia hanya dijadikan sebagai jaminan, sedangkan yang diedarkan adalah uang berbahan kertas yang dapat dipergunakan lebih mudah untuk bertransaksi.

3. *Credit Money*

Credit money ini, dibagi atas beberapa jenis uang yaitu :

- a. Token Coins

Jenis uang ini terbuat dari logam yang dikenal berupa uang tanda, dimana nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan nilai barang/ bahannya (Nilai nominal uang > nilai intrinsik). Contoh uang untuk pengembalian atau uang pemecahan.

b. Representative Token Money

Jenis uang ini pada dasarnya diterbitkan/ diciptakan dan jamin keberadaannya oleh pemerintah/bank sentral, dimana nilai nominalnya lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya.

Uang ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

c. Fiat Money (*Token Money*)

Jenis uang fiat juga sering dikenal *token money*, pada lazimnya uang ini resmi diterbitkan oleh pemerintah berupa uang kertas dengan jumlah terbatas (uang ini di Indonesia tidak lagi diedarkan). Bahannya terbuat dari kertas, yang dapat digunakan untuk alat bertransaksi bagi keperluan masyarakat. Pada dasarnya uang ini tidak tergantung pada simpanan emas/perak, akan tetapi berpatokan kepada jumlah permintaan/penawaran masyarakat.

d. Uang Kertal (kertas & logam)

Tergolong ke dalam uang ini ialah uang logam serta uang kertas. Untuk uang kertas berupa lembaran dibuatkan berbahan kertas ataupun bahan menyerupai kertas untuk uang kertas, sedangkan emas/perak untuk uang logam, yang dihiasi gambar serta diberikan cap/rahasia tertentu sebagai tanda sah alat pembayaran (bukan palsu) beredar di masyarakat luas.

e. Uang Giral

Uang giral ini sering di kenal dengan *Demand Deposit*, ialah simpanan uang masyarakat yang ada pada bank. Pengambilannya dapat dilakukan kapan saja serta bisa dipindahkan tangankan ke orang lainnya dengan terlebih dahulu menulis jumlah uang pada lembaran kertas dengan sebutan cek, guna dilakukan perintah pembayaran.

f. Uang Kuasi (*Near money*)

Dalam istilah ekonomi sering dipakai guna menggambarkan suatu aset yang bisa dijadikan uang dengan cepat. Uang kuasi ialah berupa aktiva yang dimiliki pihak swasta domestik, dan bisa digunakan hanya untuk keperluan sebagiannya saja daripada fungsi uang atau belum dipenuhi sebagai media pembayaran (*exchange medium*). Contoh: tabungan, deposito berjangka, obligasi dan rekening valutas asing kepemilikan swasta domestik.

1.6 Sistem Standar Moneter

Standar Moneter ialah alat suatu mata uang yang digunakan untuk dasar daripada uang yang beredar dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu bangsa. Standar moneter ini terbagi atas logam ataupun kertas.

1. Standar Logam

Standar logam, yaitu pengedaran uang bagi masyarakat berdasarkan kepada logam emas/perak. Dalam pelaksanaan standar logam dapat pula diperbedakan atas:

a) Standar Tunggal

Merupakan standar, dimana sistem dalam pengedaran uang didasarkan kepada sejenis logam yang digunakan dalam pembuatan mata uang. Jika logam yang digunakan untuk dasar daripada uang berupa emas, artinya itu standar emas. Bilamana logam terbuat terbuat dari perak, akan dinyatakan standar perak.

Standar emas pertama kali dipakai negara Inggris tahun 1816, dan untuk standar perak negara Cina paling lama menggunakannya yaitu hingga tahun 1935. Sedangkan beberapa negara lainnya di dunia menggunakan standar emas hingga tahun 1936. Pada saat terjadi resesi ekonomi melanda dunia waktu tahun 1929,

sejumlah negara tidak lagi memakai standar emas. Seperti Inggris pada tahun 1931 menghentikan menggunakan standar emas, Perancis, Belanda dan Swiss tahun 1936, serta terakhir tahun 1971 di Amerika Serikat.

b) Standar Pincang

Dikatakan standar pincang karena dalam sistem pengedaran uang seharusnya berdasarkan kepada hanya sejenis logam, namun pada kegiatan perekonomian beredar juga mata uang berasal logam lainnya bukan merupakan mata uang distandarkan. Umpamanya logam emas jadi uang standar, namun kenyataannya uang perak yang menjadi alat bayar yang juga berlaku sah di kalangan masyarakat.

c) Standar Kembar

Dimaksudkan standar kembar dimana dalam sistem pengedaran uangnya berdasarkan kepada dua macam mata uang logam yang berlaku sekaligus yakni menggunakan standar emas serta juga standar perak. Penentuan besaran rasio nilainya mata uang, baik emas ataupun perak adalah pemerintah, mengacu kepada undang-undang. Umpamanya dalam undang-undang ditetapkan rasio dari emas dengan perak ialah 1 gr emas = 10 gr perak (1 : 10). Namun dalam prakteknya pada pasaran bebas telah mengalami perubahan harga, akibatnya rasio diantara emas dengan perak bernilai 1 gr emas = 15 gr perak (1 : 15). Adanya perubahan dari harga ini, menyebabkan masyarakat diuntungkan yaitu uang emas tersebut mereka leburkan kemudian ditukarkannya dengan perak, karena 1 gr emas dapat ditukar dengan 15 gr perak. Artinya mereka dapat menciptakan uang perak sebanyak 15 gr dimana nilai uangnya sebanding 1 gr uang emas. Dengan demikian

mata uang terbuat dari emas lama-kelamaan akan hilang dari peredarannya, karena telah banyak dileburkan masyarakat guna dipertukarkan dengan perak, akibatnya uang beredar pada kegiatan perekonomian tinggal mata uang yang terbuat dari perak lagi.

Atas dasar kenyataan ini, Oleh Gresham ahli dibidang ekonomi keuangan berasal dari Inggris mengungkapkan suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Gresham. Hukum ini menyatakan pada sistem keuangan dimana menggunakan standar kembar, apabila nilai rasio diantara emas dengan perak berdasarkan undang-undang mengalami perbedaan di pasaran, maka logam dengan nilainya lebih tinggi akan terdesak dari peredaran oleh logam nilainya lebih rendah.

Untuk mengatasinya, maka suatu negara perlu mendorong negara-negara lainnya untuk berperan aktif untuk bisa membeli logam yang telah mengalami penurunan nilainya. Dengan adanya pembelian logam tersebut, ada kemungkinan nilai logam tersebut dapat meningkat Kembali, sehingga dapat memulihkan kembali nilai rasio uang logam tersebut sesuai dengan yang telah digariskan undang-undang.

2. Standar Kertas.

Penganut sistem dengan standar kertas ini telah mencakup hampir seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada standar kertas pengedaran uangnya tidak lagi berdasarkan kepada penggunaan logam mulia. Akan tetapi yang berlaku dan diterima untuk alat bayaran adalah mata uang terbuat dari kertas yang sah dikeluarkan/ diciptakan bank sentral/pemerintah dijaminakan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. 2001. Ekonomi Moneter. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.
- Darmawan. 2006. Analisis Permintaan Uang Kuasi di Indonesia Periode 1983- 2005, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XIII (2).
- Natsir, M., 2014. Ekonomi Moneter & Kebanksentralan. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nopirin. 2017. Ekonomi Moneter. Buku I. BPFE. Yogyakarta.
- Manullang, M, 2002. Ekonomi Monete, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mishkin, Frederick S. 2001. Economic of Money, Banking, Financial Market, Addison Wesley Longman, Singapura.
- Robertson, D. H. 1922. Money. Nisbet & Co. Pp.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6546046/fungsi-uang-alat-tukar-hingga-pendorong-ekonomi>.

BAB 2

INFLASI

Oleh Soeharjoto

2.1 Pendahuluan

Negara melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Teja, 2015). Untuk itu, pembangunan yang dilakukan suatu negara, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Hingga kini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sehingga setiap negara berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Soeharjoto & Danova, 2020). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan (Soeharjoto, 2020). Kebijakan ini, penting diterapkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga capaian dari pertumbuhan ekonominya, dapat menjangkau ke seluruh golongan masyarakat, terutama pada golongan bawah. Artinya, pemerintah dapat menjaga ketersediaan kebutuhan barang dan jasa di pasar dengan harga yang stabil. Jadi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi bila pertumbuhan ekonominya diikuti dengan inflasi yang rendah (Dharma & Djohan, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, biasanya diikuti dengan inflasi yang tinggi (Simanungkalit, 2020). Maka dari itu, negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi baik, disesuaikan dengan kemampuan negaranya, agar pertumbuhan ekonominya tidak diikuti dengan inflasi yang tinggi. Inflasi yang rendah, memberikan efek positif terhadap masyarakat,

karena dapat menjaga daya belinya, sehingga kesejahteraannya dapat lebih optimal. Inflasi yang rendah, biasanya diikuti dengan suku bunga rendah, sehingga akan meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila terjadi inflasi yang tinggi, akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga mengakibatkan penurunan investasi dan konsumsi masyarakat, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Akibat inflasi yang tinggi, akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu, pemerintah perlu selalu berupaya menjaga stabilitas inflasinya (Triwahyuni, 2021).

2.2 Pengertian dan Pengukuran Inflasi

Dalam realitanya, harga barang dan jasa umumnya mengalami fluktuasi (Resnia, 2012). Kondisi ini, terjadi karena adanya peningkatan permintaan atau pun kenaikan dari biaya produksi. Meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dapat dikatakan sebagai inflasi (Samuelson & Nordhaus, 2001). Namun, apabila yang mengalami kenaikan harga hanya satu atau beberapa item saja dan terjadi pada waktu sesaat, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi (Suseno & Astiyah, 2009).

Pada umumnya, inflasi dapat diukur dalam lingkup yang luas dan kecil. Inflasi secara luas diukur dari keseluruhan kenaikan biaya hidup di suatu negara, sedangkan dalam lingkup yang kecil diukur berdasarkan suatu kelompok komoditas. Inflasi dalam lingkup kecil, sering terjadi pada kelompok tertentu. Namun, semakin berkembangnya perekonomian dan komoditas yang dikonsumsi masyarakat, membuat perhitungan inflasi menjadi lebih kompleks.

Angka indeks, sering digunakan sebagai indikator inflasi yang terjadi dari waktu ke waktu (Sukirno, 2011). Angka indeks yang digunakan meliputi indeks harga produsen, indeks harga

perdagangan besar, dan indeks harga konsumen. Indeks harga produsen dilakukan dengan mengukur tingkat harga yang terjadi pada tingkat produsen. Indeks harga perdagangan besar dilakukan dengan mengukur pergerakan harga dari komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah. Indeks harga konsumen dibuat berdasarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Indeks harga konsumen, merupakan salah satu indeks yang sering digunakan dalam perhitungan inflasi. Namun, selain ketiga indeks tersebut, terdapat dua indikator inflasi lainnya, yakni produk domestik bruto deflator dan indeks harga aset. Produk domestik bruto deflator dilakukan dengan mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan, sedangkan indeks harga aset dilakukan dengan cara memperhatikan perilaku pergerakan dari harga aset secara keseluruhan. Agar hasilnya lebih akurat, dalam perhitungan angka indeks, biasanya dilakukan secara periodik. Angka indeks yang terbentuk dapat dihitung laju inflasinya. Adapun caranya, dengan menghitung perubahan angka indeks dalam periode tertentu.

2.3 Komponen Inflasi

Inflasi pada umumnya dapat dibagi berdasarkan karakteristik dari kelompok barang dan jasanya. Adapun karakteristiknya, dapat berdasarkan sensitifitas dari barang dan jasa pada kondisi tertentu. Inflasi, pada dasarnya dapat dirinci menjadi dua komponen, yakni inflasi inti dan inflasi non inti (Miftahuddin, 2018). Inflasi inti, merupakan inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Jadi, inflasi inti merupakan komponen inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap output riil dalam jangka menengah hingga panjang (Quah & Vahey, 1995). Hal ini, dapat terjadi karena inflasi inti

merupakan fenomena moneter, sehingga komponen inflasi yang persisten ini, tercermin dari ekspektasi masyarakatnya. Inflasi non inti, merupakan komponen inflasi dengan volatilitas cenderung tinggi. Kesemuanya ini, dapat terjadi karena adanya pengaruh dari faktor non fundamental yang memiliki kecenderungan bersifat hanya sementara. Dengan demikian, Inflasi non inti menurut Okun (1971) dan Flemming (1976), merupakan inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan dari penawaran dan berada di luar kendali otoritas moneter, tetapi hanya bersifat sementara.

2.4 Jenis Inflasi

1. Pada realitanya, berdasarkan kriteria terdapat beberapa jenis inflasi. Inflasi yang terjadi dapat berdasarkan sumber penyebabnya, asal usulnya, parah tidaknya, dan penyebab awal inflasi.
2. Jenis inflasi berdasarkan sumber penyebabnya, dapat terjadi dikarenakan *demand pull inflation*, *supply side inflation*, dan *demand supply inflation* (Soediyono, 1992). *Demand pull inflation* dapat terjadi karena kenaikan harga disebabkan oleh gangguan dari sisi permintaan barang dan jasa. *Supply Side Inflation* atau *cost push inflation* merupakan inflasi yang disebabkan oleh gangguan dari sisi penawaran barang dan jasa. Kondisi ini, biasanya ditandai dengan terjadinya kenaikan harga yang disertai dengan penurunan produksi. Hal ini, mengakibatkan inflasi yang terjadi dibarengi dengan resesi. *Demand supply inflation* merupakan peningkatan permintaan total yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang diikuti dengan penurunan penawaran total, sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Interaksi antara peningkatan permintaan total dan penurunan penawaran total, akan mendorong kenaikan

harga. Keadaan ini, merupakan akibat dari adanya ekspektasi dari terjadinya kenaikan harga dan upah, serta akibat dari inflasi pada periode sebelumnya.

3. Jenis Inflasi yang berdasarkan asal usulnya, dapat dikelompokkan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri (Nopirin, 1994). Inflasi yang berasal dari dalam negeri merupakan inflasi yang terjadi karena adanya gangguan dari dalam negeri, baik akibat tindakan dari masyarakat, maupun tindakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang perekonomian. Inflasi yang berasal dari luar negeri merupakan inflasi yang terjadi karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri.

Jenis inflasi berdasarkan parah-tidaknya, dapat di klasifikasikan dalam beberapa kelompok. Adapun pengelompokannya, meliputi inflasi ringan yang berada di bawah 10 persen per tahun, inflasi sedang yang berada antara 10 persen hingga 30 persen per tahun, inflasi berat yang berada antara 30 persen hingga 100 persen per tahun, serta hiperinflasi yang berada di atas 100 persen per tahun (Boediono, 1994). Namun, menurut Samuelson & Nordhaus (2001), inflasi dapat dikelompokkan menjadi *moderat inflation*, *galloping inflation*, dan *hyperinflation*.

2.5 Teori Inflasi

Beragam teori inflasi telah dikemukakan oleh para pakar ekonomi. Namun, secara garis besarnya, terdapat dua kelompok besar, yakni penganut paham monetaris dan non monetaris. Inflasi menurut penganut paham monetaris dapat terjadi karena dalam suatu perekonomian, jumlah uang beredar yang ditawarkan memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Kondisi ini, dalam teori Klasik disebut sebagai Teori Kuantitas Uang (Mankiew, 2012). Dalam teori ini,

dijelaskan bahwa harga secara umum ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan uang. Untuk itu, dalam teori klasik memungkinkan membahas inflasi tanpa mengaitkan dengan variabel makro lainnya. Teori ini, banyak diterima oleh para ekonom dan digunakan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat, tetapi bagi ekonom dengan paham Keynesian, justru memberikan kritikan terhadap teori ini, karena menurutnya tidak berlaku dalam jangka pendek, ketika harga-harga sangat rigid, yang diakibatkan perputaran uang tidak konstan. Teori *non monetarist* dari *structuralist theory* dan *Post Keynesian Theory*, memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep monetaris. Teori strukturalis mengungkapkan bahwa inflasi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Hal ini, menunjukkan bahwa terjadinya inflasi bukan semata-mata fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Untuk itu, penganut teori strukturalis dalam menyelesaikan masalah inflasi, seringkali menggunakan pendekatan moneter dan fiskal. Keynesians juga mengungkapkan bahwa inflasi dapat terjadi ketika permintaan total dari barang dan jasa melebihi total penawaran saat keadaan *full employment*. Hal ini, membuat Keynesian menganggap bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi inflasi, seperti pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, investasi, pemerintah dan pajak. Proses inflasi, menurut Keynes, merupakan proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Hal ini, mengakibatkan Inflasi yang terjadi akibat masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

Disamping teori tersebut, Phillips menjelaskan teori lain, dengan cara menghubungkan pengangguran dengan perubahan upah nominal (Samuelson & Nordhaus, 2001). Adapun hasilnya, dapat digambarkan dalam bentuk kurva Phillips, dalam bentuk garis regresi. Jadi, setiap titik yang terdapat dalam gambar tersebut, menunjukkan kombinasi nilai persentase perubahan tingkat upah nominal dan persentase tingkat pengangguran pada tahun yang bersangkutan. Diagram pencar yang membentuk garis regresi tersebut, memiliki hubungan yang negatif. Artinya, peningkatan upah nominal akan disertai dengan penurunan pengangguran, dan begitu pula sebaliknya. Namun, pada saat itu, juga telah ditemukan pengembangan dari kurva phillips aslinya. Pada kurva ini, menunjukkan bahwa inflasi bukan terjadi karena adanya perubahan upah nominal, tetapi terjadinya perubahan harga merupakan tendensi dari kenaikan upah nominal dikurangi dengan tingkat kenaikan produktivitas tenaga kerjanya.

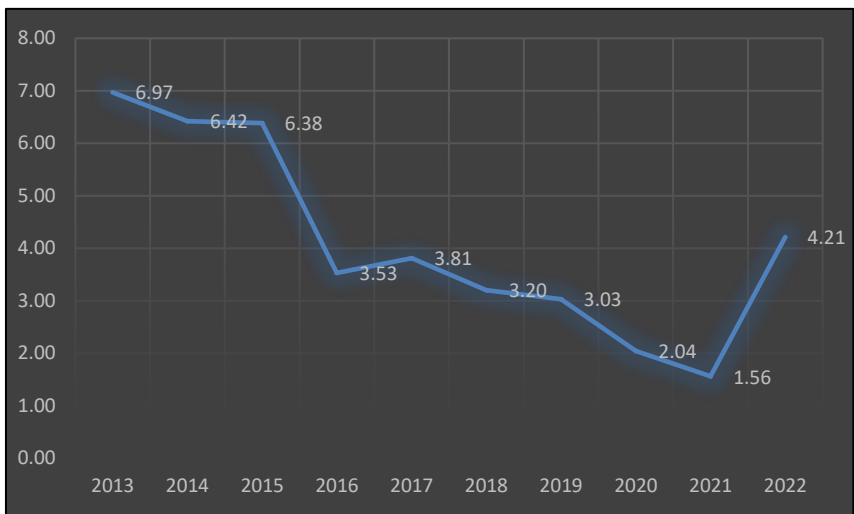
2.6 Dampak Inflasi

Inflasi yang rendah, mengindikasikan negara dapat mengelola perekonomiannya secara baik. Hal ini, dikarenakan inflasi yang terjadi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, karena inflasi mempengaruhi daya belinya. Untuk itu, pemerintah senantiasa selalu berupaya membuat kebijakan yang dapat menekan laju inflasi. Namun, agar inflasi tidak berdampak buruk pada perekonomian, terdapat nilai batasan yang dapat ditolerir. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil, secara umum akan berdampak pada penurunan daya beli, kondisi ketidak pastian, dan berkurangnya daya saing produk nasional. Disamping itu, inflasi juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya pada perekonomian. Biaya yang ditimbulkannya, dapat digolongkan dalam kelompok biaya inflasi yang terduga dan biaya inflasi

yang tidak terduga. Biaya inflasi yang terduga meliputi *shoe-leather cost*, *menu costs*, distorsi pajak, dan peningkatan volatilitas harga relatif. Biaya inflasi yang tidak terduga, meliputi redistribusi pendapatan dan biaya lainnya yang tergolong biaya yang tak terduga.

2.7 Inflasi di Indonesia

Pada periode 2013-2022, rata-rata inflasi di Indonesia masuk dalam kategori ringan, yakni sebesar 4,12 persen dengan standar deviasi sebesar 1,88 persen. Pada kurun waktu tersebut, inflasi tertinggi terjadi pada 2013 sebesar 6,97 persen dan terendah pada 2021 sebesar 1,56 persen. Inflasi di Indonesia memiliki tren yang semakin menurun selama 9 tahun terakhir, tetapi pada 2022 mengalami peningkatan lagi. Pada 2013-2015 rata-rata inflasinya sebesar 6,59 persen, kemudian pada 2016-2019 turun menjadi sebesar 3,39 persen. Pada 2020, dengan merebaknya pandemi COVID-19 mengakibatkan inflasinya turun lagi menjadi sebesar 2,04 persen dan pada 2021 inflasinya semakin menurun menjadi 1,56 persen, tetapi pasca pemberlakuan pelonggaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mengakibatkan inflasi pada 2022 kembali meningkat, menjadi sebesar 4,21 persen. Kondisi ini, menunjukkan bahwa inflasi yang wajar masih dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi pada tahapan tertentu, pemerintah perlu mengambil kebijakan agar inflasinya dapat segera kembali pada tingkat yang wajar, karena bila tidak justru pertumbuhan ekonominya yang telah dicapai akan diikuti dengan inflasi yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi riilnya menjadi negatif dan mengakibatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi semakin menurun. Untuk itu, pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu disesuaikan dengan kemampuannya.



Gambar 2.1. Inflasi di Indonesia Pada 2013-2022 (Persen)
Sumber: Bank Indonesia, 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1994. *Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: LPBFE.
- Dharma, B. D., & Djohan, S. 2015. Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Petumbuhan Ekonomi di Kota Samarinda. *Kinerja*, 12(1), 62-70.
- Flemming, J. S. 1976. *Inflation*. Great Britain: Oxford University Press.
- Miftahuddin. 2018. Analisis Inflasi Melalui Vektor Autoregresi Berganda (VAB) dengan Lima Variabel Informasi. *Jurnal Matematika, Statistika, & Komputasi*, 14(2), 166-179.
- Mankiew, G. 2012. *Principles of Macroeconomics*. USA: South-Western Cengage Learning.
- Nopirin. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Okun, A. M. 1971. The Mirage of Steady Inflation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 485-498.
- Resnia, R. 2012. Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (BAPOK) dan Daya Beli Kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(2), 169-188.
- Simanungkalit, E. F. B. 2020. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management*, 13(3), 327-340.
- Soeharjoto, & Danova, G. K. 2020. Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Cadangan Devisa di Asean-5. *Jurnal Ecodemica*, 4(1), 68-76.
- Soeharjoto. 2020. Factors That Affect Inequality Distribution Income in Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(3), 122-130.
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suseno, & Siti Astiyah. 2009. *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. 2001. *Economics*. McGraw Hill, New York: McGraw Hill.
- Soediyono, R. 1992. *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Triwahyuni. 2021. Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomika Sharia*, 6(2), 199-210.
- Teja, M. 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1), 63-76.
- Quah, D., & Vahey, S. P. 1995. Measuring Core Inflation. *The Economic Journal*, 105(432), 1130-1144.

BAB 3

KEBIJAKAN MONETER

Oleh Natalia Artha Malau

3.1 Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan ekonomi dalam hal ini melalui pengendalian variable moneter melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter diambil agar terjadi kestabilan harga dan inflasi sehingga mendorong peningkatan output keseimbangan dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Definisi dari kebijakan moneter menurut Bank Indonesia (2017) adalah Kebijakan otoritas moneter atau kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan) dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Dalam arti disini bahwa dimensi stabilitas ekonomi makro adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, penurunan pengangguran dan laju inflasi yang rendah atau stabilitas harga).

Kebijakan moneter adalah salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dimana kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan sector riil. Bersama-sama terintegrasi mendukung dan menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mendukung dalam pencapaian sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Pencapaian sasaran tersebut perlu dilakukan secara maksimal. Dengan adanya kebijakan moneter diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta keseimbangan neraca pembayaran. Banyak negara yang memiliki tujuan utama adalah stabilitas harga terutama di Negara yang sedang berkembang karena negara ini banyak mengalami inflasi. Kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Tingkat jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan untuk menghindari deflasi. Kebijakan moneter mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Kebijakan moneter dapat memiliki satu tujuan akhir atau beberapa tujuan akhir dari kebijakan moneter sekaligus. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter dengan satu tujuan akhir (*single objective*)

Salah satu contoh kebijakan moneter yang memiliki satu tujuan akhir misalnya

- a. Tujuan stabilitas harga, misal negara Maroko memiliki kerangka strategi kebijakan nya adalah *exchange rate anchor*, *money aggregate targeting* (Srilangka) dan *inflation targeting* (Ghana)
- b. Tujuan stabilitas nilai tukar

2. Kebijakan moneter dengan beberapa tujuan akhir (*multiple objectives*)

Salah satu contoh kebijakan moneter yang memiliki beberapa tujuan akhir misalnya

- a. Tujuan stabilitas harga dan nilai tukar, misal negara Liberia memiliki kerangka strategi kebijakan nya

adalah *exchange rate anchor*, *money aggregate targeting* (Afganistan).

- b. Tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, misal negara Cambodia memiliki kerangka strategi kebijakan nya adalah *exchange rate anchor*, *money aggregate targeting* (Guinea) dan *inflation targeting* (India).
- c. Tujuan stabilitas harga, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, misal negara Ethiopia memiliki kerangka strategi kebijakan nya adalah *exchange rate anchor*, *money aggregate targeting* (Bangladesh).

Prinsip – prinsip kebijakan moneter merupakan acuan dalam menentukan kebijakan moneter. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki prioritas pencapaian (*overriding objective*) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter yaitu memiliki sasaran utama dalam hal ini sasaran inflasi
- 2) Memiliki sifat antisipasif (*preemptive* atau *forward looking*)

Kebijakan moneter memiliki efek tunda kebijakan moneter, dimana setiap kebijakan yang diambil akan memiliki dampak pada masa mendatang atau adanya kelambanan dalam kebijakan moneter (Batini and Nelson, 2001).

Ada dua pola kelambanan waktu dari dampak kebijakan moneter terhadap tingkat harga yaitu hump shape dan *strictly decreasing response*

- 3) Memiliki satu rule, namun cukup fleksibel dalam operasionalnya (*constrained discretion*)
- 4) Bersifat Transparan dan akuntabilitas (*good governmance*)

3.2 Penentuan Respon Kebijakan Moneter

Dalam kebijakan moneter, ada penentuan respons kebijakan moneter berdasarkan *rule based policy* dan *disrection based policy*. Dalam *Rule based Policy*, penetapan kebijakan moneter dilakukan dengan merespons kondisi perekonomian yang sedang terjadi sementara *disrection based policy*, penetapan kebijakan moneter didasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung dan menganggap bahwa kebijakan di masa yang telah lewat itu tidak relevan lagi.

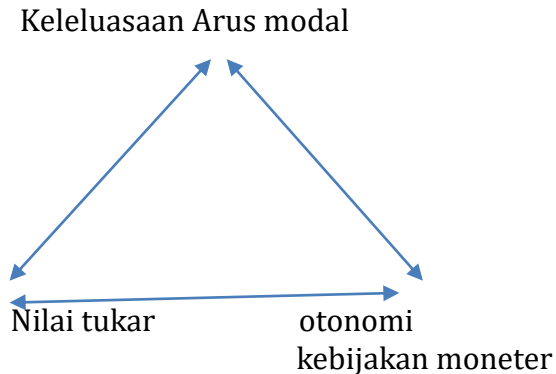
Rule based policy mengacu pada teori McCallum mengenai *money growth rules*, dimana kaidah respon kebijakan berbasis pada pertumbuhan jumlah uang beredar, dimana itu tergantung dari pendapatan nominal, pendapatan nominal potensial dan tingkat *velocity of money*. Sedangkan *interest rate rules* mengacu pada teori Taylor mengenai *money growth rules*, dimana kaidah respon kebijakan berbasis pada penentuan tingkat suku bunga kebijakan, dimana itu tergantung dari inflasi, target inflasi, suku bunga riil kebijakan bmoneter bank sentral, output riil, dan output riil potensial.

3.3 Kebijakan Moneter dan perekonomian Terbuka

Ekonomi negara yang memiliki keterbukaan ekonomi akan memiliki dampak dan konsekuensi yang berbeda dalam kebijakan moneternya dibandingkan dengan negara yang memiliki tekonomi tertutup. Aliran dana dari luar negeri sebagai akibat dari transaksi perdagangan dan keuangan international akan mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Adanya trilemma kebijakan ekonomi yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneternya negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan

antara lain pengelolaan nilai tukar atau keleluasaan arus modal atau otonomi kebijakan moneter.



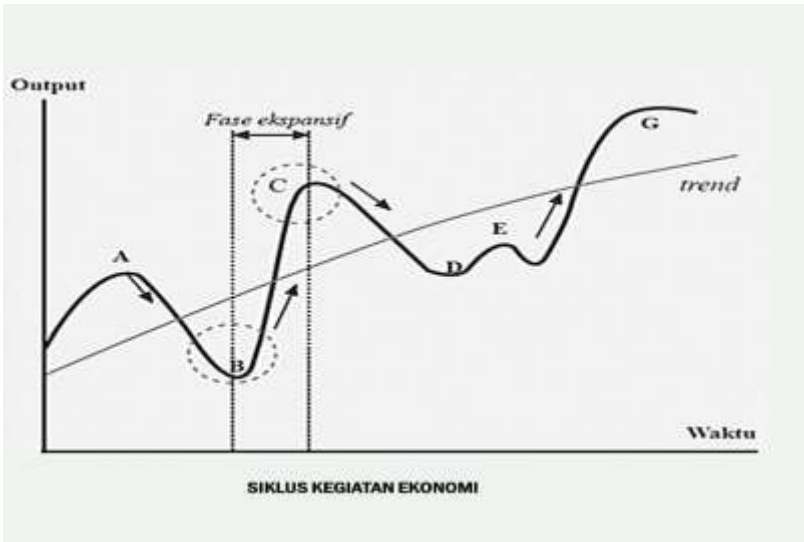
Gambar 3.1. Trilema kebijakan moneter
Sumber : Materi BI, 2020

3.4 Kebijakan Moneter dan Siklus bisnis

Pengaturan jumlah uang yang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar yang ada pada masyarakat. Berkaitan dengan ini, kebijakan moneter ada dua, yaitu :

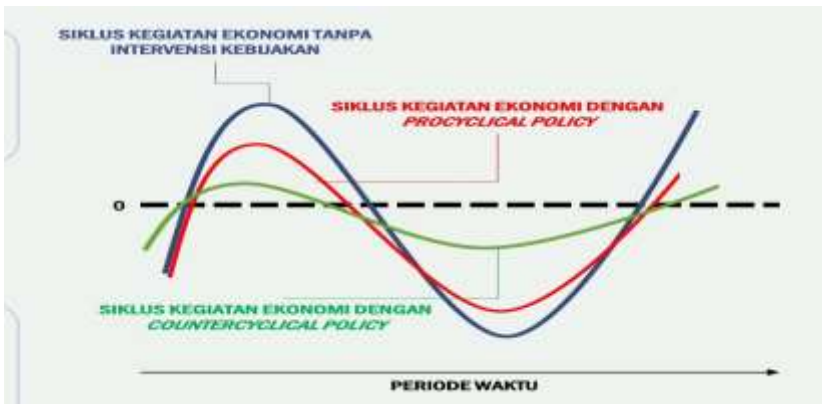
- 1) *Expansionary monetary Policy* (Kebijakan Moneter Ekspansif)
Merupakan suatu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan perekonomian atau untuk tujuan recovery ekonomi dengan cara menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
- 2) *Contractionary monetart Policy* (Kebijakan Moneter Kontraktif) Adalah suatu kebijakan yang diambil untuk menghindari overheating (pemanasan) dalam perekonomian dengan tujuan mengurangi jumlah uang

yang beredar. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat (*tight money policy*).



Gambar 3.2. Grafik Siklus kegiatan Ekonomi
Sumber : Materi BI, 2020

Berdasarkan grafik kurva di atas, kebijakan moneter yang ekspansif contohnya dari poin B ke poin C. Sementara kebijakan moneter yang kontradiktif itu dari poin C ke poin D.



Gambar 3.3. Grafik Siklus kegiatan Ekonomi Dengan periode waktu. Sumber : Materi BI, 2020

Ada beberapa pola arah dalam kebijakan moneter.

1. *Procyclical/accommodative monetary policy*
Siklus ekonomi dengan *procyclical policy* adalah pola penerapan kebijakan moneter yang cenderung mengakomodasi fluktuasi perekonomian.
2. *Countercyclical/accommodative monetary policy*
Sementara Siklus ekonomi dengan *countercyclical policy* bersifat memperlunak kebijakan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim
3. Siklus ekonomi tanpa intervensi kebijakan

3.5 Instrumen dan sasaran operasional Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter dibedakan menjadi dua yaitu konvensional dan Non konvensional.

Instrumen kebijakan moneter yang konvensional adalah :

- a. Operasi pasar terbuka,
Merupakan instrument tidak langsung yang fleksibel dibandingkan dengan instrument lainnya, dilakukan dipasar primer atau sekunder dengan menggunakan instrument pasar uang seperti surat berharga bank sentral, surat berharga pemerintah atau surat berharga pasar uang. Dengan opt, targetnya bisa suku bunganya atau kuantitasnya dan dapat bervariasi jangka waktunya.
- b. Fasilitas diskonto
- c. Dan cadangan wajib minimum

Sebagai contoh, Malaysia menggunakan surat berharga pemerintah dengan tingkat diskonto kurang lebih 3 bulan, dengan cadangan wajib minimum 3%-4%, Argentina menggunakan surat berharga pemerintah dengan tingkat diskonto kurang lebih 30 hari, dengan cadangan wajib minimum 18%-43%, Indonesia menggunakan surat berharga Bank Sentral, Pasar Uang dengan tingkat diskonto overnight, dengan cadangan wajib minimum 5,5%-6,5% (GWM Rupiah), 8% (GWM Rupiah).

Instrumen kebijakan moneter yang non konvensional adalah :

- a. *Liquidity provision*, merupakan upaya kelonggaran fasilitas pinjaman kepada bank sentral oleh bank sentral. Contoh negara yang pernah menggunakan instrument kebijakan ini adalah Negara Inggris.
- b. *Large scale asset purchases*, adalah pembelian surat utang skala besar yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat

suku bunga dari segmen utang tertentu. Contoh negara yang pernah menggunakan instrument kebijakan ini adalah Negara Amerika Serikat.

- c. *Forward guidance*, merupakan upaya pengelolaan ekspektasi dari pelaku pasar terutama mengenai tingkat suku bunga jangka panjang. Contoh negara yang pernah menggunakan instrument kebijakan ini adalah Jepang.

Sasaran Operasional Kebijakan moneter ada dua pendekatan yaitu pendekatan harga dan pendekatan kuantitas. Pendekatan harga di dasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian tingkat harga dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Sasaran operasional dari kebijakan moneter dengan pendekatan harga adalah suku bunga. Sementara pendekatan kuantitas didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian besaran moneter secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Sasaran operasional kebijakan moneter adalah suku bunga dan reserve dan sasaran antara adalah suku bunga dan besaran moneter (M1, M2, dan kredit)

Gambar 3.4. Sasaran Operasional Bank Indonesia



Sumber : Materi BI,2020

3.6 Kerangka strategi Kebijakan Moneter

Adapun kerangka strategi kebijakan moneter adalah :

- a. *Monetary targeting*, merupakan strategi kebijakan yang menetapkan nilai mata uang domestic terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional vatau mata uang negara yang memiliki laju inflasi yang rendah.
- b. *Exchange rate targeting*, strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar
- c. *Inflation targeting*, strategi kebijakan mengenai pengumuman target inflasi untuk mencapai stabilitas harga.
- d. *Implicit target*, strategi kebijakan dengan memperhatikan tujuan akhir kebijakan moneter.

3.7 Kebijakan Moneter dalam perekonomian Indonesia

Kebijakan moneter umumnya lebih rumit diberlakukan di negara berkembang dibandingkan dengan di negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain. Pertama, Dalam penciptaan penawaran uang yang agar pertambahannya selalu selaras dengan jalannya pembangunan, hal ini memerlukan disiplin kuat dalam pemegang otoritas moneter dan juga pihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan peminjaman yang tinggi dari bank Sentral. Dalam hal ini, laju pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat. Kedua, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor ekspor dan impor. Sektor ini sangat mempengaruhi angka inflasi negara karena harga barang ekspor itu tidak stabil, penerimaan ekspor mengalami perubahan yang tidak teratur. Terjadi peningkatan yang tajam

atau penurunan dalam harga menyebabkan pendapatan dari ekspor pun menjadi tidak stabil. yang

Dengan penentuan kebijakan moneter yang lebih berhati-hati berkaitan dengan perdagangan luar negeri, kestabilan jumlah uang beredar akan lebih terjamin dan akan mendukung kebijakan fiskal. Efektifitas kebijakan moneter yang dapat terlihat

Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan moneter yaitu antara lain pertama, Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Kedua, Melakukan pengendalian moneter melalui Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Ketiga, Penetapan tingkat diskonto. Keempat, Penetapan cadangan wajib minimum dan Pengaturan kredit dan pembiayaan.

Beberapa contoh kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia untuk kestabilan perekonomian

1. Melalui Tingkat suku bunga ,

Contoh kebijakan moneter melalui Rapat Dewan Gubernur pada 2 november 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reserve repo Rate (BI7DRR) menjadi sebesar 50 basis poin(bps) menjadi 5,25%. Suku bunga *deposit facility* sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Rasio LTV

Contoh kebijakan moneter yang diambil oleh BI adalah melakukan pelonggaran pada rasio loan to value (LTV) untuk mendorong pertumbuhan kredit di sector property. Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio LTV untuk kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%, untuk semua jenis properti, bagi bank yang memenuhi

kriteria non-performance loan (NPL) tertentu. Ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor. Bank Indonesia melakukan kebijakan melonggarkan ketentuan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor untuk mendorong pertumbuhan kredit di sector ini.

2. Surat Berharga Negara

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah pembelian dan penjualan surat berharga negara (SBN). Penjualan SBN dilakukan untuk tujuan mengurangi likuiditas dan permintaan kredit sehingga mampu menekan inflasi, demikian sebaliknya.

Pembelian SBN yang dilakukan bank Indonesia pada oktober 2022 sebanyak Rp138,08 triliun. Kebijakan ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19.

3. Giro Wajib Minimum (GMW)

Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia juga berkaitan dengan Giro Wajib Minimum. Bank Indonesia menaikkan dan menurunkan GMW. Besarannya didasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan mempengaruhi inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2002. "Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter". Buku Seri Kebanksentralan No. 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2018. Giro Wajib Minimum.. Diakses pada 9 April 2023, <https://www.bi.go.id/id/moneter/gwm/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2018. Kerangka Kebijakan Moneter. Diakses pada 28 April 2023, <https://www.bi.go.id/id/moneter/kerangkakebijakan/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2018. Standing Facilities. Diakses pada 13 April 2023 pukul 20:33 WIB. <https://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/standing-facilities>.
- Bank Indonesia. 2017. Tinjauan Kebijakan Moneter November 2022. Jakarta: Bank. Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. Tinjauan Kebijakan Moneter November 2022. Jakarta: Bank. Indonesia.
- Bank Indonesia. Berbagai Tahun terbitan. Kajian Stabilitas Keuangan. Jakarta : Bank Indonesia.
- Batini and Nelson. 2001."Optimal horizons for inflation targeting". Bank of England. 2000. Threadneedle Street.London EC2R 8AH
- Dornbusch, Rudiger. 2004. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Juoro, Umar. 2013. 'Model kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka untuk Indonesia'. Bulerin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juli (2013):96.
- Kuncoro, O. 2015. Pandangan M. Umer Chapra Tentang Upaya Menekan Inflasi Pada Tingkat Sangat Rendah Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

- Mankiw, N. Gregory. 2019. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga
- Natsir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Satria, Ricky. 2012. 'Makroprudensial dan Mikroprudensial'. Artikel Kajian Stabilitas Keuangan. Maret. 2012. : 85-100
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Warjiyo,P dan Solikin. 2003.'Kebijakan Moneter di Indonesia'. Seri kebankssentralan, No 11. Jakarta: PPSK Bank Indonesia
- Warjiyo, P. 2004. 'Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia'. Seri kebankssentralan, No 11. Jakarta: PPSK Bank Indonesia

BAB 4

KEBIJAKAN FISKAL

Oleh Rizal Syaifudin

4.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan merupakan suatu instrument dari pemerintahan untuk mewujudkan kesuksesan suatu tujuan negara. Diantara banyak kebijakan negara, kebijakan ekonomi adalah salahsatu kebijakan yang sering sekali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat. Kebijakan ekonomi diantaranya meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui pemasukan dan pengeluaran negara untuk menyeimbangkan pertumbuhannya. Kebijakan fiskal juga berperan penting dalam dalam mengatasi persoalan fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan menggunakan instrument kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak, maka negara dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, pelayanan kesehatan serta berbagai jaminan sosial.

4.2 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik dengan menggunakan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki kesamaan tujuan dengan kebijakan moneter yaitu mencapai kestabilan, hanya saja kebijakan fiskal

memiliki instrument yang berbeda dengan kebijakan moneter. Pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Sedangkan pada kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.

Di dalam makroekonomi, pajak (*tax*) diasumsikan sebagai bentuk dari penerimaan pemerintah dan disimbolkan dengan T. Sedangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) disimbolkan dalam dengan G.

4.2.1 Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib masyarakat kepada pemerintah yang sifatnya memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun sifat pajak memaksa, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewajiban langsung untuk membalas jasa kepada wajib pajak. Pemungutan pajak bertujuan untuk menjalankan roda perekonomian.

Pajak juga dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumberdaya dari sektor rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah melalui pemungutan wajib tanpa balas jasa langsung yang diberikan. Jika pemerintah memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak maka pungutan itu dinamakan sebagai retribusi.

4.2.2 Klasifikasi Pajak

Dalam klasifikasinya pajak dibagi menjadi: pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung serta pajak tidak langsung.

1. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaan kepada wajib pajaknya didasarkan pada aktivitas ekonomi

yang dimilikinya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaan kepada wajib pajaknya didasarkan pada kemampuan wajib pajak. Jika pendapatan dari wajib pajak semakin besar, maka kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak semakin besar sehingga besarnya pungutan pajak semakin besar. Akan tetapi jika pendapatan wajib pajak masih dibawah pendapatan tidak kena pajak maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak.

3. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung ditujukan kepada wajib pajak dan tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lainnya. Contoh dari pajak langsung adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

4. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat digeserkan kepada wajib pajak yang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan (PPn). Pajak penjualan sebenarnya adalah pengenaan pajak kepada produsen, akan tetapi pada kenyataannya pengenaan pajak ini dapat ditanggungkan kepada konsumen.

4.2.3 Tarif Pajak

Tarif Pajak dibagi atas pajak nominal dan pajak persentase.

1. Pajak Nominal

Pajak nominal merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan pada sejumlah nilai tertentu dan disimbolkan dengan T (huruf besar).

2. Pajak Persentase

Pajak Persentase merupakan pajak yang pembebanan kepada wajib pajaknya didasarkan pada persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Notasi pajak presentasi adalah t (huruf kecil). Pajak persentase dibagi menjadi pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif.

Pajak proporsional adalah pajak yang tarif persentasenya tetap. Contohnya adalah pajak penghasilan, seberapa pun besar penghasilannya tarif pajaknya adalah 20%. Pajak progresif adalah pajak yang persentase pemungutannya didasarkan pada semakin besar pendapatannya maka semakin pula kewajiban wajib pajaknya. Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang besarnya menurun ketika pendapatannya semakin bertambah tinggi.

4.3 Pajak, Pendapatan dan Konsumsi

Pajak akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi jika pengeluaran investasi dan belanja pemerintah bersifat otonomous.

4.3.1 Pajak Nominal

Pajak nominal pada mulanya akan mempengaruhi pendapatan disposable, sehingga jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T , maka pendapatan disposable:

$$Yd = Y - T$$

Sedangkan fungsi konsumsi menurut Keynes dirumuskan sebagai berikut:

$$C = C_0 + bYd$$

Dengan adanya persamaan pajak nominal, maka fungsi konsumsi menjadi:

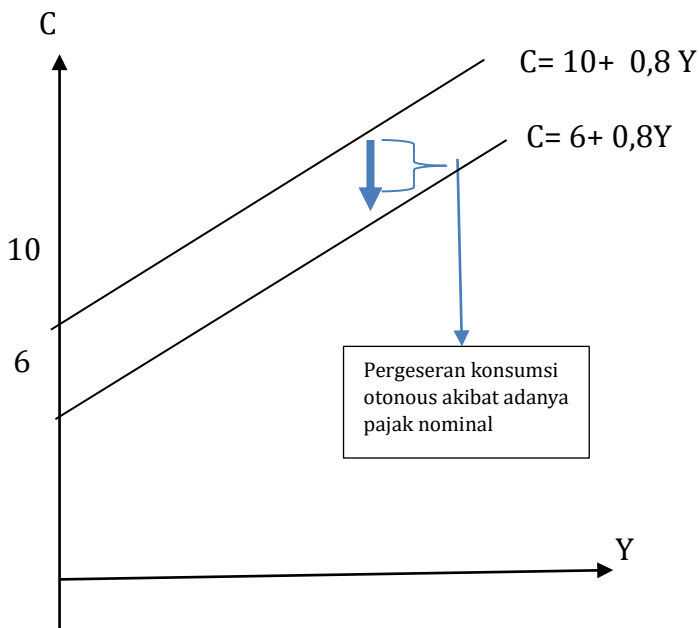
$$\begin{aligned}C &= C_o + bY_d \\C &= C_o + b(Y - T) \\C &= C_o + bY - bT \\C &= C_o - bT + bY\end{aligned}$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa pajak nominal tidak berpengaruh terhadap nilai MPC, sehingga pajak nominal tidak mempengaruhi tingkat konsumsi akibat perubahan pendapatan. Perubahan terletak pada konsumsi otonomusnya yang mana konsumsi otonomus menjadi lebih kecil sebesar bT .

Misalkan diketahui fungsi konsumsi sebesar $C = 10 + 0,8 Y_d$ dan pajak nominal sebesar 5. Maka pengaruh dari pajak nominal tersebut adalah:

$$\begin{aligned}C &= 10 + 0,8(Y - 5) \\C &= 10 + 0,8Y - 4 \\C &= 6 + 0,8Y\end{aligned}$$

Dari persamaan diatas didapatkan kesimpulan bahwa pajak nominal tidak mengubah MPC tetapi menggeser kurva konsumsi ke kanan bawah sebesar 4 unit. Perhatikan gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pengaruh Pajak Nominal terhadap Konsumsi Otonom

4.3.2 Pajak Proporsional

Jika pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak adalah pajak proporsional (t) maka pendapatan disposable menjadi:

$$Yd = Y - tY = Y(1 - t)$$

Sehingga persamaan fungsi konsumsi berubah menjadi:

$$\begin{aligned} C &= C_o + bYd \\ C &= C_o + b\{Y(1 - t)\} \\ C &= C_o + bY - btY \\ C &= C_o + (b - bt)Y \end{aligned}$$

Dari persamaan diatas didapatkan bahwa pajak proporsional menyebabkan MPC menjadi lebih kecil sebesar t, namun konsumsi otonomousnya tetap.

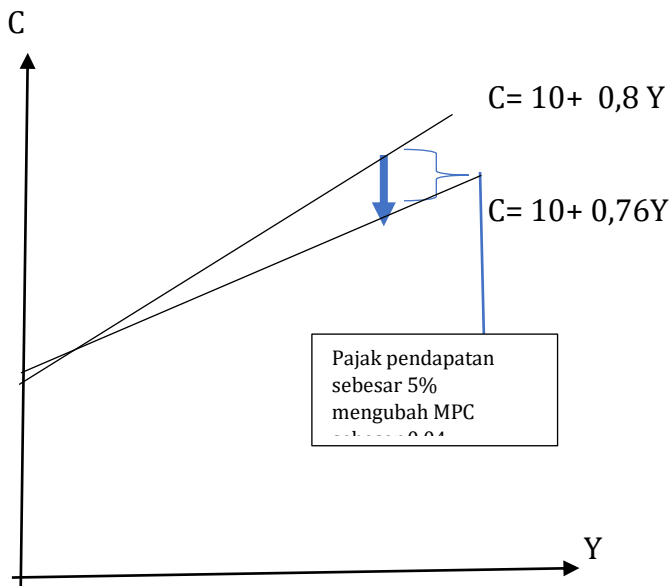
Misalkan diketahui fungsi konsumsi awal $C = 10 + 0,8Yd$, dengan pajak pendapatan sebesar 5% fungsi konsumsi baru menjadi:

$$C = 10 + 0,8(1 - 0,05)Y$$

$$C = 10 + 0,8(0,95)Y$$

$$C = 10 + 0,76Y$$

Fungsi konsumsi baru setelah adanya pajak proporsional menunjukkan perubahan MPC menjadi 0,76 atau lebih kecil 0,04 dari MPC sebelumnya. Perubahan nilai MPC akibat pajak proporsional dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 4.2. Pengaruh Pajak Pendapatan terhadap Konsumsi

4.4 Pajak dan Keseimbangan Ekonomi

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih baik. Pengaruh pajak terhadap terhadap output keseimbangan bisa dijadikan cara untuk melihatnya.

Ketika kondisi negara dengan perekonomian tertutup memiliki fungsi konsumsi sebesar $C = 10 + 0,8Y_d$, investasi otonom sebesar 10, belanja pemerintah sebesar 20 maka didapatkan keseimbangan output sebesar:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ Y &= C_o + bY_d + I + G \\ Y &= 10 + 0,8Y + 10 + 20 \\ 0,2Y &= 40 \\ Y &= 200 \end{aligned}$$

Ketika ada pajak sebesar 5, maka kondisi keseimbangan setelah pajak berubah menjadi:

$$\begin{aligned} Y &= C_o + b[Y - T] + I + G \\ Y &= 10 + 0,8[Y - 5] + 10 + 20 \\ Y &= 40 + 0,8Y - 4 \\ 0,2Y &= 36 \\ Y &= 180 \end{aligned}$$

Ternyata pajak sebesar 5 menyebabkan kondisi keseimbangan mengalami penurunan sebesar 20. Kemudian, ketika pemerintah menurunkan pajak nominalnya sebesar 2, maka untuk menghitung keseimbangan barunya kita membutuhkan angka pengganda pajak. Angka pengganda pajak untuk pajak nominal dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} k_T &= \frac{-b}{1-b} \times \Delta T \\ k_T &= \frac{-MPC}{MPS} \times \Delta T \end{aligned}$$

Sedangkan angka pengganda pajak untuk pajak proporsional dirumuskan sebagai:

$$kT = \frac{-b}{1 - b + bt}$$

Sehingga dengan penurunan pajak nominal sebesar 2 maka keseimbangan baru yang didapatkan sebesar:

$$Y = 180 \times -\frac{0,8}{0,2} \times (-2)$$

$$Y = 180 \times 8$$

$$Y = 1440$$

Dengan demikian setelah adanya penurunan pajak dari pemerintah sebesar 2 akan berdampak pada kenaikan output sebesar 1440.

4.5 Dampak Kebijakan Fiskal

Pandangan Keynesian mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menstabilkan tingkat perekonomian ke arah yang dikehendaki. Pandangan ini tentu saja bertolak belakang dengan pandangan dari ahli ekonomi klasik yang menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja berimbang.

Kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan inflasi ekstrim ataupun deflasi ekstrim. Apabila suatu negara terdapat deflasi ekstrim, maka tingkat kegiatan ekonomi potensinya belum maksimal dan akan berakibat pada terjadinya pengangguran. Dalam keadaan seperti ini pemerintah perlu menaikkan pengeluaran agregatnya yang mana nantinya akan berdampak pada naiknya kegiatan ekonomi dan pengangguran berkurang.

Langkah pemerintah dalam menaikkan pengeluaran agregat adalah dengan menambah pengeluarannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar deflasi ekstrim

dapat dihindari. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi pajak yang dipungutnya. Dampak dari langkah ini adalah anggaran belanja yang defisit, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kebijakan belanja defisit maka pemerintah dapat mengatasi depresiasi dan pengangguran.

Apabila di suatu negara terdapat inflasi ekstrim, yaitu kondisi dimana pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, maka kebijakan anggaran surplus perlu dilakukan. Dalam hal ini pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya. Namun, apabila langkah ini belum dapat menyelesaikan masalah inflasi, maka pemerintah dapat melakukan pengurangan terhadap pengeluaran agregatnya dengan menaikkan pajak. Langkah ini memberikan dampak yaitu berupa perubahan kebijakan anggaran pemerintah. Apabila awalnya pemerintah menggunakan kebijakan anggaran belanja berimbang, adanya pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak akan mengakibatkan anggaran belanja pemerintah menjadi anggaran belanja surplus.

DAFTAR PUSTAKA

- Breemer, J. and Resky, K. 2022. *Kebijakan Fisikal dan Kebijakan Moneter Konsep Dan Aplikasi, Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mankiw, N.G. 2006. *Makroekonomi, Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Prathama, R. and Mandala, M. 2017. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

BAB 5

PASAR VALUTA ASING

Oleh Fadli Ilyas

5.1 Pendahuluan

Pasar valuta asing atau yang sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antarnegara maupun dalam suatu negara. Transaksi sanggup dilakukan oleh suatu badan/ perusahaan atau secara perseorangan dengan banyak sekali tujuan. Dalam setiap kali melaksanakan transaksi valuta asing. Dalam setiap kali melaksanakan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini sanggup berubah ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh banyak sekali faktor menyerupai faktor ekonomi dan politik.

Pasar valuta asing atau valas merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Valuta asing bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Contoh transaksi valuta asing adalah menukarkan uang rupiah dengan dolar Amerika (AS) secara tunai. Penukaran tersebut biasa terjadi ketika melakukan perdagangan internasional, atau saat mengunjungi Amerika Serikat.

Sebagai forum keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak sanggup menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun anutan kerja operasional bagi dirinya biar juga mempunyai kanal ke pasar

valuta asing tanpa harus terlibat pada prosedur perdagangan yang tidak disetujui atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penjualan valuta asing oleh bank devisa dilakukan oleh para dealer-dealer bank yang bersangkutan. Dealer merupakan petugas bank yang melaksanakan transaksi valuta asing dan dalam melaksanakan pekerjaannya dilengkapi dengan banyak sekali alat atau sarana informasi yang canggih. Tempat melaksanakan pekerjaan ini para dealer dikumpulkan dalam suatu ruangan tertentu yang disebut *dealing room*. Ruangan ini tidak sanggup dimasuki oleh sembarang orang, setiap kejadian atau perubahan kurs sanggup dimonitor melalui layar televisi dan alat informasi lainnya, menyerupai jam dinding yang dilengkapi waktu setiap negara.

Disamping sanggup dilakukan antar negara transaksi valas juga sanggup dilakukan antara bank dengan nasabahnya menyerupai transaksi uang kertas asing (*bank notes*), *traveller cheque*, giro valas, transfer luar negeri atau kegiatan mata uang asing lainnya.

5.2 Pengertian Pasar Valuta Asing

Foreign exchange market atau pasar valuta asing adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Juga merupakan merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (*pasangan mata uang/pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

Atau dengan kata lain pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing

biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing, termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang atau valuta asing. Para pihak melayani penjualan dan pembelian valuta asing.

Kegiatan penawaran dan permintaan valas umumnya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan pihak bank. Selain itu, pertukaran valas juga dapat dilakukan melalui tempat penukaran uang asing (money changer).

Beberapa jenis mata uang asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing adalah di antaranya, US Dolar (USD), Euro (EUR), *Chinese Yuan* (CNY), *Canadian Dollar* (CAD), *Singapore Dollar* (SGD), *Pound Sterling* (GBP), *Japanese Yen* (JPY), *Australian Dollar* (AUD).

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui saat bertransaksi di pasar valuta asing, yaitu:

1. Kurs beli, nilai saat pedagang valas membeli dan nasabah menjual.
2. Kurs jual, nilai saat pedagang quoting bank menjual dan calling bank/pelanggan membeli.
3. Spread, yang merupakan selisih antara kurs jual dan beli.

5.3 Sejarah Pasar Valuta Asing

Pada awalnya, pasar valuta asing hanya dimiliki oleh bank-bank besar di seluruh dunia. Pasar ini berawal dari sistem Bretton Woods, sebuah sistem moneter internasional yang dibuat pada tahun 1944. Sistem ini didirikan setelah Perang Dunia II untuk mengatur hubungan keuangan antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam sistem Bretton Woods, dolar AS ditetapkan sebagai mata uang internasional yang digunakan untuk membayar transaksi antara negara-negara.

Namun, pada tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon mengumumkan bahwa AS tidak lagi akan mengikat nilai dolar AS ke emas. Hal ini menyebabkan nilai dolar AS menjadi tidak stabil dan membuat negara-negara di seluruh dunia mulai mencari alternatif untuk mata uang internasional. Inilah saat dimulainya pasar valuta asing modern seperti yang kita kenal sekarang.

5.4 Fungsi Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing adalah tempat yang memiliki fungsi utama untuk melakukan transaksi perdagangan internasional secara resmi. Selain itu, terdapat beberapa fungsi pasar valuta asing lainnya, yaitu :

1. Transfer Daya Beli

Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang berbeda pula. Fungsi kliring internasional yang dilakukan oleh pasar valuta asing sangat berperan penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal.

2. Pemberian Fasilitas Kredit

Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung kepada fasilitas kredit. Eksportir mungkin memperoleh pinjaman sebelum dan setelah melakukan pengiriman.

3. Memperlancar Perdagangan Internasional

Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional, valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan memudahkan proses perdagangan.

4. Mengurangi Risiko Valas

Fungsi terakhir dari pasar valuta asing adalah dapat mengurangi risiko valas karena keberadaannya memungkinkan untuk menghambat kemungkinan perubahan harga atau hedging.

5. Penyediaan Fasilitas Lindung Nilai

Pasar valuta asing menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi nilai tukar.

5.5 Struktur Pasar Valuta Asing

Struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar persaingan sempurna, karena di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli dari suatu produk yang homogen.

Perdagangan mata uang dilakukan 24 jam sehari mengikuti gerak matahari dalam mengelilingi dunia. Perdagangan valuta asing global dibagi menjadi tiga segmen pasar utama, yaitu:

1. Zona Asia-Australia yang terdiri dari Sidney, Tokyo, Hongkong, Singapura, dan Bahrain dengan waktu mulai dari 07.00 sampai 14.00 WIB.
2. Zona Eropa yang terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Brussel, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai 13.00 sampai 23.00 WIB.
3. Zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles dengan waktu mulai 19.30 sampai 04.00 WIB.

Pasar valuta asing dapat dipandang sebagai pasar dua lapis. Lapisan pertama adalah pasar grosir atau antar bank dan lapisan kedua adalah pasar ritel atau klien. Partisipan dalam pasar valuta asing dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu bank internasional, nasabah bank, dealer non bank, pialang valuta asing, dan bank-bank sentral.

5.6 Pelaku Pasar Valuta Asing

Pergerakan nilai di valuta asing seringkali berubah setiap waktu dipengaruhi hukum demand dan supply yang melibatkan berbagai pelaku pasar. Diantara pelaku-pelaku pasar tersebut di antaranya:

1. Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan yang beragam, seperti membayar hutang dan menerima pendapatan dari luar negeri.

2. Perusahaan

Perusahaan selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi dengan mengimpor berbagai sumber daya baru yang lebih terjangkau. Perusahaan juga berupaya untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa dengan melakukan ekspor, sehingga mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Kegiatan ekspor dan impor membuat perusahaan membutuhkan mata uang negara lain dalam jumlah yang cukup besar.

3. Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi valuta asing, yaitu:

- a. Kegiatan spekulasi, dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valas untuk memperoleh keuntungan.

- b. Kebutuhan konsumsi, ketika berada di luar negeri, mereka membutuhkan mata uang negara lain.
- 4. Bank Umum
Bank melakukan transaksi jual beli valas untuk beberapa kebutuhan, seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan mata uang negara lain. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasar valuta asing.
- 5. Bank Sentral
Bank sentral berada di berbagai negara merupakan lembaga independen yang sering melakukan jual beli valas untuk intervensi atau menstabilkan nilai tukar mata uang negaranya.
- 6. Broker
Broker merupakan perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi di pasar valuta asing. Mereka bertugas untuk membantu pihak-pihak yang ingin mencari penjual dan pembeli.

5.7 Jenis Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing adalah media yang terkoneksi secara global dengan pusat-pusat keuangan internasional dan saling terhubung menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga, transaksi pasar valuta asing dapat dilakukan secara online sesuai kebutuhan penjual dan pembelinya.

Terdapat beberapa jenis pasar valuta asing berdasarkan kebutuhan penggunaannya, di antaranya :

- 1. Pasar Spot
Pasar spot adalah tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat, umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama dua hari kerja. Pasar spot menggunakan kurs spot yang sesuai saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta.

2. Pasar Forward

Pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Pasar forward menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan kurs tertentu.

3. Pasar Futures

Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Dalam hal ini, pasar valuta asing adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak futures yang didasarkan atas sekuritas jangka pendek, seperti emas dan valuta asing.

4. Pasar Opsi

Option market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih penggunaan opsi atau tidak. *Currency option contract* adalah tipe kontrak alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Harga valuta asing bagi pemilik opsi yang ingin menggunakan haknya disebut *exercise price* atau *strike price*.

Opsi dapat diperjualbelikan melalui pialang dengan membayar premi atau komisi untuk satu mata uang. Pialang memberikan syarat adanya margin sepanjang periode kontrak yang dapat ditingkatkan bagi nasabah yang opsinya memburuk. Hal ini menjadi perlindungan terhadap potensi kerugian apabila nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban.

Menurut pendapat ahli lainnya, dikutip dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (2009) karangan Andri Soemitra, pasar valuta asing terbagi menjadi dua, yakni konvensional serta syariah.

1. Pasar valuta asing konvensional

Pasar valuta asing (valas) atau sering disebut foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan, baik antarnegara maupun dalam suatu negara. Baca juga: Pasar Valuta Asing: Konsep dan Fungsinya Transaksi ini dapat dilakukan oleh badan, perusahaan, atau perseorangan dengan berbagai tujuan. Pertukaran valas ini mempermudah transaksi keuangan perdagangan internasional, seperti penukaran mata uang, yang bisa dilakukan di pasar valuta asing.

2. Pasar valuta asing syariah

Berdasarkan prinsip syariah, pasar valuta asing bisa diartikan, seperti pertukaran emas dan perak, atau yang dalam fikih dikenal dengan istilah *sharf* sebagaimana yang disepakati para ulama. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya. Misalnya rupiah ke rupiah atau dolar dengan dolar.

Dalam Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 28/DSN MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*). Pada prinsipnya, transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, nilainya harus sama secara tunai

4. Apabila mata uangnya berlainan, penukarannya dilakukan dengan nilai tukar (kurs) secara tunai.

5.8 Mata Uang yang Diperdagangkan pada Valuta Asing

Terdapat berbagai jenis mata uang yang diperdagangkan pada pasar valuta asing. Diantara mata uang yang diperdagangkan paling populer pada pasar valuta asing ialah :

Peringkat	Mata Uang	Kode	Simbol
1	United State Dollar	USD	\$
2	Eurozone Euro	EUR	€
3	Japanese Yen	JPY	¥
4	British Pounsterling	GBP	£
5	Swiss Franc	CHF	-
6	Australian Dollar	AUD	\$

Sumber : Wikipedia

5.9 Risiko Pasar Valuta Asing

Risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, lantaran adanya pergerakan kurs yang merugikan terutama pada ketika dikonversikan dengan mata uang domestik.

Diantara risiko yang dapat ditimbulkan dari pasar valuta asing ialah :

1. Risiko investasi yang berasal dari hot money
Pemerintah Indonesia ketika ini berusaha untuk mengundak masuknya investor yang berasal dari luar negeri untuk melaksanakan investasi didalam negeri. Undangan ini dilakukan dengan cita-cita pada ketika para

investor dari luar negeri menanamkan investasi di dalam negeri maka akan membeli efek bagi pertumbuhan ekonomi serta bisa menampung lapangan pekerjaan atau bisa mengurangi angka pengangguran.

Kondisi yang selalu berusaha membuat kenyamanan biar masuknya investasi abnormal ke dalam negeri bekerjasama harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan kontrol yang dalam. Dengan tujuan menghindari banyak sekali macam permasalahan yang tidak diinginkan kedepannya, menyerupai masuknya dana yang bersifat hot money. Dana yang berasal dari hot money artinya dana tersebut masuk dan memungkinkan secara tiba-tiba bisa ditarik kembali oleh pemiliknya dan ini mempunyai permasalahan lebih jauh yaitu pada jatuhnya nilai tukar mata uang domestik atau rupiah.

2. Risiko utang dalam mata uang asing

Bagi banyak perusahaan dan juga perbankan berusaha untuk mempunyai cadangan mata uang abnormal menyerupai contohnya dollar Amerika biar pada ketika kewajibannya dalam membayar sumbangan dalam mata uang dollar Amerika tersedia sehingga tidak perlu repot harus mencari dollar lagi terutama pada ketika dollar mengalami kelangkaan di pasaran.

Kondisi kebutuhan mata uang dollar yakni dirasa sangat penting remaja ini kalau kita melihat bagaimana begitu banyaknya barang dihargai dengan dollar bahkan beberapa daerah dan honor para tenaga hebat di Indonesia sudah banyak dihargai dengan dollar, yang artinya di Indonesia ini secara fakta berlaku transaksi secara sah di masyarakat mata uang lain selain mata uang rupiah yaitu mata uang dollar Amerika.

5.10 Antisipasi Risiko Pasar Valuta Asing

Dalam situasi kala globalisasi kini ini dimana acara keuangan tidak lagi mengenal batas (borderless) sehingga memungkinkan banyak sekali pihak bisa terlibat dalam kondisi yang menguntungkan dan merugikan. Maka forum keuangan khususnya perbankan yakni pihak yang paling signifikan mendapatkan efek atau dampak risiko dari kondisi ini. Sebenarnya risiko valas ini juga dialami oleh banyak perusahaan multinasional (multinational corporating), lantaran disebabkan keterlibatan mereka yang begitu dalam pada mata uang tersebut.

Ada beberapa cara yang lazim ditempuh oleh suatu perbankan guna menghindari risiko akan ketidakpastian ini, yaitu:

1. *Accounting/Translation Exposure*

Pertama menerapkan accounting/translation exposure, yaitu melaksanakan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk valas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Tujuan penerapan accounting/translation exposure yakni untuk konsolidasi dan pelaporan.

2. *Transaction Exposure*

Kedua menerapkan *transaction exposure*, yaitu melaksanakan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya (*cost*) dalam valas dalam tahun buku yang akan tiba dan selanjutnya melaksanakan analisa pengaruhnya terhadap keuntungan higienis dan potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs valuta asing.

3. *Economic Exposure (Operating/Competitive Exposure)*

Ketiga menerapkan *economic exposure (operating/competitive exposure)*, yaitu melaksanakan research dan analisis secara mendalam terhadap ekspresi dominan kurs valas yang terjadi pada masa yang akan tiba

(*future analyst*), mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang.

5.11 Antisipasi Perusahaan dalam Menghadapi Fluktuatif Valuta Asing

Pemahaman stabilitas keuangan bukan hanya milik negara namun bagi perusahaan juga menjadi materi kajian yang begitu penting untuk dikaji. Semakin besar cadangan (*reserve*) yang dimiliki maka semakin memperlihatkan kenyamanan bagi keuangan suatu perusahaan namun begitu pula sebaliknya, kalau cadangan yang dimiliki yakni kecil maka kondisi fluktuasi (*fluctuative condition*) yang akan dialami oleh perusahaan tersebut yakni sangat rentan. Jika suatu perusahaan keterlibatan bisnisnya yakni lebih banyak bersifat domestik maka tentu memaksimalisasi cadangan bisnisnya yakni lebih banyak terlibat dalam bisnis skala internasional tentu cadangannya dalam bentuk mata uang asing (*foreign currency*). Atau secara sederhana cadangan tersebut sanggup dilihat sebagai hedging atau lindung nilai terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut dengan perubahan dari *currency* (mata uang) suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ali. 1998. *Membaca Saham*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Amir, MS. 2003. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Seri Umum No.2*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Berlianta, Heli Chrisma. 2005. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Catur, Sugiyanto, 1999. *Penyesuaian Nominal dan Penyesuaian Riil Permintaan Uang di Indonesia*, JEI, September 1993.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, dan Richard Startz. 2004. *Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Herlambang, Sugiarto, dan Baskara Said Kelana. 2001. *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro N & Supomo B. 1999. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Juniartha R. Pinem. 2009. *Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Nilai Tukar Rupiah Terhadap Cadangan Devisa Indonesia*. USU Repository
- Joesoef, Jose Rizal. 2008. *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi ketiga.
- Khalwaty T. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Langi, Masinambow, Siwu. 2014. *Analisis Pengaruh Suku Bunga Bi, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2 - Mei -44.

- Madura, Jeff. 2006. *International Corporate Finance. Keuangan Perusahaan Internasional*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N Gregory. 2006. *Principles of Economics; Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi, Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Edisi 8. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Ma, Amir. 1999. *Ekspor-Impor dan Penerapannya*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo.
- Nanang, Martono. 2010. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Internasional*. Buku I. Yogyakarta: BPFE UGM.

BAB 6

EKONOMI SISI PENAWARAN

Oleh Tri Wahyu Rejekiningsih

6.1 Pendahuluan

Dalam ekonomi akan ditinjau kurva penawaran dan kurva permintaan. Ilustrasi dari keseimbangan ekonomi makro yang disederhanakan: permintaan agregat dan penawaran agregat berpotongan untuk menentukan output keseluruhan dan tingkat harga. Dalam pasar ekonomi makro, sebagai output bisa berupa produk domestik bruto, dan tingkat harga adalah harga indeks bisa berupa Indeks Harga Konsumen.

Gagasan yang mendasari ekonomi sisi penawaran adalah bahwa perusahaan menginvestasikan kembali keuntungan, sehingga menghasilkan lebih banyak pekerjaan, produktivitas yang lebih besar, pendapatan pajak yang lebih tinggi, dan sebagainya. Itulah yang mendorong Presiden AS Ronald Reagan, dan para politisi menjual ekonomi sisi penawaran kepada publik. Ekonomi sisi penawaran kadang-kadang disebut Reaganomics, karena Presiden Reagan yang mempopulerkan teori ini.

Namun, tidak semua ekonom setuju dengan teori tersebut. Beberapa pakar dengan menggunakan bukti puluhan tahun, tidak setuju bahwa ketika orang kaya mengelola asetnya dengan baik, penghasilan tambahan yang diperoleh bisa mengalir ke orang lain.

Ekonomi sisi penawaran memiliki sejarah yang penuh warna. Beberapa ekonom melihat sisi penawaran sebagai teori yang berguna. Ekonom lain sangat tidak setuju dengan teori tersebut sehingga menolak, karena tidak menawarkan sesuatu

yang sangat baru atau kontroversial sebagai pandangan terbaru tentang ekonomi klasik.

6.2 Ekonomi Sisi Penawaran

Disebut ekonomi sisi penawaran karena teori ini percaya bahwa produksi ("penawaran" barang dan jasa) adalah komponen ekonomi makro yang paling penting guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Kebalikan dari ekonomi sisi penawaran adalah ekonomi Keynesian, yang percaya bahwa permintaan barang (belanja) adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Keynesian adalah ekonomi sisi permintaan, yang percaya bahwa permintaan dalam ekonomi adalah pendorong utama pertumbuhan. Kenaikan atau penurunan permintaan barang dan jasa berdampak pada berapa banyak penawaran yang dibawa produsen ke dalam perekonomian. Ekonomi Keynesian percaya bahwa jika permintaan konsumen menurun maka merupakan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dan melakukan intervensi dengan stimulus fiskal dan moneter.

Antara ekonomi sisi penawaran dan sisi permintaan memiliki perbedaan. Ekonomi sisi penawaran percaya bahwa produsen punya kemauan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi sisi permintaan percaya bahwa konsumen dengan permintaan terhadap barang dan jasa adalah dapat mendorong ekonomi utama.

6.2.1 Sejarah Ekonomi Sisi Penawaran

Ekonomi sisi penawaran berkembang sebagai respons terhadap stagflasi tahun 1970-an. Kondisi itu menjadi menarik bagi pemikiran ekonomi non-Keynesian, termasuk Sekolah Chicago dan Sekolah Klasik Baru.

Ekonomi sisi penawaran pertama kali disajikan sebagai teori ekonomi oleh Arthur Laffer pada tahun 1970-an. Laffer berpendapat bahwa pemotongan pajak merangsang permintaan, menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dan kekayaan yang beredar dalam perekonomian.

Tidak butuh waktu lama bagi teori Laffer untuk memasuki arus utama. Pada 1980-an, Presiden Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher menjalankan gagasan bahwa uang yang dihemat oleh orang berpenghasilan tinggi dengan membayar lebih sedikit pajak, ini akan dipompa kembali ke ekonomi untuk keuntungan semua orang dengan mengadopsi ekonomi sisi penawaran di negara masing-masing.

Pemotongan pajak untuk orang kaya adalah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan oleh beberapa politisi terkemuka sejak itu, termasuk mantan Presiden AS George W. Bush dan Donald Trump. Baru-baru ini, itu juga merupakan fitur dari tugas singkat Liz Truss sebagai perdana menteri Inggris.

Truss hanya bertahan enam minggu di kantor setelah seruannya yang berani untuk mengenakan pajak kepada orang-orang terkaya di Inggris selama krisis biaya hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menjadi bumerang. Langkah itu membuat takut investor, menghancurkan nilai mata uang lokal dan ditinggalkan, yang membuat Truss terhina, dalam waktu kurang dari sebulan.

Saat ini, hampir tidak ada ekonom yang mempercayai apa yang diyakini Keynesian pada tahun 1970-an dan sebagian besar menerima gagasan dasar ekonomi sisi penawaran. Gagasan ekonomi sisi penawaran bahwa insentif itu penting, tarif pajak yang tinggi tidak baik untuk pertumbuhan, dan inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter. Akibatnya, tidak ada lagi perbedaan yang berarti antara ekonomi sisi penawaran dan ekonomi arus utama.

Sebagaimana ekonomi klasik, ekonomi sisi penawaran mengusulkan bahwa produksi atau penawaran adalah kunci kemakmuran ekonomi dan bahwa konsumsi atau permintaan hanyalah konsekuensi sekunder. Sejak awal, ide ini telah dirangkum dalam Hukum Ekonomi Say, yang menyatakan: *"supply created its own demand"*.

Ekonomi sisi penawaran semakin populer di kalangan politisi Partai Republik sejak tahun 1977 dan seterusnya. Sebelum tahun 1977, Partai Republik lebih terpecah dalam pengurangan pajak, dengan beberapa kekhawatiran bahwa pemotongan pajak akan memicu inflasi dan memperburuk defisit.

Pada tahun 1978, Jude Wanniski menerbitkan *The Way the World Works* adalah tesis utama ekonomi sisi penawaran dan merinci kegagalan sistem pajak pendapatan progresif tarif pajak tinggi dan kebijakan moneter Amerika Serikat di bawah Richard Nixon dan Jimmy Carter di tahun 1970-an. Wanniski menganjurkan tarif pajak yang lebih rendah dan kembali ke semacam standar emas, mirip dengan Sistem Bretton Woods 1944–1971 yang ditinggalkan Nixon.

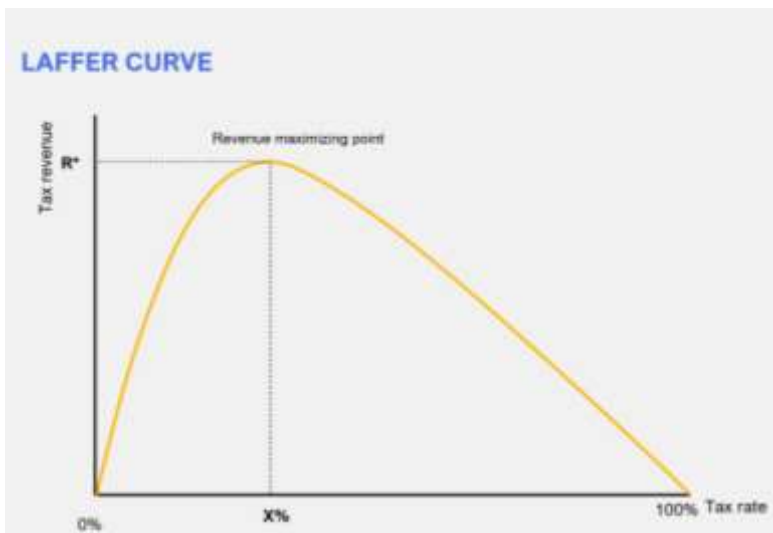
James D. Gwartney dan Richard L. Stroup memberikan definisi ekonomi sisi penawaran sebagai keyakinan bahwa penyesuaian tarif pajak marjinal memiliki efek yang signifikan terhadap total penawaran. Gwartney dan Stroup mengatakan "bahwa argumen sisi penawaran memberikan landasan bagi kebijakan pajak Reagan, yang menyebabkan penurunan secara signifikan dalam tarif pajak marjinal di Amerika Serikat selama tahun 1980-an".

Barry P. Bosworth telah memberikan definisi lain dengan menyajikan ekonomi sisi penawaran dari dua perspektif:

1. Kepentingan dari faktor-faktor penentu penawaran agregat, yaitu: volume dan kualitas input modal dan tenaga kerja serta efisiensi dalam penggunaan.
2. Pengurangan pajak sebagai sarana untuk meningkatkan pasokan tabungan, investasi, dan tenaga kerja.

6.2.2 Platform Ekonomi Sisi Penawaran

Arthur Laffer menemukan bahwa kondisi pada tahap awal pembangunan ekonomi akan mengalami suatu pendakian yang cepat, sebagai mana tergambarkan pada kurva Laffer. Periode awal pada kurva Laffer disebut perpajakan, sehingga tarif pajak menjadi titik pertimbangan yang terkenal. Apabila ditanyakan, di mana perpajakan? Bahwa tarif pajak tidak ada secara eksplisit, namun bergerak menuju pusat ekonomi yaitu pertumbuhan domestik.



Kurva Laffer menunjukkan hubungan antara tarif pajak dengan tingkat pendapatan pemerintah. Para pendukung kurva

Laffer mengklaim bahwa kurva ini menggambarkan konsep dari elastisitas penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak berubah sesuai dengan perubahan tarif pajak.

Pada titik ekstrim kurva laffer, yakni tarif pajak 0% dan 100%, pemerintah tidak membukukan pendapatan. Pada tarif 0% berarti pemerintah tidak menetapkan tarif pajak. Sedangkan tarif 100% artinya bisnis dan rumah tangga membayarkan semua keuntungan dan pendapatan sebagai pajak.

Di antara dua titik ekstrim pada kurva laffer, ada tarif pajak yang optimal. Di tarif optimal, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan pajak secara maksimal. Ketika tarif pajak lebih rendah yaitu antara 0% - x%, pengumpulan pajak kurang optimal, sehingga pemerintah memiliki peluang untuk menaikkan tarif dan mengumpulkan lebih banyak pendapatan. Pada rentang tarif pajak antara 0% - x%, sektor swasta relatif tidak terbebani dengan besaran tarif pajak.

Sebaliknya, ketika tarif pajak lebih tinggi yaitu antara x% -100%, tarif pajak terlalu membebani wajib pajak. Beban pajak ini dapat mendisinsentif bisnis dan rumah tangga dalam mengumpulkan uang. Oleh karena itu, pemerintah harus menurunkan tarif pajak untuk memaksimalkan pendapatan. Salah satu implikasi dari kurva Laffer adalah bahwa peningkatan tarif pajak yang melampaui titik tertentu akan menjadi kontra-produktif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pendukung Laffer seperti Robert Mundell memperlakukan tarif pajak secara teratur dalam ekonomi. Makalah-makalah dari Mundell yang menginspirasi sehingga meraih Nobel tentang campuran kebijakan fiskal-moneter dari tahun 1961-64 secara eksplisit dianggap perubahan pajak agregat. Kepada Kongres pada tahun 1966, Mundell mengatakan bahwa menurut modelnya, Amerika Serikat harus

meningkatkan pajak. Beda dengan ketika Jerome Stein melihat ada gangguan pada pergerakan modal jangka pendek sebagai akibat perilaku spekulatif sehingga akan mengoyahkan sistem pertukaran. Laffer menanggapi dengan memusnahkan motif spekulasi sebagai variabel penjelas dari perdagangan modal.

Ekonomi sisi penawaran telah diasosiasikan dengan obsesi untuk memotong pajak dalam keadaan apa pun. Para pendukung sisi penawaran bahkan tidak lagi membatasi hanya pada pemotongan tarif pajak marjinal saja, tetapi juga pada pemotongan pajak yang paling menarik perhatian dan meragukan secara ekonomi dengan intensitas yang sama. Oleh karena itu, saat ini menjadi hal yang umum ketika mendengar klaim pemotongan pajak yang tidak masuk akal.

Pendukung kebijakan ekonomi sisi penawaran saat ini mengklaim bahwa tarif pajak yang lebih rendah menghasilkan manfaat ekonomi makro. Kaum liberal klasik menentang perpajakan karena klasik menentang pemerintah secara umum. Klaim klasik adalah bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri dan propertinya dan oleh karena itu perpajakan tidak bermoral dan dasar hukumnya dipertanyakan. Di sisi lain, ekonom sisi penawaran berpendapat bahwa manfaat kolektif yang diharapkan, yaitu peningkatan output ekonomi dan efisiensi, akan memberikan dorongan utama untuk pemotongan pajak.

Dibawah sistem nilai tukar tetap, pertumbuhan domestik menjadi penentu utama keseimbangan internasional. Penyebab pertumbuhan domestik ini menjadi topik hangat di bidang ekonomi. Teori pertumbuhan dielaborasi oleh Robert Solow pada akhir 1950 -an, dengan model yang berpendapat mengenai "residual" yang berasal dari faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan perbaikan kelembagaan.

Presiden Kennedy telah membuat pertumbuhan ekonomi Amerika mencapai 5 persen, dalam kampanye 1960

sebagai tujuan pemerintahannya. Kebijakan apa yang memungkinkan mencapai pertumbuhan ekonomi, Kennedy akhirnya memilih pemotongan tarif pajak dan penyederhanaan pajak sebagai pusat kebijakan ekonomi (pemotongan pajak Februari 1964), yang telah melewati Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September 1963 dan sedang dipertimbangkan di Senat Komite pada saat pembunuhan pada bulan November.

Pada umumnya para akademisi dan kebijakan publik lebih menyukai mencari cara lain selain pemotongan tarif pajak. Ini termasuk perbaikan kelembagaan, pendidikan dan infrastruktur, dan mendevaluasi mata uang untuk memacu ekspor. Laffer dan Mundell secara alami menolak keras setiap saran devaluasi, dengan menggunakan jargon ekonomi, "endogen." Ada beberapa rahasia pertumbuhan domestik yang harus dieksplorasi supaya ekonomi internasional dan mata uang akan maju.

Tahun 1959, Triffin telah mencatat bahwa kontribusi utama untuk defisit neraca-pembayaran Amerika, yaitu mengharuskan arus keluar emas besar (ada di akun modal). Jadi ekspor modal Amerika bersama bantuan asing pemerintah, mengerdilkan defisit perdagangan, ini baru terjadi pada tahun 1959 setelah bertahun-tahun surplus. Menurut Laffer dan Mundell, ekonomi di negara sedang berkembang, ada solusi mudah untuk masalah ini. Pertumbuhan domestik relatif terhadap dunia, khususnya dalam model "anti-tradisional", menyebabkan aliran masuk modal yang substansial dan akan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi oleh Triffin. Sementara itu, Mundell (1960) telah menulis tentang masalah bantuan asing, artikel ini yang memperlakukan "masalah transfer" mengetahui bagaimana transfer antar pemerintah mendistorsi ketentuan perdagangan dan menjatuhkan sistem pembayaran. Artikel panjang itu juga menghibur masalah negara kecil yang berspesialisasi dalam produksi saja dan

mengalami peningkatan produktivitas. Mundell mengakui bahwa dalam hal ini, pertumbuhan mungkin mendorong negara untuk ekspor ke pasar dunia. Laffer menolak kasus Triffin, dan menawarkan bahwa negara besar yang tidak berspesialisasi yang akan menumbuhkan penciptaan moneter global secara besar-besaran untuk menyerap tenaga kerja yang sangat bermanfaat bagi orang untuk menjadi kaya.

Kebijakan pajak menurut sisi penawaran berpendapat bahwa tarif pajak marjinal yang lebih rendah. Pajak penghasilan marjinal yang lebih rendah, dipercaya bahwa tarif yang lebih rendah akan mendorong pekerja untuk lebih memilih bekerja daripada bersantai. Oleh karena itu, tiga pilar sisi penawaran mengikuti dari premis ini, yaitu:

1. Tarif pajak capital-gain yang lebih rendah. Tarif yang lebih rendah mendorong investor untuk menyebarkan modal produktif. Pada tingkat tertentu, pihak pemasok bahkan akan berargumen bahwa pemerintah tidak akan kehilangan total pendapatan pajak karena tingkat yang lebih rendah akan lebih diimbangi oleh basis pendapatan pajak yang lebih tinggi, karena lapangan kerja dan produktivitas yang lebih besar.
2. Kebijakan regulasi. Ada kecenderungan bersekutu dengan konservatif politik tradisional, yaitu lebih menyukai pemerintahan yang lebih kecil dan intervensi yang lebih sedikit di pasar bebas. Sisi penawaran mengakui bahwa bantuan pemerintah dengan melakukan pembelian, tetapi tidak menganggap permintaan yang dipicu ini dapat menyelamatkan resesi atau berdampak berkelanjutan pada pertumbuhan.
3. Kebijakan moneter yang kontroversial. Ketika bank sentral akan mengendalikan tingkat likuiditas, maka bank sentral dengan kebijakan moneter dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar.

Keynesian cenderung berpikir bahwa kebijakan moneter menjadi alat yang penting untuk mengendalikan ekonomi dan menangani siklus bisnis, sedangkan sisi penawaran tidak berpikir bahwa kebijakan moneter dapat menciptakan nilai ekonomi. Pemikiran sisi penawaran bahwa bank sentral akan menimbulkan masalah dengan kebijakan moneter jika:

1. Kebijakan moneter ekspansif dengan mengeluarkan jumlah uang beredar yang terlalu banyak, sehingga akan memicu inflasi.
2. Kebijakan moneter yang bersifat ketat, tidak akan mampu mendorong perdagangan.

Bahkan sisi penawaran khawatir bahwa bank sentral mungkin secara tidak sengaja menghambat pertumbuhan.

Berdasarkan ketiga pilar di atas, terlihat bagaimana sisi penawaran tidak dapat dipisahkan dari ranah politik karena berimplikasi pada berkurangnya peran pemerintah dan kebijakan perpajakan yang kurang progresif.

6.2.3 Celah Ekonomi Sisi Penawaran

Dalam ekonom seperti sisi penawaran, untuk setiap ahli yang bersumpah bahwa pendekatan ekonomi ini berhasil, yang lain dengan keras membantah. Seperti teori yang lain, ekonomi sisi penawaran tidak sempurna dan memiliki beberapa lubang. Ada enam alasan utama mengapa teori ekonomi sisi penawaran dibantah.

1. Pemotongan Pajak Tidak Menciptakan Lebih Banyak Pekerjaan.

Jika perusahaan dikenakan pajak lebih sedikit, maka perusahaan akan menggunakan kelebihan tabungan untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan/staf, menurut kata pihak pemasok. Masalahnya adalah tidak ada banyak bukti yang mendukung. Dari tahun 1982 hingga 1989, ketika

Amerika Serikat diperintah oleh Reagan dan pajak dipotong secara substansial, angkatan kerja tidak bertambah lagi dari sebelumnya. Hal serupa terjadi di bawah pengawasan George W. Bush. Pada tahun 2001 dan 2003, Kongres meloloskan dua pemotongan pajak yang murah hati untuk orang kaya, dan diikuti oleh pertumbuhan pekerjaan paling lambat dalam setengah abad.

2. Kebijakan Sisi Penawaran Melemahkan Investasi

Data yang mendukung opini populer bahwa pajak yang lebih rendah pada orang kaya memacu lebih banyak investasi juga sulit didapat. Faktanya, Center for American Progress, mengutip angka dari U.S. Bureau of Economic Analysis, mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan dalam investasi nonresidensial adalah tetap secara signifikan lebih tinggi pada sisi non-penawaran tahun 1990-an dibandingkan pada dekade Reagan dan Bush. Ironisnya, pada tahun 1990-an, tarif pajak bagi orang yang berpenghasilan lebih tinggi dinaikkan.

3. Ekonomi Sisi Penawaran Tidak Sama dengan Pertumbuhan Produktivitas.

Hal lain yang sering dibicarakan oleh pendukung sisi penawaran adalah pertumbuhan produktivitas. Dalam sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 2017, ekonom Republik John Cogan, Glenn Hubbard, John Taylor, dan Kevin Warsh mengklaim bahwa pertumbuhan produktivitas “meningkat secara nyata” selama tahun 1980-an dan 1990-an setelah pajak dipotong dan regulasi dihapuskan. Ekonom lain, termasuk Brad DeLong dari University of California-Berkeley dan Nouriel Roubini dari New York University Stern School of Business, dengan cepat membuktikan bahwa pernyataan ini tidak didasarkan pada data faktual dan bahwa pertumbuhan produktivitas sebenarnya telah menurun sejak Perang Dunia II. Menurut Roubini, tingkat

pertumbuhan produktivitas tahunan berkisar sekitar 1,1% dari tahun 1973 hingga 1997 dan tidak berubah arah selama tahun 1980-an.

4. Pemotongan Pajak Tidak Memacu Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat.

Semua hal di atas berfungsi sebagai pengingat bahwa ekonomi sisi penawaran tidak selalu mencapai apa yang dikatakan para pendukungnya dan sama sekali bukan jaminan untuk pertumbuhan ekonomi. Seringkali, sisi penawaran menunjuk tahun 1980-an sebagai bukti bahwa kebijakan ini merekayasa perputaran ekonomi. Namun, seperti yang ditunjukkan Roubini, peningkatan pertumbuhan yang ditunjukkan dari tahun 1983 hingga 1989 terjadi setelah resesi yang parah dan tidak ada yang luar biasa. Lebih banyak bukti bahwa kebijakan sisi penawaran tradisional tidak mengangkat perekonomian yang ditemukan di Kansas. Pada tahun 2012 dan 2013, pembuat undang-undang di sana memangkas tarif tertinggi pajak penghasilan negara bagian hampir 30% dan tarif pajak atas keuntungan bisnis tertentu menjadi nol dalam upaya putus asa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Eksperimen itu berlangsung sekitar lima tahun dan tidak berjalan dengan baik, dengan ekonomi Kansas berkinerja buruk di sebagian besar negara bagian tetangga dan negara bagian lainnya selama periode itu.

5. Pemotongan Pajak Tidak Membayar Sendiri

Titik penjualan utama ekonomi sisi penawaran adalah bahwa pemotongan pajak benar-benar meningkatkan pendapatan pajak secara keseluruhan dengan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan penduduk dan, oleh karena itu, tidak membuat negara lebih banyak berutang. Pandangan ini telah mendapatkan mata uang politik tetapi tidak didukung oleh banyak bukti nyata.

6. Kebijakan tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Sehingga kebijakan sisi penawaran tidak selalu mengarah pada peningkatan permintaan barang dan jasa.

Kerugian yang paling jelas dari kebijakan pemotongan pajak adalah waktu yang diperlukan untuk kebijakan ini bekerja. Fakta bahwa penerapan kebijakan bisa sangat mahal, dan reaksi balik yang diterima dari para pemikir sayap kiri (yang tidak sepaham dengan ekonomi sisi penawaran). Kebijakan pemotongan pajak bagi orang kaya, ini memberitahu penduduk bahwa membantu orang kaya akan menguntungkan semua orang adalah penawaran yang sulit, terutama karena tidak ada bukti nyata yang mendukung hal ini.

Manfaat ekonomi dari deregulasi juga tidak sejelas yang ditawarkan oleh pendukung sisi penawaran. Meskipun benar bahwa beberapa peraturan mungkin tidak diperlukan dan memberatkan, sebagian besar merupakan standar penting yang mendukung ekonomi dan melindungi konsumen.

Fakta menunjukkan bahwa defisit anggaran meledak selama era pemotongan pajak Reagan. Menurut New York University Stern School of Business, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 50,6% pada tahun 1992 dari 26,1% pada tahun 1979. Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) juga menolak pembicaraan tentang pemotongan pajak yang membayar untuk diri mereka sendiri. Berdasarkan perkiraannya, untuk setiap dolar pemotongan pajak penghasilan, hanya 17 sen yang akan diperoleh kembali dari pengeluaran yang lebih besar.

Selain ada celah dalam ekonomi sisi penawaran, meskipun keberhasilannya sulit diukur. Beberapa orang memuji orang-orang seperti Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang dianggap telah menyelamatkan ekonomi pada

1980-an. Sedangkan yang lain percaya bahwa kebijakan sisi penawaran dari kedua tokoh tersebut justru menghancurkan segalanya dan mendorong ketidaksetaraan.

Ekonomi sisi penawaran, yang berpendapat bahwa setiap orang akan makmur ketika perusahaan memiliki lebih banyak uang, telah mengubah cara sebagian besar ekonomi utama dunia beroperasi. Pendukung kebijakan ekonomi sisi penawaran berpendapat bahwa dengan menargetkan variabel ekonomi yang meningkatkan produksi, efek tetesan ke bawah terjadi ketika perusahaan memproduksi lebih banyak dan berkembang, perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan meningkatkan upah. Masalahnya, tidak semua ekonom setuju dengan teori *trickle down*.

Bukti berlimpah telah disajikan untuk mendukung pandangan bahwa ekonomi sisi penawaran tidak memberikan seperti yang diiklankan. Menurut temuan tersebut, model ekonomi ini tidak menciptakan lebih banyak pekerjaan dan mengangkat ekonomi atau menghasilkan pendapatan pajak keseluruhan yang serupa.

6.2.4 Memahami Teori Ekonomi Sisi Penawaran

Teori ekonomi sisi penawaran, atau ekonomi sisi penawaran, adalah konsep ekonomi makro yang berpendapat bahwa peningkatan pasokan barang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini ekonom sisi penawaran berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan produksi melalui pemotongan pajak dan pengurangan regulasi.

Sebuah kebijakan fiskal dari teori sisi penawaran telah diterapkan oleh beberapa presiden AS dalam upaya untuk merangsang perekonomian dengan menargetkan faktor-faktor yang meningkatkan output dan memasok lebih banyak barang dan jasa. Meskipun kritikus berpendapat bahwa ekonomi sisi penawaran pada dasarnya lemah, karena dengan hanya

mengandalkan pasokan saja tidak dapat menciptakan permintaan. Bukti empiris telah menunjukkan kegagalan dalam praktik sebagai kebijakan. Namun, teori sisi penawaran tetap menjadi alat dalam lingkaran pembuatan kebijakan, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya.

Ekonomi sisi penawaran bertujuan untuk memperkuat ekonomi dengan menerapkan kebijakan yang akan mengarah pada peningkatan pasokan barang dan jasa dan pertumbuhan ekonomi seperti:

1. Penurunan tarif pajak penghasilan badan usaha sehingga memberi peluang perusahaan lebih banyak uang untuk diinvestasikan kembali.
2. Penurunan tingkat pinjaman modal sehingga dapat memberi insentif kepada bisnis untuk merencanakan proyek baru dan berinvestasi dalam aset modal seperti bangunan dan peralatan manufaktur.
3. Melonggarkan peraturan bisnis dengan cara pemerintah menghilangkan waktu pemrosesan yang panjang dan persyaratan pelaporan yang tidak perlu yang seringkali menghambat produksi.

Secara komprehensif, ketiga variabel telah ditemukan memberikan peningkatan insentif untuk ekspansi, tingkat produksi yang lebih tinggi, dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam beberapa kasus, ekonomi sisi penawaran dapat menjadi bagian dari rencana global untuk meningkatkan pasokan dalam negeri dan membuat produk dalam negeri lebih disukai daripada produk luar negeri.

6.2.5 Ekonomi Sisi Penawaran dan Sisi Permintaan

Teori ekonomi sisi penawaran dan teori sisi permintaan adalah dua pendekatan yang berbeda untuk menstimulus ekonomi. Ekonomi sisi penawaran sebagai alternatif dari

ekonomi Keynesian. Ekonomi sisi permintaan bergantung pada pandangan ekonomi harga tetap, di mana permintaan memainkan peran kunci dalam menentukan pertumbuhan pasokan di masa depan, yang juga memungkinkan implikasi insentif investasi.

Pendekatan kebijakan Keynesian berfokus pada manajemen permintaan sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi produksi agregat dan GNP, sedangkan Monetarisme berfokus pada manajemen agregat moneter dan kredit. Tidak seperti ekonomi sisi penawaran, ekonomi sisi permintaan didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan GNP dihasilkan dari peningkatan pengeluaran.

Teori ekonomi sisi penawaran dipakai oleh pemerintahan Reagan tahun 1980-an. Reagan mengklaim bahwa kebijakan fiskal dapat menyebabkan perubahan penawaran serta permintaan. Jadi, ketika tarif pajak marjinal tinggi, konsumen mengejar waktu luang tambahan dan konsumsi saat ini daripada mengejar pendapatan saat ini dan pendapatan tambahan di masa depan. Oleh karena itu, terjadi penurunan usaha kerja dan investasi, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan produksi dan GNP terlepas dari tingkat permintaan total. Berdasarkan asumsi tersebut, ekonom sisi penawaran merumuskan gagasan bahwa pemotongan tarif pajak marjinal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Teori sisi permintaan dikembangkan pada tahun 1930-an oleh John Maynard Keynes, yang dikenal sebagai teori Keynesian. Keynes berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang melalui permintaan, sehingga teori ini berupaya memberdayakan pembeli melalui:

1. Peningkatkan pengeluaran pemerintah dalam program publik, seperti tunjangan atau subsidi pengangguran yang lebih tinggi, atau membangun proyek infrastruktur untuk

- menciptakan lapangan kerja dan mendorong permintaan konsumen serta mendorong belanja konsumen.
2. Peningkatkan jumlah uang beredar dengan cara bank sentral membeli atau menjual sekuritas pemerintah dan memperluas jumlah uang beredar. Dengan jumlah uang beredar yang meningkat akan mendorong tingkat bunga menjadi lebih rendah, sehingga insentif bagi konsumen dan bisnis untuk membeli barang atau berinvestasi meningkat.

Teori ekonomi sisi penawaran dan sisi permintaan berfokus pada bagaimana permintaan agregat mempengaruhi hasil ekonomi. Ekonomi Keynesian sangat bergantung pada intervensi pemerintah (seperti kebijakan fiskal atau kebijakan moneter), sementara teori sisi penawaran lebih menekankan kekuatan pasar. Sedangkan ekonomi klasik berfokus terutama pada apa yang dapat diproduksi individu (dan apa yang dapat dijual). Teori sisi penawaran juga memperhitungkan apa yang dapat diproduksi oleh bisnis (dan apa yang dapat dijual).

Pada akhirnya, teori sisi penawaran dapat dikatakan memiliki penekanan yang lebih besar pada dinamika pasar daripada teori Keynesian. Oleh karena itu, beberapa ekonom berpendapat bahwa teori ekonomi sisi penawaran memiliki lebih banyak kesamaan dengan ekonomi Keynesian daripada dengan ekonomi klasik.

Secara keseluruhan, berbagai studi mendukung kebijakan fiskal sisi penawaran dan sisi permintaan. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa berbagai variabel ekonomi, lingkungan, dan faktor, sulit untuk menentukan efek dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan untuk menentukan hasil yang tepat dari satu teori atau serangkaian kebijakan.

6.2.6 Implikasi Kebijakan Ekonomi Sisi Penawaran

Secara prinsip kebijakan dari teori ekonomi sisi penawaran dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk:

1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengalami tekanan inflasi yang berlebihan.
2. Mengurangi tingkat utang pemerintah dari waktu ke waktu, karena peningkatan pendapatan dari pajak yang dikenakan lebih tinggi kepada penerima pendapatan tinggi dan keuntungan modal yang dihasilkan dari apresiasi aset.
3. Keberhasilan dalam hal peningkatan produksi, tetapi ini tidak selalu diterjemahkan sebagai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi untuk semua.
4. Deregulasi justru akan dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan pada saat krisis.
5. Pemotongan pajak sebagai mekanisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dari waktu ke waktu.
6. Tarif pajak marjinal berperan penting dalam menentukan perkembangan ekonomi. Peran penting dalam menentukan berapa banyak waktu yang akan dihabiskan untuk bekerja dan bersantai atau berapa banyak pendapatan yang akan dihabiskan untuk konsumsi dan tabungan. Ekonom sisi penawaran bersikeras menurunkan tarif pajak agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi teori ekonomi sisi penawaran adalah teori ekonomi makro yang menekankan pentingnya peningkatan produksi melalui pemotongan pajak perusahaan, deregulasi, dan tingkat pinjaman modal yang rendah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Domitrovic, Brian. 2021. *The Emergence of Arthur Laffer, The Foundations of Supply-Side Economics in Chicago and Washington, 1966–1976*. Palgrave McMillan.
- Setterfield, Mark. 2003. The Economics of Demand-Led Growth: Challenging the Supply-Side Vision of the Long Run. *The Economic Journal*. Nov., 2003, Vol. 113, No. 491. pp. F674-F676

BAB 7

PASAR MODAL

Oleh Roy Budiharjo

7.1 Pendahuluan

Pasar modal merupakan sarana keuangan bagi perusahaan dan negara serta sarana investasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memungkinkan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Anda yang awam masih belum bisa membedakan antara pasar modal dan pasar uang. Pasar uang mengacu pada surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal.

Ada juga orang yang menyamakan pasar modal dengan pasar komoditas/mata uang yang ditawarkan oleh pialang berjangka. Produk tersebut bukan produk pasar modal, melainkan derivatif. Derivatif ditandai dengan penggunaan hutang besar dalam waktu singkat untuk menghasilkan keuntungan besar, serta risiko.

Dalam prosesnya, saat berinvestasi di derivatif, beberapa instrumen dijadikan acuan, seperti nilai tukar (forex), indeks saham, atau harga komoditas. Grafik harga juga sering digunakan untuk menjelaskan derivatif, seperti dalam investasi pasar modal, yang sering disalahartikan. Derivatif adalah untuk pemain dengan pemahaman risiko yang mendalam dan profil yang sangat spekulatif. Biasanya cukup bagi investor untuk berinvestasi pada produk pasar modal tradisional, yaitu. saham, obligasi dan reksa dana.

Pasar modal memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian negara, karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan pengaturan yang mempertemukan dua pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten).

Dengan adanya pasar modal, pemilik dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan mendapatkan imbalan, sedangkan emiten dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa harus menunggu dana dari operasional perusahaan. Dengan adanya pasar modal, kegiatan ekonomi diharapkan dapat meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam skala yang lebih besar dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan dan kekayaan secara umum.

Keberadaan bursa efek nasional di Indonesia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi negara, dan banyak perusahaan telah menggunakan lembaga ini untuk menarik investasi dan memperkuat posisi keuangan mereka. Nyatanya, pasar komoditas telah menjadi "pusat saraf keuangan" ekonomi modern. Akibatnya, ekonomi modern tidak dapat berfungsi tanpa pasar komoditas yang dinamis, terorganisir dengan baik, dan saling terhubung secara global. Selain itu, nilai tukar modal dianggap sebagai salah satu indikator terbaik kesehatan ekonomi suatu negara. Emerging Markets Pasar modal Indonesia merupakan pasar yang memiliki hubungan kuat dengan pasar instrumen keuangan global dan domestik.

Perubahan ekonomi makro tidak secara signifikan mempengaruhi operasi internal organisasi, bahkan jika diterapkan dengan bijaksana dan dalam jangka panjang. Harga saham juga naik akibat perubahan faktor ekonomi makro yang

disebutkan sebelumnya, karena investor bereaksi lebih cepat. Begitu situasi ekonomi makro berubah, investor menilai efek positif atau negatifnya terhadap kinerja perusahaan di tahun-tahun mendatang. Mereka kemudian membuat rencana untuk membeli, menjual, atau menahan sekuritas berisiko. Oleh karena itu, nilai dolar menyesuaikan perubahan variabel ekonomi makro lebih cepat daripada perilaku perusahaan dalam posisi yang kuat. Harga IHSG sebagai ukuran pertumbuhan pasar saham Indonesia.

7.2 Sejarah Pasar Modal

Sejarah Pasar modal dunia telah berkembang pesat sebelum dan sesudah lahirnya bursa efek pertama di dunia. Lahirnya bursa efek pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia (negara kepulauan) sebagai kawasan penghasil rempah-rempah yang kaya dan bernilai tinggi di Eropa (Belanda). Latar belakang perdagangan Belanda yang kaya dengan Hindia Belanda (Nusantara) begitu menguntungkan dan kemudian melahirkan VOC yang menjadi “ibu” pertama dunia saham dan menciptakan inovasi kelembagaan yang terkenal dengan nama pasar modal. Belanda adalah tempat pasar modal pertama dunia didirikan, diikuti oleh Portugal, Spanyol, Prancis, dan Inggris.

Menurut buku "Effectengids" yang diterbitkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi sekuritas telah terjadi sejak tahun 1880, tetapi dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga informasi tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, sebuah perusahaan perdagangan komoditas dan sekuritas didirikan, yaitu Dunlop dan Koff, pendahulu PT Perdanas. Pada tahun 1892, Cultuur Maatschappij Goelpara, sebuah perusahaan perkebunan yang berbasis di Batavia, menerbitkan brosur penjualan 400 saham dengan harga 500,00 gulden per saham. Empat tahun

kemudian (1896), surat kabar harian Djoejacarta Het Centrum juga menerbitkan brosur penjualan saham senilai 105.000 gulden, dengan harga mulai 100,00 gulden per saham. Target bisnisnya diperkirakan adalah saham-saham yang tercatat di Amsterdam Stock Exchange. Namun, investor berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Saat itu belum ada pasar saham di Indonesia.

1. Perkembangan Pada awal abad ke-19

Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan perkebunan besar di Indonesia. Penabungnya adalah orang Belanda dan Eropa yang pendapatannya lebih tinggi dari penduduk asli. Oleh karena itu, koloni mendirikan pasar modal. Akhirnya Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang menjadi penyelenggara Vereniging voor de Effectenhandel dan segera memulai perdagangan. Di tingkat Asia, Bursa Efek Batavia adalah yang keempat. Awalnya, saham dan obligasi perusahaan/perkebunan yang beroperasi di Indonesia Belanda diperdagangkan di bursa ini.

Pada tahun 1914, Bursa Efek Batavia ditutup akibat Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal Batavia begitu pesat sehingga menarik juga warga kota lainnya. Bursa efek resmi didirikan pada tanggal 11 Januari 1925 di Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 1925 di Semarang. Anggota Bursa Efek Surabaya saat itu adalah Fa. Dunlop dan Koff, Fa. Gijsselman dan Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk dan petugas polisi dan N. Koster. Sedangkan anggota bursa di Semarang saat itu adalah Fa. Dunlop dan Koff, Fa. Gijsselman dan Steup, Fa. Monado and Co., Fa. Perusahaan dan Co. dan Fa. P.H. Soeters and Co. Nilai surat berharga yang didaftarkan mencapai 1.400.000.000 NIF (bila

diindeks dengan harga beras bersubsidi tahun 1982, nilainya $\pm$ Rp 7.000.000.000.000) dan berasal dari 250 jenis surat berharga. Masa ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1929 dilanda resesi dan pecah Perang Dunia Kedua. Situasi yang semakin memburuk memaksa bursa saham Surabaya dan Semarang tutup sementara. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 1940, Bursa Efek Jakarta diaktifkan kembali. Namun karena pecahnya Perang Dunia II, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Jepang kemudian bergabung dengan Indonesia dan Bursa Efek Jakarta ditutup kembali. dibuka kembali Saat itu PPUE (Perhimpunan Perdagangan Uang dan Efek) yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta, dan pialang efek melakukan operasi pasar saham. Pada tanggal 26 September 1952 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Krisis Bursa, yang kemudian diputuskan menjadi Undang-Undang Bursa. Perkembangan pasar modal antara tahun 1977 dan 1987 berjalan lambat, meskipun negara memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan instrumen pasar modal. Stagnasi perkembangan pasar modal selama periode ini disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain prosedur penerbitan saham dan obligasi yang terlalu ketat, pembatasan fluktuasi saham, dll. PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang tercatat di BEJ.

2. Deregulasi Pasar Modal Gairah Pasar Modal

Baru Kembali setelah runtuhnya pemerintahan pada awal tahun 1987. Paket kebijakan Desember 1987 yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 adalah untuk menyederhanakan persyaratan penerbitan saham dan obligasi, serta menghapuskan biaya-biaya yang sebelumnya dipungut oleh BAPEPAM, seperti biaya penerbitan surat

berharga. Kebijakan ini juga menghilangkan pembatasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan meluncurkan bursa paralel. Sebagai alternatif bagi emiten yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk bursa.

Pada tahun 1995, sistem JATS (Jakarta Automatic Trading System) diperkenalkan. Sistem perdagangan lantai bursa yang secara otomatis menggabungkan harga beli dan jual saham. Sebelum JATS berlaku, transaksi dilakukan secara manual. Perdagangan saham telah menjadi perdagangan tanpa naskah, yaitu. perdagangan saham (bukti fisik kepemilikan saham). Kemudian dengan kemajuan teknologi, pasar saham kini menggunakan sistem perdagangan jarak jauh yaitu sistem perdagangan jarak jauh. Pada tanggal 22 Juli 1995, BES bergabung dengan Bursa Efek Paralel Indonesia (IPsx), sehingga sejak saat itu Indonesia hanya memiliki dua bursa yaitu BES dan BEJ.

3. Penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya

Pada tanggal 19 September 1996, BES Surabaya meluncurkan sistem Market Information and Automated Remote Trading (S-MART) yang menjadi sistem perdagangan yang lengkap, terintegrasi dan menyeluruh yang mampu memberikan informasi transaksi secara realtime melalui BES. BEJ bergabung dengan BES pada akhir tahun 2007 dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2008. Pada tahun 2009, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem perdagangan baru, JATS-G5

4. Pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Dewan Keuangan

Pada tahun 2011, undang-undang tentang Otoritas Pengawas Keuangan mulai berlaku, yang mengatur perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-

perbankan. 22 November Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Jasa Keuangan (OJK) resmi disahkan, yang menjadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK.

OJK dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan modal ventura, perusahaan keuangan, dana investasi, asuransi dan dana pensiun, dan lembaga lain yang menghimpun uang masyarakat. Pengalihan kendali akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan pasar modal dan sektor keuangan non bank resmi dialihkan ke OJK yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

7.3 Pasar Modal

1. Pengertian dan Manfaat Pasar Modal

Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat fisik terorganisir di mana sekuritas diperdagangkan, disebut bursa efek. Pengertian pasar saham (stock market) adalah suatu sistem terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas, yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. UU Pasar Modal No. Pasal 8 Undang-undang Pasar Modal tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan, dan lembaga serta profesi yang terkait dengan efek.”

Manfaat pasar modal adalah menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sekaligus memungkinkan alokasi sumber pembiayaan yang optimal. (Destina Paningrum, 2022) dalam bukunya menguraikan

beberapa keuntungan bagi emiten dan investor sebagai berikut:

- a) Keuntungan pasar utama bagi emiten
 - 1) Jumlah uang yang akan dikumpulkan bisa besar
 - 2) Dana ini segera tersedia di pasar utama • Tidak ada pengaturan yang memberikan keleluasaan lebih kepada manajemen dalam mengelola dana/perusahaan
 - 3) Solvabilitas perusahaan yang tinggi, penguatan citra perusahaan • Ketergantungan emiten terhadap bank berkurang
 - 4) Arus kas dari penjualan saham biasanya lebih besar dari nilai nominal perusahaan
 - 5) Menerbitkan saham cocok untuk membiayai perusahaan modal ventura • Tidak ada kebebasan finansial yang permanen • Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas
 - 6) Tidak terkait dengan aset tertentu penjamin
 - 7) Profesionalisme administrasi meningkat
- b) Manfaat pasar modal bagi investor
 - 1) Nilai investasi meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ini tercermin dari kenaikan harga saham yang menghasilkan capital gain.
 - 2) menerima dividen untuk pemilik/pemegang saham dan menerima tingkat bunga tetap atau variabel untuk pemegang obligasi
 - 3) Hak suara dalam RUPS untuk pemegang saham, hak suara dalam RUPO jika untuk pemegang obligasi
 - 4) Anda dapat dengan mudah mengubah instrumen investasi untuk meningkatkan pengembalian atau mengurangi risiko

2. Teori Pasar Modal

Umumnya teori yang digunakan untuk analisis fundamental perusahaan adalah teori Du Pont. Teori yang sering digunakan untuk menganalisis nilai wajar suatu perusahaan adalah time value of money, teori margin of safety, teori model diskon dividen, teori informasi asimetris, dan teori hipotesis pasar efisien. Teori yang umum digunakan dalam reksa dana investasi adalah teori portofolio dan teori evaluasi kinerja investasi berdasarkan Sharpe (1964, 1966, 1975), Treynor (1966, 1973) dan Jensen Alpha (1968, 1969, 1972). . Penggunaan teori di atas tidak berarti bahwa teori ini merupakan satu-satunya acuan yang digunakan dalam analisis produk pasar modal. Seiring waktu, dimungkinkan untuk memperkenalkan teori-teori baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pembahasan masing-masing teori adalah sebagai berikut:

(a) teori DuPont

Pada tahun 1919, dikembangkan oleh direktur keuangan Eli. du Pont de Nemours dan Co. DuPont dikenal sebagai pengusaha sukses. Dalam bisnisnya, ia memiliki kesempatan untuk menganalisis laporan keuangannya. DuPont Corporation memelopori metode analisis kinerja perusahaan, yang hingga saat ini dikenal sebagai Analisis DuPont.

Pengertian analisis DuPont adalah analisis struktur sistem rasio, yang bertujuan untuk mengidentifikasi determinan return on equity dan return on aset. Analisis ini penting selain untuk mengkaji peran dari faktor-faktor tersebut dan juga dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan ekuitas dan pengembalian aset yang dimiliki oleh investor atau perusahaan.

Analisis DuPont mengatakan bahwa tiga hal mempengaruhi ROE:

- 1) Efisiensi operasional yang diukur dengan marjin laba bersih.
- 2) Efisiensi pemanfaatan aset yang diukur dengan total perputaran aset.
- 3) Leverage keuangan yang diukur dengan rasio ekuitas

(b) Teori *Time Value of Money*

Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut *time value of money* adalah istilah yang mengatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang, atau istilah yang merujuk pada perbedaan nilai uang. uang karena perbedaan waktu. Saat menghitung nilai sekarang dan masa depan, lamanya waktu dan hasil juga harus dipertimbangkan.

Oleh karena itu, konsep *time value of money* sangat penting bagi perusahaan, institusi maupun individu dalam masalah keuangan. Saat menghitung uang, nilai Rp 1000,00 yang diterima sekarang lebih berharga atau lebih besar dari Rp 1000,00 yang diterima di masa depan. Ini sangat mendasar karena nilai uang berubah dari waktu ke waktu di bawah pengaruh banyak faktor: faktor-faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pajak pemerintah dan iklim politik. Begitu juga ketika berbicara tentang investasi, dimana reksa dana memberikan return melalui keuntungan di masa depan. Ini berarti biaya investasi dikeluarkan saat ini dan pendapatan akan diterima di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, kita tidak dapat secara langsung membandingkan nilai

investasi saat ini dengan beberapa pengembalian di masa depan. Oleh karena itu, pengembalian masa depan ini harus didiskontokan ke nilai sekarang untuk membandingkannya dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini. Ini juga berarti menggunakan konsep *time value of money* (Sutrisno, 2000).

(c) Teori *Margin of Safety*

Istilah *Margin Of Safety* pertama kali diperkenalkan oleh investor guru, Benjamin Graham, dan partnernya, David Dodd, pada tahun 1928, bapak dari value investing, yaitu dalam buku *Security Analisis* (1934). Istilah ini muncul dalam buku Benjamin Graham yaitu *The Intelligent Investor*. Kemudian *Margin Of Safety* dipopulerkan kembali oleh anak didik Graham yang paling terkenal, yaitu Warren Buffett. Buffet bisa menjadi sangat sukses sebagai investor saham karena keahliannya yang luar biasa dalam menentukan nilai intrinsik dari suatu saham.

(d) Teori *Dividend Discount Model*

Model Diskon Dividen (DDM) adalah metode untuk memperkirakan harga saham perusahaan berdasarkan teori bahwa sahamnya bernilai jumlah dari semua dividen masa depan perusahaan. Model penilaian ini menggunakan pertumbuhan dividen konstan selamanya, model ini lebih cocok untuk penilaian harga saham perusahaan yang pertumbuhannya relatif stabil (Damodaran, 2002).

Idenya sederhana, harga wajar saham adalah nilai sekarang dari semua dividen masa depan. Idenya sangat logis, karena jika seorang investor membeli saham dan memegangnya selamanya, pengembalian investasinya hanyalah dividen yang diberikan oleh

perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari potensi dividen.

Model diskon dividen termasuk dalam metode nilai sekarang untuk penetapan harga intrinsik. Pendekatan nilai sekarang ditentukan oleh komponen arus kas. Arus kas yang digunakan dalam penelitian ekuitas adalah laba perusahaan. Dari sudut pandang investor yang membeli saham, arus kas yang diterima investor adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan sebagai dividen (Tandelilin, 2010). Arus kas kepada investor berupa dividen dapat digunakan dalam penilaian saham dengan menggunakan metode present value. Menurut Tandelilini (2010), DDM merupakan model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen masa depan.

(e) Teori Asymmetric Information

Informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Informasi asimetris tersebut terjadi misalnya antara investor yang berinvestasi di pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor melakukan investasi. Ini memaksa investor untuk meneliti saham secara lengkap dan akurat sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan modal di masa depan.

Namun, mencari informasi tidaklah mudah. Beberapa investor mendapatkan sangat sedikit informasi tentang saham di pasar modal. Ini karena perwakilan perusahaan mungkin tidak menawarkan status penuh perusahaan kepada publik. Informasi ini merupakan rahasia dagang yang akan diungkapkan

kepada orang yang dipercaya dan pada waktu yang tepat. Menanggapi hal tersebut, investor yang cerdas mencari informasi kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Informasi yang dihasilkan mengalami perbedaan antara investor dan agen perusahaan, perbedaan ini disebut informasi asimetris. Informasi asimetris tidak hanya hadir di pasar modal, tetapi juga dialami oleh industri lain. Bahkan dari perspektif hukum, informasi asimetris ini bisa saja ada.

Informasi asimetris memiliki dua bentuk dasar yang dapat dibedakan. Yang pertama adalah pengetahuan tacit, yang mengacu pada situasi di mana pihak lain memiliki pengetahuan lebih tentang kualitas (atau "jenis") barang yang dijual atau tentang variabel kontrak. Lain, tindakan rahasia, adalah ketika satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel melalui beberapa tindakan, dan tindakan tersebut tidak terdeteksi oleh pihak lain.

(f) Teori Portofolio

Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M Markowitz (1952) dalam artikelnya tahun 1952, "Pemilihan Portofolio, Jurnal Keuangan". Dalam praktiknya, investor sekuritas sering mendiversifikasi investasinya dengan menggabungkan sekuritas yang berbeda.

Teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dikenal dengan model Markowitz yang memberikan peluang untuk berinvestasi secara efisien dan optimal yaitu dengan membentuk portofolio yang optimal. Teori portofolio Markowitz dikembangkan lebih lanjut oleh Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Jan

Mossin (1996). Sharpe (1963) mengembangkan teori Markowitz, yang dikenal sebagai model indeks tunggal, yang menggambarkan hubungan linier antara pengembalian riil sekuritas dan faktor ekonomi makro secara umum.

Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh King (1966) yang dikenal dengan model multiple index, yang mengukur pengaruh pergerakan umum antara sekuritas yang dipengaruhi oleh efek pasar dan efek agunan dari sektor industri. Sharpe (1964) kemudian mengembangkan model Markowitz yang memprediksi keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan berdasarkan aset berisiko, yang dikenal dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM).

(g) Hipotesis Pasar Efisien (*Efficient Market Hypothesis/ EMH*)

Fama (1970) adalah orang pertama yang memperkenalkan dan mengemukakan konsep pasar yang efisien. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal dan pasar uang. Sebuah pasar dianggap efisien ketika tidak ada seorang pun, baik investor individu maupun institusi, yang mampu memperoleh pengembalian abnormal setelah menyesuaikan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada.

Dengan demikian, harga yang terbentuk di pasar mencerminkan informasi yang tersedia atau “harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia”. Istilah lain mengatakan bahwa di pasar yang efisien, harga aset atau sekuritas dengan cepat dan lengkap mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut.

Jones (1998) berpendapat bahwa harga saham saat ini mencerminkan dua jenis informasi, yaitu informasi yang sudah diketahui dan informasi yang masih perlu ditebak. Ada dua jenis informasi yang sudah dikenal, yaitu. informasi masa lalu (misalnya, hasil tahun lalu atau triwulanan) dan informasi terkini, dan peristiwa atau peristiwa yang telah diumumkan tetapi belum terjadi (misalnya, rencana pembagian saham)

(h) Teori Evaluasi Kinerja Reksa Dana

Saat berinvestasi, investor tentu ingin mendapat untung dan menghindari risiko sebanyak mungkin. Suad Husnan (1990) Ambarwati (2004) menyatakan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi analis private equity adalah menilai risiko investor. Menurut teori keuangan, investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi ketika risiko investasi meningkat.

Reksa dana merupakan salah satu cara bagi investor untuk menginvestasikan dananya. Reksadana adalah alat yang menarik bagi investor dibandingkan dengan suku bunga deposito, yang kurang menarik dan kurang menarik bagi bank investasi. Beberapa keuntungan berinvestasi di reksa dana adalah investor dengan dana terbatas dapat berinvestasi.

Dengan bantuan seorang manajer investasi, investor yang tidak memiliki banyak waktu dan pengetahuan tidak perlu khawatir dalam mengelola keuangannya. Selain itu, investor dapat mendiversifikasi investasi sekuritasnya, ada transparansi dan likuiditas tinggi, sehingga mereka dapat menarik uang yang diinvestasikan kapan saja. (Martalena, 2011). Inilah beberapa keuntungan berinvestasi di reksa dana (Kapoor et al, 2010)

7.4 Lembaga-Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal

Melakukan transaksi di pasar modal merupakan transaksi yang memerlukan keterbukaan dan keterbukaan informasi dari perusahaan yang ingin menjual sahamnya di pasar modal. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi sebelum, selama dan sesudahnya, pengungkapan informasi sangat diperlukan, karena menyangkut kepercayaan investor terhadap perusahaan yang sahamnya dibeli. Kompleksitas pengaturan pengendalian dan administrasi tersebut membutuhkan kerjasama beberapa instansi/otoritas untuk mendukung pasar modal di Indonesia. (Eko Sudarmanto, 2021).

Berikut lembaga-lembaga yang terlibat :

1) *Self Regulatory Organization* / SRO (BEI, KPEI, KSEI)

SRO atau *Self Regulatory Organization* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP) dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP). SRO berhak mengeluarkan perintah yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dalam kegiatannya. Misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek antara lain peraturan yang berkaitan dengan pencatatan efek, peraturan keanggotaan bursa efek, dan peraturan perdagangan surat berharga.

a. Bursa Efek Indonesia

Sesuai dengan misinya, PT BEI menyediakan layanan transaksi efek, layanan pencatatan dan layanan informasi serta fungsi lainnya. Jasa perdagangan efek adalah layanan jual beli efek. Layanan pencatatan adalah layanan pencatatan saham dan obligasi emiten. Layanan informasi dan

fasilitas lainnya adalah layanan untuk memberikan informasi kepada anggota Bursa, kantor berita, media dan perusahaan, serta menyediakan terminal pelaporan untuk perdagangan obligasi

b. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

PT KPEI didirikan berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 untuk memberikan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi pasar modal secara sistematis, adil dan efisien. KPEI memperoleh status badan hukum pada tanggal 24 September 1996 atas izin Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1998, Perusahaan BAPEPAM mendapat izin operasi dari lembaga penjamin penyelesaian berdasarkan Peraturan No. Kep-26/PM/1998.

PT KPEI merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur kegiatan para pengguna jasanya, atau disebut juga sebagai self-regulatory organization (SRO). Sebagai SRO, KPEI berperan dalam menentukan arah pengembangan pasar modal Indonesia. Sebagai central counterparty (CCP), KPEI memberikan layanan penyelesaian dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran KPEI sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian transaksi kliring di Bursa Efek Indonesia.

c. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

KSEI mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1998 yaitu. penyelenggaraan penyelesaian transaksi efek dengan warkat yang mengambil alih fungsi PT Kliring Deposito Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya adalah LKPP (Kustodian dan Kliring).

Selain itu, sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI dan KPEI telah melaksanakan perdagangan OTC dan Kliring Saham (OTC) di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh pengguna jasanya yaitu SRO (BEI dan KPEI), kustodian, perusahaan efek dan kantor administrasi efek (BAE).

2) Perusahaan Efek

Perusahaan sekuritas adalah orang yang bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. Penjamin emisi (underwriter) adalah pihak yang membuat perjanjian dengan emiten untuk melakukan (meninggalkan) penawaran umum untuk kepentingan emiten, dengan atau tanpa komitmen untuk membeli sisa Efek yang Tidak Terjual. Pialang/broker adalah pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Pengelola portofolio adalah badan yang bidang kegiatannya adalah pengelolaan efek untuk kepentingan nasabah atau pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang beroperasi berdasarkan perusahaan asuransi. hukum dan peraturan yang berlaku untuk bisnis mereka sendiri. Perusahaan sekuritas dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Perusahaan sekuritas nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b) Perusahaan saham gabungan yang sahamnya dimiliki oleh warga negara perorangan Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak di bidang tersebut Keuangan

3) Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Perusahaan Pemeringkat Efek

Perkembangan pasar modal tidak terlepas dari dukungan dan peran lembaga dan pakar penunjang pasar modal. Lembaga profesi penunjang dan perusahaan kualifikasi pasar modal dan sekuritas merupakan kepanjangan tangan lembaga yang membantu dan memastikan prinsip pembukaan pasar modal dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga penunjang pasar modal yang ditentukan dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 terdiri dari pengelola rekening, kantor pengelola efek dan manajer investasi. Lembaga pendukung profesi pasar modal dan pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK, dan harus bertindak independen, objektif, profesional, dan tidak memihak terhadap pihak tertentu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi ahli penunjang pasar modal, profesionalisme menjadi tanggung jawab ahli penunjang pasar modal dalam melaksanakan operasional dan permodalan dalam memberikan pelayanan yang baik di pasar modal.

4) Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Bank Kustodian

Bank penyimpanan adalah entitas yang menyediakan layanan penitipan untuk sekuritas dan aset terkait lainnya Jelajahi dengan sekuritas dan layanan lainnya, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lainnya Transaksi Efek dan perwakilan pemegang rekening Efek yang menjadi nasabahnya. Kecuali perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan simpanan adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

b. Biro Administrasi Efek (BAE)

BAE merupakan perusahaan yang mendapat izin usaha dari OJK untuk beroperasi sebagai kantor pengelola efek. BAE adalah orang yang berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Emiten, melakukan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek. Setiap BAE wajib memelihara, melestarikan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan informasi tertulis tentang emiten yang pengaruhnya dikelolanya.

2. Wali Amanat

Bank umum dan badan lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Bank umum atau badan lain harus terlebih dahulu mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai wali amanat.

1) Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Akuntan

Akuntan merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang harus terdaftar di OJK sebelum beroperasi di sektor pasar modal. Layanan intinya adalah layanan inspeksi, dan hasil pekerjaannya banyak digunakan sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan. Tugas seorang akuntan di bidang pasar modal adalah memeriksa laporan akuntansi seperti emiten, perusahaan efek, bursa saham, lembaga kliring dan Penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dana investasi, perusahaan efek dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal dan menerbitkan laporan keuangan

b. Konsultan Hukum

Pengacara yang bekerja di sektor pasar modal harus mendaftar terlebih dahulu ke Otoritas Jasa Keuangan. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain. Konsultan hukum memainkan peran penting dalam proses daftar publik (publikasi). Hal ini mengacu pada kewajiban menerbitkan legal audit dan legal opinion terhadap emiten yang mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK.

3. Penilai

Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang kompeten melakukan kegiatan penilaian di bidang pasar modal. Seperti lembaga lain yang mendukung pasar modal, penilai harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan sebelum beroperasi di sektor pasar modal. Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilaian pasar modal meliputi penilaian real estat dan penilaian perusahaan. Hasil kegiatan penilaian adalah laporan penilaian real estat meliputi penilaian real estat, properti pribadi, proyek konstruksi atau pengembangan, real estat, aset perkebunan, aset perikanan, aset kehutanan, aset pertambangan dan real estat lainnya. Penilai harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STTD) A atau AB untuk melakukan penilaian real estat.

Sementara itu, kegiatan evaluasi bisnis meliputi evaluasi perusahaan dan/atau transaksi, penyertaan pada perusahaan, instrumen keuangan, aset tidak berwujud, penerbitan laporan kewajaran atas transaksi, penyiapan studi manfaat proyek dan kegiatan bisnis, evaluasi keuangan keuntungan/kerugian yang disebabkan oleh kegiatan atau perusahaan. peristiwa tertentu. dan

penilaian bisnis lainnya. Penilai harus memiliki STTD B atau AB untuk melakukan operasi penilaian bisnis. Dalam melakukan penilaian, penilai harus berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan kaidah etika profesi serta independen.

4. Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Notaris yang beroperasi di pasar modal harus mendaftarkan ke Administrasi Keuangan. Notaris di sektor pasar modal berpartisipasi dalam penyediaan layanan, terutama dalam penyusunan dokumen hukum yang berkaitan dengan operasi dan produk pasar modal. Di pasar modal, kegiatan notaris meliputi:

- 1) Pembuatan risalah rapat umum (RUPS) dan penyusunan risalah keputusan RUPS,
- 2) Meneliti kebenaran hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dan
- 3) Membuat perjanjian investasi bersama (JIK) untuk menjamin kepercayaan para pihak.

5. Perusahaan Pemeringkat Efek

Perusahaan pemeringkat efek terlebih dahulu harus mendapatkan izin operasi dari Badan Layanan Pendanaan agar kami dapat beroperasi di sektor pasar modal. Perusahaan penilai sekuritas adalah perusahaan konsultan investasi yang tugas utamanya melakukan kegiatan klasifikasi objek klasifikasi, antara lain: • surat utang, Sukuk, surat berharga atau surat berharga lainnya (klasifikasi instrumen); Dan • Pihak sebagai entitas (klasifikasi perusahaan), termasuk reksa dana dan perwalian investasi real estat dalam bentuk perjanjian investasi bersama (KIK).

6. Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten adalah entitas yang menerbitkan efek, melakukan penawaran umum (dijual ke bursa), yaitu. penawaran efek oleh emiten untuk penjualan efek kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. aturan pelaksana. Penerbit tidak bisa langsung. beroperasi secara independen di pasar modal, tetapi harus bertindak bersama dengan perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi. Setelah efek diperdagangkan di BEI, emiten harus tetap bekerja sama dengan perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek. Beberapa emiten menerbitkan surat berharga yaitu surat berharga berupa saham atau surat berharga yang dapat ditukar dengan saham, atau surat berharga yang mencantumkan hak untuk membeli saham. Ada juga emiten yang menerbitkan surat utang seperti obligasi

Perusahaan Publik adalah perusahaan dengan pemegang saham paling sedikit 300 orang dan modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 atau jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Emiten adalah bentuk lain dari perusahaan publik. Artinya, jika saham emiten dimiliki secara terbuka oleh lebih dari 300 pemegang saham dan telah menyetor modal lebih dari Rp 3.000.000.000, maka emiten sudah dapat digolongkan sebagai perseroan terbatas.

7. Pemodal/ investor

Investor atau pemodal adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan instrumen di pasar modal sebagai alat investasi.

8. Penilai Harga Efek

Lembaga yang memperkirakan nilai wajar surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya serta memberikan informasi secara objektif, independen, andal, dan bertanggung jawab.

9. Penyelenggara Program Perlindungan investor efek indonesia (P3iei) / Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)

P3IEI adalah lembaga yang memberikan perlindungan dana kepada pemodal/investor untuk mewujudkan pasar modal yang adil dan tertib.

10. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dibentuk sebagai wadah penyelesaian sengketa perdata di pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui BAPMI. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh BAPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hanya sengketa perdata yang timbul antara para pihak di sektor pasar modal
- 2) Adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BAPMI.
- 3) Sengketa tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana dan/atau administrasi.

7.5 Produk Produk Pasar Modal

Produk pasar modal secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu produk pasar modal melalui investasi langsung yaitu. saham dan obligasi dan produk pasar modal melalui investasi tidak langsung yaitu. dana bersama. Produk-produk tersebut kemudian dikembangkan untuk menciptakan produk turunan, varietas dan hibrida yang memiliki kombinasi karakteristik tersebut.

1. Produk pasar modal dengan investasi langsung

Secara umum, klasifikasi produk pasar modal yang mengandung investasi langsung dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Saham

Ada bukti penyertaan atau kepemilikan dalam perusahaan. Karakteristik hukum pemegang saham:

- 1) Risiko terbatas / *Limited Risk* (pemegang saham hanya bertanggung jawab atas jumlah uang yang disimpan di perusahaan).
- 2) *Ultimate Control* (pemegang saham bersama-sama menentukan arah dan tujuan perusahaan).
- 3) *Residual claim* (sebagai pihak terakhir yang setelah kreditur menerima pembagian hasil keuangan perseroan dan sisa kekayaan setelah likuidasi perseroan).

b. Saham syariah

Pada dasarnya saham syariah adalah saham yang industrinya mengikuti prinsip syariah. Untuk pembahasan lengkap tentang saham syariah, lihat Literasi Keuangan di Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada dasarnya saham syariah adalah saham yang industrinya mengikuti prinsip syariah. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, yaitu:

- 1) Usaha yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti usaha perbankan yang bergerak di bidang rokok, miras, riba dan perjudian.
- 2) Perusahaan yang rasio utangnya tidak terlalu tinggi dan utangnya tidak melebihi 82 persen atau maksimal 45 persen.

- 3) Usaha yang penghasilannya tidak sesuai syariah, seperti bunga bank, tetapi penghasilannya adalah dan; 10% dari total omzet perusahaan.

c. Obligasi

Ini adalah surat berharga berbasis utang yang menawarkan pengembalian investasi tetap selama periode tertentu hingga jatuh tempo.

d. Sukuk

Sukuk adalah istilah baru yang diperkenalkan untuk menggantikan istilah obligasi syariah. Secara umum terdapat 2 jenis sukuk yaitu sukuk ijarah yang menggunakan sistem leasing dan menawarkan imbal hasil tetap dan sukuk mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil dan menawarkan imbal hasil variabel. Untuk pembahasan sukuk lebih lengkap, lihat Industri Jasa Keuangan Syariah.

e. Efek Derivatif

Derivatif adalah turunan dari sekuritas "primer", baik yang bersifat ekuitas maupun obligasi. Derivatif adalah kontrak yang nilai atau potensi pengembaliannya dikaitkan dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut aset dasar.

Dalam pengertian yang lebih tepat, derivatif adalah kontrak keuangan antara dua (dua) pihak atau lebih yang tujuannya untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset/barang yang digunakan sebagai objek komersial sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Nilai masa depan dari item yang dapat diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya di pasar spot.

f. Derivatif Keuangan

Derivatif yang tercatat di BEI adalah financial derivatif. Derivatif keuangan adalah derivatif yang

variabel dasarnya adalah instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya.

2. Produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Reksa Dana Tradisional

- 1) Reksa Dana pasar uang, mis. dana investasi yang kebijakan investasinya 100% diinvestasikan pada instrumen pasar uang (surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun).
- 2) Dana pendapatan tetap, atau dana investasi, yang kebijakan investasinya minimal 80% diinvestasikan pada instrumen obligasi.
- 3) Reksa Dana Campuran, yaitu dana investasi dengan kebijakan investasi sampai dengan 79% diinvestasikan pada saham, obligasi dan instrumen pasar uang.
- 4) Reksa dana saham, yaitu. dana investasi yang kebijakan investasinya paling sedikit 80% diinvestasikan pada instrumen saham.

b. Reksa Dana tidak konvensional

Reksadana ini adalah jenis dana investasi lain dengan aturan pengelolaan khusus atau struktur tertentu.

DAFTAR PUSTAKA:

- Lisa Ara Ghea Sagala, Susanti Nurmalasari, Siti Zakiyyah Frialyani, Dedi Mulyadi. 2022. Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 2023, 9 (2), 324-328
- Fitri Rorizki, Sakinah, Arpin Dalimunthe, Purnama Ramadhani Silalahi. 2022. Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Economic Reviews Journal Volume 1 Nomor 2*.
- Destina Paningrum. 2022. REFERENSI INVESTASI PASAR MODAL. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Sharpe, William F. 1992. Asset allocation: Management style and performance measurement. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 18, No. 2, 7-19.
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama, Cetakan ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia
- Prasetya, Fery. 2012. *Modul Ekonomi Publik*.
- Prayogo, Ardyan dan Vivi Ariyani. 2013. Pembentukan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Keuangan di BEI. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 1*, 49-58.
- Phillips, Matt. 2015. The DuPont Invention That Forever Changed How Things Work In The Corporate World. *Quartz (publication)*.
- Prayogo, Ardyan dan Vivi Ariyani. 2013. Pembentukan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Keuangan di BEI. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 1*, 49-58.
- Priminingtyas, Dina Novia SP.,Msi. Time Value Of Money [Powerpoint Presentation].
- udiyanto. 2011. *Mengenal Rating Surat Hutang Negara*.
- Treynor, Jack. L. 1966. How To Rate Management Investment Funds. *Harvard Business Review (43)*.

Wira, Desmond. 2011. Analisis Fundamental saham, cetakan pertama. Jakarta: Exced.

BAB 8

BANK SENTRAL

Oleh Rida Ristiyana

8.1 Pendahuluan



Gambar 8.1. Bank Indonesia

Sumber : (Dinas Kebudayaan Jakarta, 2023)

Bank Indonesia (BI) adalah bank yang berada di kedaulatan negara republik Indonesia dengan kapasitas sebagai bank sentral dengan tujuan tunggal yaitu: mencapai, menjaga dan memelihara nilai rupiah agar tetap stabil. Demi meluncurkan tujuan tersebut BI mengemban tiga bidang yaitu: moneter, sistem pembayaran serta stabilitas sistem keuangan. Tiga bidang ini perlu diintegrasikan guna

menunjang tujuan tunggal BI supaya dapat berjalan secara efisien dan efektif. Bank Indonesia memiliki arah strategis baik jangka menengah maupun jangka panjang. Demi mewujudkan bank sentral yang mampu memberikan kontribusi secara nyata pada perekonomian Indonesia, BI telah melalui transformasi secara totalitas (Bank Indonesia, 2020a). Transformasi ini dilakukan guna menghadapi berbagai tantangan yang sedang terjadi dan dimasa mendatang yang berdampak pada visi dan misi BI termasuk penanganan Covid-19. Transformasi ini meliputi kebijakan dan kelembagaan. Diharapkan melalui transformasi ini BI dapat memajukan Indonesia dengan penguatan nilai Rupiah (nilai tukar dan inflasi), menjaga kestabilan keuangan, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta berkelanjutan serta mewujudkan kinerja yang unggul (efektif, bertatakelola dan efisien).

8.2 Status dan Kedudukan BI

Sebagai otoritas moneter dalam menjalankan tugas dan wewenang BI memiliki status dan kedudukan dengan dua peran, ini tertuang pada UU RI No.23 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU RI No. 6 Tahun 2009 (OJK, 2017; Wuisang, 2021), yaitu:

- a) Sebagai lembaga indepeden dalam menjalankan tugas dan wewenang BI memiliki otonomi penuh, tidak ada intervensi dari pihak lain. Ini dilakukan guna mewujudkan fungsi BI secara lebih efektif serta efisien.
- b) Sebagai badan hukum berdasarkan UU, BI ditetapkan sebagai badan hukum perdata (didalam/diluar bertindak atas nama sendiri) sekaligus publik (mencetuskan aturan hukum berdasarkan tugas dan wewenang).

8.3 Sejarah BI

Pada zaman penjajahan hindia Belanda, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) membuka perdagangan di nusantara (Indonesia), kerena maraknya perdagangan yang terjadi di nusantara maka untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut didirikannya *De Javasche Bank*, Bank ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia yang merupakan Bank sirkulasi sampai dengan saat ini. Sejarah Bank Indonesia ada pada tabel 8.1.

Tabel 8.1. Sejarah Bank Indonesia

No	Tahun	Keterangan
1.	1827-1828	Pendirian <i>De Javasche Bank</i> sekaligus diberikan octrooi oleh pihak belanda sebagai bank sirkulasi
2.	1830	DJB di gunakan untuk mendukung kebijakan finansial dan tanam paksa
3.	1829-1870	<i>De Javasche Bank</i> melakukan ekspansi bisnis dan membuka beberapa kantor cabang di Semarang dan surabaya tahun 1829, Padang dan Makassar tahun 1864, Cirebon tahun 1866, Solo dan Pasuruan tahun 1867
4.	1870-1942	Membuka sebanyak 15 kantor cabang di Yogyakarta tahun 1879, Pontianak tahun 1906, Bengkalis, Medan dan banjar masin tahun 1907, Tanjung balai dan tanjung pura tahun 1908, Bandung dan Palembang tahun 1909, Manado tahun 1910, Malang tahun 1916,

No	Tahun	Keterangan
.		Kutaraja tahun 1918, Kediri dan Pematang Siantar tahun 1923, dan Madiun tahun 1928.
5.	1922	Undang-Undang DJB (<i>De Javasche Bankwet</i>) di terbitkan pihak belanda
6.	1942	DJB di likuidasi Jepang dan d gantikan dengan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG)
7.	1945	Terjadinya dualisme Bank Sirkulasi BNI milik RI dan DJB milik NICA (Netherlands Indies Civil admini stration)

Sumber: (Bank Indonesia, 2020b)

8.4 Visi dan Misi BI

Bank Indonesia memiliki visi dan misi (Bank Indonesia, 2020e). Berikut visi dan misinya:

1. Visi:

Menjadi Bank Sentral berbasis digital yang terdepan dengan berkontribusi pada perekonomian nasional dan menjadi negara terbaik dari sekian *emerging markets* yang adademi mewujudkan Indonesia yang maju.

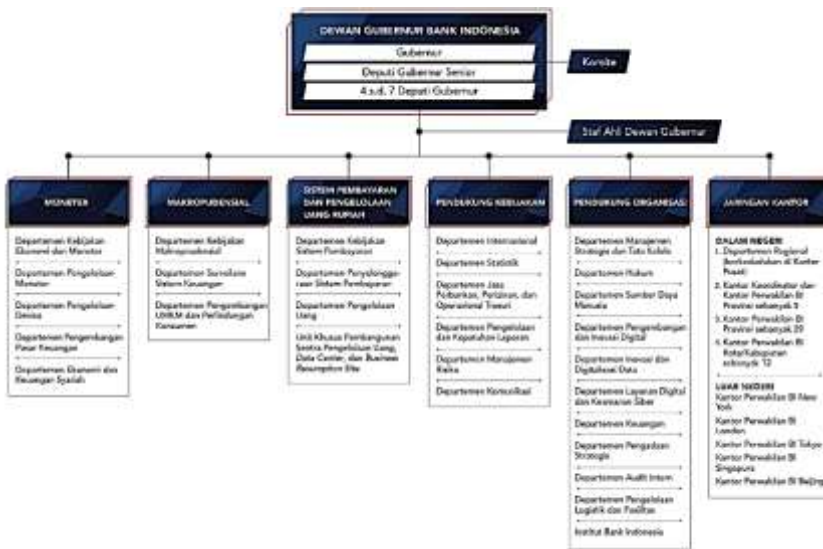
2. Misi:

- 1) Mengefektivitaskan kebijakan moneter serta baran dari kebijakan BI demi menjaga stabilisasi nilai Rupiah.
- 2) Mengefektivitaskan kebijakan makro prudensial bi dan mensinergikan kebijakan mikro prudensial ojk guna menjaga stabilisasi sistem keuangan.

- 3) Mengembangkan dan mensinergikan kebijakan sistem pembayaran BI dan pemerintah serta mitra/partner strategis lainnya.
- 4) Mensinergikan bauran kebijakan BI (kebijakan fiskal dan bentuk reformasi dari struktural pemerintah dan *partner* lain) demi mendukung kestabilan makro dan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Memperkuat dan mendukung efektivitas kebijakan dan pembiayaan ekonomi nasional demi meningkatkan pendalaman pasar keuangan.
- 6) Memperdalam sekaligus mengembangkan keuangan syariah dan ekonomi pada level nasional hingga ke daerah.
- 7) Penguatan SDM, tata kelola hingga sistem informasi guna menciptakan bank sentral berbasis digitalisasi dan berkiprah pada peran internasional.

8.5 Kantor Perwakilan dan Struktur BI

Di dalam negeri BI memiliki lima regional/wilayah koordinasi, yaitu: Wilayah koordinasi Jawa; Sumatera; Sulawesi, Maluku dan Papua; Bali dan Nusa Tenggara; Kalimantan. Diluar negeri memiliki lima kantor perwakilan, yaitu: kantor perwakilan Beijing, Tokyo, Singapore, New York, London. Satuan kerja BI tercermin pada struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 8.2.



Gambar 8.2. Struktur Organisasi BI
Sumber: (Bank Indonesia, 2020f)

8.6 Tujuan Tunggal, Tugas dan Fungsi Utama BI

BI hanya memiliki 1 tujuan tunggal “Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” yang berarti terdapat 2 unsur yaitu: unsur nilai dari mata uang yang stabil pada barang maupun jasa yang terefleksikan pada inflasi dan unsur nilai dari mata uang pada negara lain yang diharapkan stabil yang terefleksikan pada nilai tukar. Demi meluncurkan tujuan tunggal, BI mengelola tiga bidang yang sekaligus menjadi fungsi utama BI, yang didalamnya meliputi kebijakan dan indikator perekonomian di Indonesia. Berikut tugas dan fungsi utama BI:

- 1) Kebijakan moneter (UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah pada UU No. 6 Tahun 2009 Pasal 7), kebijakan ini mengatur kestabilan harga baik barang/jasa (inflasi). Selain itu, kebijakan ini juga mengatur kestabilan nilai

tukar atas mata uang negara lain (*free floating*). Transmisi kebijakan moneter sebagai berikut:



Gambar 8.3. Transmisi Kebijakan Moneter BI
Sumber : (Bank Indonesia, 2020g)



Gambar 8.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi
Sumber : (Bank Indonesia, 2020g)

- 2) Kebijakan dalam menstabilkan sistem keuangan (UU No.21 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2016; Peraturan BI No.16/11/PBI/2014 dan UU No.2 Tahun 2020) situasi ini diharapkan sistem keuangan nasional dapat berfungsi dengan efektif serta efisien dan dapat bertahan pada kereatan faktor internal maupun eksternal, sehingga pengalokasian sumber pendanaan/pembiayaan dapat memberi sumbangsih pada pertumbuhan serta stabilisasi perekonomian secara nasional. Kebijakan ini meliputi unsur kebijakan makro prudensial dan pengawasan makro prudensial (pengembangan pada UMKM; protokol manajemen krisis; keuangan inklusif dan koordinasi BI dengan lembaga/otoritas lain.
- 3) Kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sistem ini merupakan seperangkat aturan, lembaga serta mekanisme yang dipergunakan dalam melaksanakan pemindahan dana demi melengkapi kewajiban pada kegiatan ekonom. Sistem ini meliputi tiga tahap, yaitu: otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir.



Gambar 8.5. Sekilas Sistem Pembayaran
Sumber: (Bank Indonesia, 2020d)

3. *E-Licensing* adalah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi memfasilitasi pengajuan perijinan di BI dengan dua fungsi utama yaitu, *administratif* dan *tracking*.
4. Informas iperizinan berisi mengenai informasi perizinan terhadap pasar keuangan dan sistem pembayaran pengelolaan uang.
5. Perpustakaan pada menu ini terdapat informasi mengenai pelayanan akses perpustakaan BI melalui *web* atau aplikasi pada *smart phone*.
6. Layanan kas dan bank merupakan pelayanan yang di berikan berupa penukaran uang melali kas keliling, penukaran uang rusak, uang peringatan kemerdekaan dan lain sebagainya.
7. Pengadaan barang dan jasa berisi mengenai informasi tentang proses bisnis pengadaan rekanan yang terintegrasi, seperti cara mendaftar menjadi rekanan, informasi rekanan, syarat menjadi rekanan, kebijakan rekanan dan pendaftarancalon vendor.
8. Kunjungan ke bank indonesia BI mendukung edukasi dengan membuka kunjungan untuk lembaga pendidikan, perusahaan maupun instansi lainnya dengan tidak memungut biaya. Syaratnya dengan mendaftar secara online dan mengirim email ke BI guna meminta persetujuan di departemen komunikasi.
9. Museum bank indonesia museum ini diperuntukkan guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait sejarah BI.
10. Standar sistem pemabayaran BI memiliki standar sistem pembayaran yang di singkat dengan SNAP (standar nasional *open API*) untuk menciptakan sistem pembayaran yang kompetitif, inovatif dan mendorong keandalan dan keamanan dalam sistem pembayaran.

8.8 Publikasi BI

BI berperan menjadi bank sirkulasi yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi mengenai organisasi dan berbagai laporan pelaksanaan tugas dan di sajikan dengan informasi terbaru (*update*). Berikut publikasi- publikasi BI (Bank Indonesia, 2020c) :

1. Ruang media berisi informasi terkini seputar Bank Indonesia, baik dalam investasi internasional, sistem keuangan negara, perkembangan stabilitas nilai rupiah dan lain sebagainya.
2. Kalender dalam menu kalender berisi mengenai jadwal rapat dewan gubernur, acara unggulan tahunan, hari libur dan cuti bersama, acara pendukung G20 dan lain sebagainya.
3. Peraturan berisi mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebijakan dan kegiatan pada Bank Indonesia.
4. Lelang berisi informasi untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter yang di lakukan di pasar uang, seperti informasi mengenai lelang valas konvensional, hasil lelang *Domestic Non Delivery Forward (DNDF)*, hasil lelang *reverse repo* SBN, lelang *term repo*, lelang *term* deposit rupiah dan lain sebagainya.
5. Laporan pada menu laporan terdapat informasi mengenai laporan posisi investasi internasional, survei konsumen, analisis inflasi, laporan keuangan BI, perkembangan uang beredar, neraca pembayaran, investasi internasional, laporan kebijakan moneter dan lain sebagainya.
6. Kajian berisi informasi mengenai penyelidikan tentang suatu hal yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Seperti, kajian stabilitas keuangan,

dampak konsolidasi bank terhadap perbankan indonesia, kajian tipologi tindak pidana mengenai pendanaan dan lain sebagainya.

7. *E-Magazine* merupakan majalah tentang sistem pembayaran, pemulihan ekonomi, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan perekonomian di indonesia.
8. Perekonomian daerah berisi informasi mengenai laporan perekonomian provinsi yang ada di indonesia, yang di sajikan berdasarkan informasi terkini.
9. Publikasi lain berisi informasi mengenai suku bungaobligasipemerintah *terupdate*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2020a. *Latar Belakang dan Transformasi Bank Indonesia*. <https://Www.Bi.Go.Id/Id/>. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/transformasi/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020b. *Layanan Bank Indonesia*. <https://Www.Bi.Go.Id/>. <https://www.bi.go.id/id/layanan/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020c. *Publikasi Bank Indonesia*. <https://Www.Bi.Go.Id/>. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020d. *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*. <https://Www.Bi.Go.Id/>. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020e. *Status dan Kedudukan BI, Visi dan Misi BI, Tujuan Tunggal BI*. <https://Www.Bi.Go.Id/>. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020f. *Struktur Organisasi, Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri*. <https://Www.Bi.Go.Id/Id>. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2020g. *Transmisi Kebijakan Moneter dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Bank Indonesia*. <https://Www.Bi.Go.Id/Id>. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx>
- Dinas Kebudayaan Jakarta. 2023. *Gedung Bank Indonesia*. <https://Dinaskebudayaan.Jakarta.Go.Id/>. <https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/disbuddki/news/2021/07/Gedung-Bank-Indonesia>

- OJK. 2017. Undang-Undang RI No.6 Tahun 2009. In *<https://www.ojk.go.id/id>*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/325.pdf>
- Wuisang, A. 2021. Kedudukan Bank Sentral Dan Peraturan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review, 07(12)*, 45–58. *<https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.2955>*

BAB 9

MASALAH MONETER INTERNASIONAL

Oleh Nita Fauziah Oktaviani

9.1 Pendahuluan

Permasalahan di bidang moneter dapat menerpa negara manapun dan kapanpun. Apabila suatu negara mengalami permasalahan moneter, hal itu beresiko dapat mengguncang perekonomian negara tersebut dan bahkan negara-negara lainnya. Berdasarkan historis, beberapa negara nyaris *collapsed* karena guncangan moneter yang menerjang. Sehingga melalui kerjasama antar negara dibentuklah IMF yang bertujuan untuk membantu menjaga kestabilan moneter dunia. Dalam Bab ini akan dibahas mengenai *International Monetary Fund* (IMF) dan beberapa permasalahan moneter di berbagai negara.

9.2 International Monetary Fund (IMF)

9.2.1 Sejarah IMF



Gambar 9.1. International Monetary Fund Logo

Sumber : <https://www.imf.org/en/home>

International Monetary Fund (IMF) dibuat tahun 1944 pada Konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire, A.S. Saat itu perwakilan dari 45 Pemerintah menyetujui kerangka kerjasama ekonomi

Dana Moneter Internasional (IMF) didirikan pada tahun 1944 pada konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire, AS. Saat itu, perwakilan dari 45 pemerintah menyepakati kerangka kerja sama untuk menghindari kebijakan ekonomi yang buruk dan menjadi lembaga internasional yang mengontrol sistem moneter internasional dan mempromosikan penghapusan pembatasan mata uang pada perdagangan barang dan jasa serta mempertahankan nilai tukar. . stabilitas Selama dekade ini, ketika aktivitas ekonomi melemah di beberapa negara industri besar, negara-negara lain mencoba mempertahankan ekonominya dengan berbagai cara. Untuk mencegah menipisnya cadangan emas dan devisa, beberapa negara membatasi kebebasan warganya untuk membeli dari luar negeri, mendevalusi mata uang, dan beberapa negara lain memberlakukan pembatasan yang rumit atas kebebasan warganya untuk memegang mata uang asing. Namun, langkah-langkah tersebut melemahkan posisi masing-masing negara, dan tidak ada negara yang dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam waktu lama. Kebijakan yang mengabaikan dampak terhadap negara lain merugikan ekonomi internasional; Perdagangan dunia turun dengan cepat, begitu pula pekerjaan dan standar hidup di banyak negara. Di akhir Perang Dunia II, sekutu utama mempertimbangkan berbagai rencana untuk memulihkan ketertiban dalam hubungan moneter internasional.

Tujuan IMF saat ini tetap sama seperti yang ditetapkan dalam dokumen pendiriannya tahun 1944. Sejak saat itu, dunia mengalami pertumbuhan pendapatan riil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sementara manfaat pertumbuhan

ekonomi tidak dibagi rata di antara semua negara, sebagian besar negara mengalami peningkatan kekayaan yang sangat berbeda dari periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. (Sumber : International Monetary Fund, 2003)

9.2.2 Tentang IMF

Dana Moneter Internasional (IMF) bekerja untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi 190 negara anggotanya. Hal itu dilakukan dengan cara: (1) Mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter ; (2) Meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi. IMF diatur oleh dan bertanggung jawab kepada negara-negara anggotanya.

Apa yang dilakukan IMF ?

IMF memiliki tiga misi penting:

1. Memajukan kerja sama moneter internasional
2. Mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi
3. Menghambat kebijakan yang akan merusak kemakmuran.

Untuk memenuhi misi tersebut, negara-negara anggota IMF bekerja secara kolaboratif satu sama lain dan dengan badan-badan internasional lainnya.

1. Bagaimana IMF Bekerja ?

IMF mendorong stabilitas keuangan internasional dengan:

Policy Advice (Pemberi Saran Kebijakan)

Tanggung jawab inti IMF adalah memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggota dan memberi mereka nasihat kebijakan, suatu kegiatan yang dikenal sebagai pengawasan. Sebagai bagian dari proses ini, yang juga berlangsung di tingkat global dan regional, IMF mengidentifikasi potensi risiko dan

merekomendasikan penyesuaian kebijakan yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Financial Assistance

IMF tidak memberikan pinjaman untuk proyek tertentu. Namun, IMF memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang dilanda krisis untuk membantu mereka saat menerapkan kebijakan untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. IMF juga menyediakan pembiayaan pencegahan untuk membantu mencegah krisis. Pinjaman IMF terus disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang terus berubah.

Capacity Development

IMF memberikan bantuan teknis dan pelatihan, dikenal sebagai pengembangan kapasitas sebagai salah satu fungsi utamanya. Pengembangan kapasitas menyumbang sekitar sepertiga dari pengeluaran tahunan IMF. Ini tersedia untuk semua anggota atas permintaan mereka dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus suatu negara. Pengembangan kapasitas dapat membantu negara-negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan memperkuat keuangan publik. Ini dapat membantu negara untuk memodernisasi kebijakan moneter dan nilai tukar mereka, mengembangkan sistem hukum, atau memperkuat tata kelola. Pengembangan kapasitas juga dapat membantu negara mengumpulkan dan menyebarluaskan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan. (Sumber : www.imf.org)

9.3 Sejarah Permasalahan Moneter di Dunia

Berdasarkan laman Indonesian Stock Exchange (Nabila, 2022) terdapat sejarah kelam mengenai krisis moneter yang menerpa sejumlah negara. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepanikan Bankir atau Krisis Knickerbocker, 1907

Kepanikan 1907 atau Banker's Panic adalah salah satu peristiwa historis mengenai moneter yang terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa ini dimulai dari Oktober 1907 yakni Heinze Brothers, F. Augustus Heinze dan dua saudara laki-laknya yakni Otto dan Arthur yang memiliki perusahaan dagang. Mereka bergabung dengan Charles W. Morse yakni seorang spekulan dari New York yang dikenal sebagai "Ice King" dalam upaya untuk menyudutkan pasar saham United Copper, namun kegagalan rencana tersebut memicu kepanikan.

Kepanikan di Wall Street menyebabkan para deposan lari ke bank-bank yang terkait dengan orang-orang ini, termasuk Knickerbocker Trust Company, yang presidennya, Charles T. Barney, yang bersahabat dengan Morse. Bank terpaksa ditutup, tetapi setelah aset mereka dibeli, mereka menjadi Perusahaan Perwalian Columbia-Knickerbocker. Bursa Efek New York turun hampir 50% dari puncaknya tahun sebelumnya dan keadaan menjadi genting.

Pemodal J.P. Morgan kemudian turun tangan dan mampu menstabilkan situasi dengan menjaminkan uangnya sendiri, dan dia meyakinkan bankir New York lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun, Morgan tidak berhenti di situ. Dia juga membeli obligasi New York City karena jelas bahwa kota itu berisiko bangkrut. Akhirnya, Departemen Keuangan dapat menyetorkan uang ke dalam pundi-pundi bank, dan bank pada gilirannya

membantu Bursa Efek New York. Karena aksi tersebut ancaman krisis dapat diatasi (Terrell, 2021).

2. Hiperinflasi, 1918-1924

Pasca perang, inflasi Jerman dapat dibagi menjadi dua fase besar. Fase pertama terjadi dari akhir Perang Dunia I pada November 1918 hingga Juni 1922. Pada fase ini inflasi sebagian besar tidak terduga. Akar penyebab inflasi adalah pengeluaran perang yang dibiayai defisit, Perang Dunia I besar-besaran, reparasi, dan kurangnya kemauan politik untuk menyesuaikan diri dengan beban utang yang lebih tinggi melalui pengurangan-pengeluaran dan peningkatan perpajakan dalam upaya untuk menjaga perdamaian sosial. Selain itu, tidak ada adanya kebijakan bank sentral akan inflasi tinggi tersebut; sebaliknya, Reichsbank mengakomodasi defisit besar dengan mendiskontokan pemerintah sekuritas.

Fase kedua yakni inflasi pasca perang, adalah hiperinflasi dari Juli 1922 hingga stabilisasi pada November 1923. Fase ini dimulai setelah pembunuhan menteri luar negeri Rathenau dan gejolak politik bersamaan dengan pemulihan dari kekacauan Perang Dunia I. (Brunnermeier *et al.*, 2023).

3. *The Great Depression* (Depresi Hebat), 1929

Penurunan ekonomi dunia yang dimulai pada tahun 1929 dan berlangsung hingga sekitar tahun 1939. Itu adalah depresi terpanjang dan terberat yang pernah dialami oleh dunia industri Barat, yang memicu perubahan mendasar dalam institusi ekonomi, kebijakan ekonomi makro, dan teori ekonomi. Meskipun berasal dari Amerika Serikat, Depresi Hebat menyebabkan penurunan produksi yang drastis, pengangguran yang parah, dan deflasi akut di hampir setiap negara di dunia. Efek sosial dan budayanya tidak kalah mencengangkan, terutama di Amerika Serikat,

di mana Depresi Hebat mewakili kesulitan terbesar yang dihadapi orang Amerika sejak Perang Saudara.

Empat faktor yang memicu hal tersebut yakni :

- 1) Kehancuran pasar saham pada tahun 1929 yang menyebabkan hancurnya kepercayaan pada ekonomi Amerika, hal tersebut mengakibatkan penurunan tajam dalam pengeluaran dan investasi.
- 2) Kepanikan perbankan di awal tahun 1930-an menyebabkan banyak bank bangkrut, sehingga hal tersebut mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk pinjaman.
- 3) Standar emas mengharuskan bank sentral asing untuk menaikkan suku bunga untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat, menekan pengeluaran dan investasi di negara-negara tersebut.
- 4) Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley (1930) mengenakan tarif tinggi pada banyak barang industri dan pertanian, mengundang tindakan pembalasan yang pada akhirnya mengurangi produksi dan menyebabkan perdagangan global berkontraksi. (Christina D. Romer ; Richard H. Pells, 2023)

4. Krisis Minyak, 1973

Minyak adalah salah satu bahan mentah terpenting negara. Dibayangi oleh Perang Yom Kippur antara Suriah dan Mesir melawan Israel, OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) membuat minyak sebagai senjata dengan memberlakukan embargo minyak pada negara yang mendukung Israel. Biaya minyak mentah meningkat karena produksi menurun, terutama di Amerika Serikat dan Belanda.

Selama Perang Arab-Israel 1973, anggota Arab dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)

memberlakukan embargo terhadap Amerika Serikat sebagai pembalasan atas keputusan AS untuk memasok militer Israel dan untuk mendapatkan pengaruh dalam perdamaian pascaperang. negosiasi. Anggota OPEC Arab juga memperluas embargo ke negara lain yang mendukung Israel termasuk Belanda, Portugal, dan Afrika Selatan. Embargo tersebut melarang ekspor minyak bumi ke negara-negara yang ditargetkan dan memperkenalkan pemotongan produksi minyak. Negosiasi selama beberapa tahun antara negara penghasil minyak dan perusahaan minyak telah mengacaukan sistem penetapan harga yang sudah berlangsung puluhan tahun, yang memperburuk efek embargo. (sumber : Office of the Historian and State)

5. Senin Hitam (*Black Monday*)

Penyebab pasti Senin Hitam (*Black Monday*) pada hari Senin 19 Oktober 1987 belum bisa dipastikan, yakni ketika Dow Jones Industrial Average turun 22,6 persen, pada saat itu, itu juga menandai penurunan pasar paling tajam di Amerika Serikat sejak *The Great Depression*.

Black Monday menggarisbawahi konsep "globalisasi," yang masih cukup baru pada saat itu, dengan menunjukkan sejauh mana pasar keuangan di seluruh dunia telah saling terkait dan terhubung secara teknologi. *Black Monday* menyebabkan sejumlah reformasi penting, termasuk bursa yang mengembangkan ketentuan untuk menghentikan sementara perdagangan jika terjadi aksi jual pasar yang cepat. Selain itu, tanggapan Federal Reserve menjadi acuan bagi penggunaan "likuiditas" oleh bank sentral untuk membendung krisis keuangan (Eckblad, 2013)

6. Krisis Moneter Asia Tenggara, 1997

Krisis mata uang Asia Tenggara terjadi pada tahun 1997, krisis ini dimulai dengan hilangnya kepercayaan

investor terhadap mata uang Asia. Jadi ada efek domino yang dimulai di Thailand dan menyebar ke Filipina, Hong Kong, Malaysia dan Indonesia dan terus menyebar, menciptakan krisis global.

Pada tanggal 2 Juli 1997, Thailand mendevaluasi mata uangnya relatif terhadap dolar AS. Perkembangan ini, yang mengikuti berbulan-bulan tekanan spekulatif yang secara substansial menguras cadangan devisa resmi Thailand, dan menandai awal krisis keuangan yang parah di sebagian besar Asia Timur. Pada bulan-bulan berikutnya, pasar mata uang, ekuitas, dan properti Thailand semakin melemah karena kesulitannya berkembang menjadi krisis neraca pembayaran dan perbankan kembar. Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga membiarkan mata uang mereka melemah secara substansial dalam menghadapi tekanan pasar. Hong Kong menghadapi beberapa serangan spekulatif besar namun tidak berhasil pada mata uangnya terhadap dolar; hal tersebut memicu aksi jual pasar saham jangka pendek di seluruh dunia. Dan tekanan neraca pembayaran yang parah di Korea Selatan membawa negara itu ke jurang gagal bayar (Clark, 2013)

7. Krisis Rubel, 1998

Krisis Rubel terjadi di Rusia karena korupsi, kebijakan reformasi ekonomi yang tidak efektif, devaluasi nilai Rubel, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, posisi Rusia sebagai pengeksport sepertiga cadangan minyak dan gas dunia membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Ketika investor asing menarik uang mereka dari Rusia, bank lumpuh dan harus meminjam dari IMF. Berikut *timeline* dari krisis Rubel yang terjadi di Rusia. (Chiodo and Owyang, 2002)

Tabel 9.1. A Timeline of Russian Events

<i>A Timeline of Russian Events</i>	
April 1996	Negosiasi dengan Klub Paris dan London untuk pembayaran utang Soviet dimulai
1997	1. Surplus perdagangan bergerak menuju keseimbangan. 2. Inflasi sekitar 11 persen. 3. Minyak dijual dengan harga \$23/barel. 4. Analis memprediksi peringkat kredit yang lebih baik untuk Rusia. 5. Bank Rusia meningkatkan kewajiban luar negeri. 6. Gaji riil merosot. 7. Hanya 40 % tenaga kerja yang dibayar penuh dan tepat waktu. 8. Defisit sektor publik tinggi.
September/Oktob er 1997	Negosiasi dengan Klub Paris dan London selesai.
11 November 1997	Krisis Asia menyebabkan serangan spekulatif terhadap rubel. CBR mempertahankan rubel, kehilangan \$6 miliar.
December 1997	• Tahun berakhir dengan pertumbuhan 0,8 persen. • Harga minyak dan logam nonferrous mulai turun
Februari 1998	• Kode pajak baru diserahkan ke Duma. • Dana IMF diminta.
23 Maret 1998	• Yelstin memecat seluruh pemerintahan dan menunjuk Kiriyenko. • Permintaan lanjutan untuk dana IMF.
April 1998	Serangan spekulatif lainnya terhadap rubel.
24 April 1998	Duma akhirnya mengkonfirmasi penunjukan Kiriyenko

<i>A Timeline of Russian Events</i>	
Awal Mei 1998	• Dubinin memperingatkan menteri pemerintah tentang krisis utang yang akan datang, dengan dihadiri wartawan • Kiriyenko menyebut pemerintah Rusia “sangat miskin.”
19 Mei 1998	CBR meningkatkan suku bunga pinjaman dari 30 persen menjadi 50 persen dan mempertahankan rubel dengan \$1 miliar.
Pertengahan Mei 1998	• Lawrence Summers tidak diizinkan bertemu dengan Kiriyenko. • Harga minyak terus menurun. • Oligarki minyak dan gas menganjurkan devaluasi rubel untuk meningkatkan nilai ekspor mereka.
23 Mei 1998	IMF meninggalkan Rusia tanpa kesepakatan tentang rencana penghematan.
27 Mei 1998	CBR kembali menaikkan suku bunga kredit menjadi 150 persen
Musim panas 1998	Pemerintah Rusia merumuskan dan mengiklankan rencana anti-krisis.
20 Juli 1998	IMF menyetujui paket bantuan darurat (pencairan pertama menjadi \$4,8 miliar).
13 Agustus 1998	Pasar saham, obligasi, dan mata uang Rusia melemah akibat ketakutan investor akan devaluasi; harga berkurang.
17 Agustus 1998	Pemerintah Rusia mendevaluasi rubel, gagal bayar utang dalam negeri, dan menyatakan moratorium pembayaran kepada kreditur asing.
23-24 Agustus 1998	Kiriyenko dipecat
2 September 1998	Rubel mengambang

<i>A Timeline of Russian Events</i>	
Desember 1998	Tahun berakhir dengan penurunan output riil sebesar 4,9 persen.

Sumber : CBR, Central Bank of Russia dalam Chiodo and Owyang (2002)

8. "Dekade yang Hilang" Jepang 1990-2000

Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban dan resesi sejak tahun 1990-an, fenomena tersebut disebut "Dekade yang Hilang di Jepang". Beberapa alasan hal tersebut terjadi adalah karena permasalahan struktural.

Masalah struktural muncul terutama dari populasi yang menua, kebijakan fiskal yang tidak efektif, dan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mencapai sekitar 18% dari total belanja pemerintah. Tingkat pengeluaran yang tinggi ini membuat beberapa sektor, seperti pertanian menjadi lemah.

Masalah struktural lebih lanjut muncul dari persyaratan modal yang dibuat Bank-bank Jepang, mereka enggan meminjamkan uang kepada bisnis pemula dan UKM, sehingga memperkecil peluang inovasi dan kemajuan teknologi Jepang. Pertumbuhan ekonomi lebih diperlambat lagi oleh yang tingginya apresiasi yen pada pertengahan 1990-an dan upah yang tinggi, menyebabkan perusahaan manufaktur Jepang pindah dari Jepang ke negara-negara Asia lainnya, sehingga produksi dalam negeri berkurang. (Yoshino and Taghizadeh Hesary, 2015).

9. Resesi hebat, 2008

Bank dan pemberi pinjaman hipotek menjadi semakin liar dengan praktik pinjaman mereka di tahun-tahun menjelang "Resesi Hebat". Hipotek menjadi lebih mudah didapat, dengan standar yang lebih mudah untuk memastikan agar peminjam dapat melunasinya. Dengan

lebih banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan akses meminjam, terjadi ledakan konstruksi dan harga meningkat secara substansial.

Jenis hipotek baru ini, yang disebut “*subprime*”, ditawarkan kepada peminjam dengan catatan kredit yang buruk, pendapatan yang tidak mencukupi, dan skor kredit yang kurang optimal. Hipotek ini biasanya menampilkan pembayaran rendah atau tanpa uang muka dan pembayaran bulanan awal yang rendah untuk menarik peminjam. Peminjam ini biasanya tidak memahami fitur rumit dari pinjaman mereka dan sifat suku bunga mereka.

Sebagian besar hipotek *subprime*, selain membuat fitur pembayaran balon yakni pembayaran yang mungkin rendah di tahun-tahun sebelum pembayaran balon jatuh tempo, tetapi di akhir pinjaman kita harus membayar dalam jumlah besar (Protection, 2020) dan standar penjaminan di bawah standar, juga merupakan hipotek tarif yang dapat disesuaikan (Adjustable-Rate Mortgage /ARM).

Dari tahun 2004 hingga 2006, Federal Reserve AS menaikkan suku bunga dana federal dari 1% menjadi 5,25%, dan suku bunga ARM *subprime* naik pada saat yang sama dengan kenaikan pembayaran pengantar rendah. Lonjakan pembayaran bulanan yang tiba-tiba ini lebih dari yang mampu dibayar oleh banyak peminjam dan gelombang penyitaan dimulai (Duggan, 2023).

10. Krisis Utang Sovereign Eropa, 2009 hingga saat ini

Agustus 2007 menandai fase pertama krisis keuangan global, dengan dimulainya operasi likuiditas oleh Bank Sentral Eropa. Bank-bank besar Eropa mengalami kerugian di pasar A.S, dalam sekuritas beragun dan ketergantungan bank-bank ini pada pasar uang A.S. yang merupakan sumber keuangan dollar. Terlebih, krisis global

memasuki fase yang lebih akut pada September 2008 dengan runtuhnya Lehman Brothers. Krisis keuangan global yang parah ini terjadi pada akhir 2008 dan awal 2009 mengguncang Eropa sama seperti yang pernah dialami Amerika Serikat.

Pada akhir 2009, krisis utang negara Eropa memasuki fase baru. Setahun sebelum itu, sejumlah negara melaporkan peningkatan defisit/PDB yang lebih besar dari perkiraan rasio. Misalnya, pendapatan fiskal di Irlandia dan Spanyol turun jauh lebih cepat daripada PDB akibat sensitivitas tinggi penerimaan pajak terhadap penurunan konstruksi PDB dan harga aset. Selain itu, skala perkiraan resesi dan naiknya kerugian sektor perbankan atas kredit macet di sejumlah negara memiliki dampak negatif tidak langsung terhadap nilai obligasi negara mereka. (Lane, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Brunnermeier, M.K. et al. 2023. 'The Debt-Inflation Channel of the German Hyperinflation', SSRN Electronic Journal [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.4303537>.
- Chiodo, A.J. and Owyang, M.T. 2002. 'A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998', Review, 84(6), pp. 7–18. Available at: <https://doi.org/10.20955/r.84.7-18>.
- Christina D. Romer ; Richard H. Pells .2023. Great Depression. Available at: <https://www.britannica.com/event/Great-Depression> (Accessed: 15 April 2023).
- Clark, M.C.; J. 2013. Asian Financial Crisis, federalreservehistory.org. Available at: <https://www.federalreservehistory.org/essays/asian-financial-crisis#:~:text=On July 2%2C 1997%2C Thailand,across much of East Asia> (Accessed: 15 April 2023).
- Duggan, W. .2023. A Short History Of The Great Recession, forbes.com. Available at: <https://www.forbes.com/advisor/investing/great-recession/> (Accessed: 15 April 2023).
- Eckblad, D.B.; M. 2013. Stock Market Crash of 1987, federalreservehistory.org. Available at: <https://www.federalreservehistory.org/essays/stock-market-crash-of-1987> (Accessed: 15 April 2023).
- International Monetary Fund .2003. Buku Pedoman tentang IMF, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C., 20431, U.S.A. Seksi Grafik IMF. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf>.

- International Monetary Fund. What is The IMF, [imf.org](https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance#:~:text=The International Monetary Fund (IMF,of its 190 member countries.)). Available at: [https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance#:~:text=The International Monetary Fund \(IMF,of its 190 member countries.\)](https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance#:~:text=The International Monetary Fund (IMF,of its 190 member countries.)) (Accessed: 10 April 2023).
- Lane, P.R. .2012. 'The European sovereign debt crisis', *Journal of Economic Perspectives*, 26(3), pp. 49–68. Available at: <https://doi.org/10.1257/jep.26.3.49>.
- Nabila, S. .2022. 10 Krisis Moneter Terburuk Sepanjang Sejarah Dunia, [idxchannel.com](https://www.idx-channel.com/economics/10-krisis-moneter-terburuk-sepanjang-sejarah-dunia/3). Available at: <https://www.idx-channel.com/economics/10-krisis-moneter-terburuk-sepanjang-sejarah-dunia/3> (Accessed: 10 April 2023).
- Office of the Historian FSI, State USD of. Oil Embargo, 1973–1974 [Internet]. history.state.gov. [cited 2023 Apr 15]. Available from: <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo#:~:text=During the 1973 Arab-Israeli,the post-war peace negotiations>
- Protection, C.F.B. 2020. What is a balloon payment? When is one allowed?, [consumerfinance.gov](https://www.consumerfinance.gov). Available at: <https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-balloon-payment-when-is-one-allowed-en-104/#:~:text=a balloon payment%3F,When is one allowed%3F,the end of the loan.> (Accessed: 15 April 2023).
- Terrell, E. . 2021. United Copper, Wall Street, and the Panic of 1907. Available at: https://blogs.loc.gov/inside_adams/2021/03/united-copper-panic-of-1907/ (Accessed: 15 April 2023).
- Yoshino, N. and Taghizadeh Hesary, F. .2015. 'Japan's Lost Decade: Lessons for Other Economies', *SSRN Electronic Journal* [Preprint], (521). Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2593714>

BIODATA PENULIS



M. Zahari MS.

Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
(UNBARI) Jambi

M. Zahari MS. Lahir di Desa Pulau Buayo Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 7 November 1966 merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan H. M. Sahar dan Hj. Siti Aminah.

Menyelesaikan Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi tahun 1992, Magister Sains (M.Si) Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2001, dan Doktor Ekonomi (Dr) di Program Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2019.

Profesi penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi sejak tahun 1994. Mengampu mata kuliah Ekonomi Publik, Teori Ekonomi Makro, Ekonomi Moneter, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Metodologi Penelitian, Riset SDM, Perencanaan dan Pengembangan SDM, Manajemen Tim dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Disamping itu, penulis aktif sebagai tenaga peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Lingkungan Universitas Batanghari Jambi, dan Pusat Kajian

Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, serta sebagai Tim Editor pada Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi, Jurnal Khazanah Intelektual Balitbangda Provinsi Jambi, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen (Jakman) Penerbit Goodwood, Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, dan MAMEN (Jurnal Manajemen) Yayasan Literasi Sains Indonesia.

Buku yang telah diterbitkan; Green Ekonomi (2017), Metodologi Penelitian Kuantitatif (2020), Manajemen Sumber Daya Manusia (2021), Metodologi Penelitian Sosial (2021). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik (2022), Teori Ekonomi Makro (2022), dan Manajemen SDM, Strategi Organisasi Bisnis Modern (2022).

Jabatan Struktural yang telah diemban penulis adalah: Ketua Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2018-2022), sebelumnya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018). Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018); Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2006-2014); Sekretaris Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2008-2010); dan Kasubbag Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (1996-2000).

Keikutsertaan penulis dalam Organisasi sosial kemasyarakatan/publik, diantaranya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2003-2008), Dewan Pengupahan Provinsi Jambi (2008-2018), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT), dan Ketua

Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia (IRMLA) PW
Jambi (2022 – 2027).

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Natalia Artha Malau, SE,M.Si.

Natalia Artha Malau, SE,M.Si. dilahirkan di kota Pematangsiantar, tahun 1981. Lulus Sarjana dari Program Studi Ekonomi studi pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2004, lulus Magister Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan (MIESP) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Pada tahun 2004, diterima menjadi dosen di lingkungan Kopertis Wilayah 1 Provinsi Aceh-Sumut, dan sejak itu aktif mengajar di STIE Nusa Bangsa Medan dan beberapa kampus di Sumatra Utara. Dan pada tahun 2015, mulai mengajar penuh, di Universitas Negeri Manado. Saat ini mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNIMA dalam konsentrasi perencanaan pembangunan dan ekonomi moneter.

BIODATA PENULIS



Rizal Syaifudin, S.E., M.A.

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Penulis lahir di Purworejo tanggal 5 Januari 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada jurusan Applied Economics and Social Development di National Chengchi University, Taiwan. Selain mengajar penulis juga menekuni kegiatan penelitian dan penulisan artikel jurnal yang berfokus pada bidang perencanaan pembangunan dan ekonomi pembangunan. Selain itu penulis juga aktif melakukan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai stakeholder.

BIODATA PENULIS



Fadli Ilyas, S.E.Sy., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika

Penulis lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam konsentrasi Perbankan Syariah dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen konsentrasi Manajemen SDM. Penulis menekuni bidang menulis buku dan jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Bekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Roy Budiharjo, SE, M.Ak,

Dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta dan di tempatkan di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis pad prodi Akuntansi

Roy Budiharjo, SE, M.Ak, Menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan AKuntansi (SE) untuk S1 dan Magister Akuntansi (M.Ak) untuk S2. Karir sebagai Dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta dan di tempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pad prodi Akuntansi. Dosen tersertifikasi pada tahun 2019. Jabatan Fungsional adalah Lektor

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan

ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku sekaligus menjadi editor buku (editing naskah) dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariyah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id

BIODATA PENULIS



Nita Fauziah Oktaviani, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjuangan
Tasikmalaya

Penulis lahir di Tasikmalaya pada tanggal 9 Oktober 1995. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Perjuangan Tasikmalaya Program Studi Manajemen. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Siliwangi.